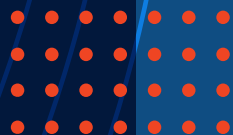


# Laporan Tahunan 2019



# DAFTAR ISI

## BAKRIE TELECOM

- 3 Kilas Kinerja 2019
- 4 Ikhtisar Keuangan
- 5 Informasi Saham
- 7 Sambutan Dewan Komisaris  
Dan Direksi
- 8 Sambutan Komisaris Utama
- 14 Sambutan Direktur Utama
- 20 Jejak Langkah

## PROFIL PERUSAHAAN

- 23 Profil Perusahaan
- 24 Riwayat Perusahaan
- 26 Visi, Misi
- 27 Peristiwa Penting
- 28 Kegiatan Usaha
- 31 Struktur Perseroan  
Dan Entitas Anak
- 33 Struktur Organisasi
- 36 Profil Dewan Komisaris
- 42 Profil Direksi
- 46 Sumber Daya Manusia
- 47 Komposisi Pemegang  
Saham

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**

- 51** Analisis Hasil Operasional
- 52** Pendapatan Usaha
- 56** Posisi Keuangan
- 59** Investasi Barang Modal
- 59** Prospek Usaha
- 59** Strategi Pemasaran

## **LAPORAN BERKELANJUTAN**

- 62** Tata Kelola Perusahaan
- 62** Direksi
- 66** Dewan Komisaris
- 69** Komite- Komite
- 75** Auditor Eksternal
- 76** Sekretaris Perusahaan

## **TATA KELOLA PERUSAHAAN**

- 79** Rapat Umum Pemegang Saham
- 83** Internal Control
- 84** Audit Internal
- 86** Manajemen Resiko

## **NILAI-NILAI PERUSAHAAN**

- 94** Penerapan GCG
- 99** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan





# KILAS KINERJA 2019

IKHTISAR DATA  
KEUANGAN PENTING

LAPORAN LABA RUGI (DALAM MILIAR RUPIAH)	2019	2018	2017
Pendapatan usaha bruto	10,3	8,5	7,9
Pendapatan usaha neto	4,0	3,8	3,5
Laba (rugi) bruto	(23,3)	(37,1)	(856,6)
EBITDA	(22,9)	(35,2)	(42,7)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	7,3	(728,0)	(1.605,2)
Laba (rugi) neto	7,3	(720,6)	(1.496,5)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	7,3	(720,6)	(1.496,5)
Total Laba (rugi) komprehensif	(361,1)	(1.263,9)	(1.496,6)
Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	(361,1)	(1.263,9)	(1.496,6)
Jumlah saham beredar (juta lembar)	36.773,9	36.773,9	36.773,9
Laba (rugi) neto per saham dasar	(0,2)	(19,6)	(40,7)
<b>Posisi keuangan (dalam miliar rupiah)</b>			
Kas dan setara kas	0,9	0,3	0,3
Aktiva lancar lainnya	0,2	1,3	3,9
Aktiva tidak lancar	11,5	711,9	713,8
Total Aktiva	15,7	713,5	718,0
Kewajiban jangka pendek	9.827,9	10.096,5	8.933,6
Kewajiban jangka panjang	5.432,2	6.036,3	5.939,8
Total Kewajiban	15.260,1	16.132,7	14.873,4
Total Ekuitas (defisiensi modal)	(15.244,0)	(15.419,2)	(14.155,4)
Modal kerja neto	(9.826,9)	(10.094,4)	(8.929,3)
<b>Rasio (%)</b>			
Margin pendapatan neto	39,2	44,6	44,5
Margin EBITDA	(223,2)	(434,6)	(542,5)
Margin rugi neto	70,8	(8.477,6)	(18.943,0)
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	46,4	(101,0)	(208,4)
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	(0,0)	4,7	10,6
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan	0,7	(84,8)	(189,4)
Rasio lancar	0,01	0,02	0,05
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	(100,1)	(104,6)	(105,1)
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	97.334,9	2.293,2	2.071,5

# INFORMASI SAHAM

## INFORMASI PERDAGANGAN SAHAM

INFORMASI SAHAM	2019	2018
Harga saham penutupan (Rp per lembar)	50	50
Jumlah saham beredar (juta lembar)	36.773,9	36.773,9
Kapitalisasi pasar (juta Rp)	1.838.695,2	1.838.695,2

PERGERAKAN HARGA SAHAM	2019			2018		
	TERTINGGI	TERENDAH	PENUTUPAN	TERTINGGI	TERENDAH	PENUTUPAN
Kuartal 1 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 2 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 3 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 4 (Rp)	50	50	50	50	50	50

Volume perdagangan saham pada Bursa Efek Indonesia selama 2019 adalah sebanyak 635.771.785 saham.

## INFORMASI AKSI KORPORASI

Sepanjang tahun 2019, tidak ada aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan.

## INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSİ)

Pada tahun 2019 Perseroan mengalami penghentian sementara perdagangan saham BTEL (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia dikarenakan laporan keuangan perseroan yang berakhir untuk periode tahun 2018 mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat dari Kantor Akuntan Publik yang mengaudit.





# SAMBUTAN

**DEWAN KOMISARIS  
DAN DIREKSI**



**TAUFAN E. N. ROTORASIKO**  
Komisaris Utama

## DEWAN KOMISARIS

### **PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,**

Perekonomian Indonesia secara keseluruhan di tahun 2019 menunjukkan daya tahan yang cukup baik dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh tingkat belanja domestik yang tetap terjaga dengan baik. Suatu indikasi yang baik bagi industri yang secara umum memproduksi barang atau jasa dengan bertopang pada pangsa masyarakat lokal di Indonesia. Industri jasa telekomunikasi yang notabene bergantung pada konsumsi masyarakat dalam negeri tetap menunjukkan geliat yang positif terlebih lagi kinerja lapangan usaha industri ini menjadi salah satu penyumbang kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dari sektor tersier. Kestabilan angka pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga sedikit banyak tentunya tercermin dalam catatan kinerja Perseroan di tahun 2019.

## EVALUASI MANAJEMEN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

PT Bakrie Telecom Tbk sebagai salah satu pelaku usaha di industri telekomunikasi mulai menunjukkan peningkatan kinerja di tahun 2019 dengan raihan pertumbuhan pendapatan sebesar 20,9% dibandingkan tahun 2018. Raihan angka yang ditorehkan Perseroan melalui entitas anaknya, PT Layanan Prima Digital (LPD) ini didorong oleh kestabilan tingkat penggunaan layanan sambungan telepon oleh pelanggan korporasi yang disediakan LPD plus penambahan pelanggan baru seiring pertumbuhan gedung-gedung tinggi atau high rise building di wilayah Jakarta dan kota penopang di sekitarnya. Lebih dari 2.000 sambungan telepon berhasil dihadirkan oleh LPD sebagai respon cepat atas permintaan layanan telekomunikasi yang andal untuk menyokong operasional bisnis pelanggan. Diperkirakan lebih dari 10 ribu users dari pelanggan korporasi memanfaatkan layanan sambungan telepon LPD dan sebagian korporasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan terkemuka. Walaupun pendapatan yang diperoleh Perseroan melalui LPD belum menunjukan lompatan yang tinggi, namun Dewan Komisaris melihat bahwa pertumbuhan

tersebut merupakan buah keseriusan Direksi dalam mengelola roda usaha Perseroan dengan eksekusi yang baik dalam kondisi yang masih menantang. Dalam konteks ini, Dewan Komisaris memiliki keyakinan bahwa strategi bisnis ini dan implementasinya dapat dikonversi ke arah scale up dalam suatu rencana dan target bisnis yang lebih besar. Bukan hal yang mudah, tetapi peluang untuk berkembang sangat terbuka seiring pembangunan gedung-gedung vertikal untuk perkantoran dan komersial yang cukup masif beberapa tahun ke depan. Mengutip prediksi Colliers International, diperkirakan di rentang tahun 2019 sampai dengan 2021 akan terdapat penambahan pasokan ruang perkantoran kurang lebih 1,5 juta meter persegi di Jakarta dan sekitarnya. Potensi ini tentunya harus menjadi bagian dari business plan Perseroan untuk beberapa waktu ke depan.



Di samping pengembangan bisnis sambungan telepon, LPD tetap mempertahankan dan mengembangkan lini usaha pengelolaan contact center yang sebelumnya sudah dirintis dan dibesarkan oleh Perseroan. Dengan lebih dari 130 perusahaan sebagai klien, kontribusi lini usaha contact center LPD terbilang stabil dalam menyumbang porsi pendapatan LPD di tahun 2019. Dewan Komisaris ingin menekankan lagi bahwa bisnis contact center merupakan bisnis kepercayaan dimana klien menyerahkan sebagian dari aspek atau proses layanan atas produk dan jasanya kepada LPD. Bukan perkara mudah bagi klien untuk memilih penyedia layanan contact center mengingat kaitannya yang erat dengan tingkat kepuasan konsumen terhadap barang atau jasa dan juga layanan yang diberikan. Oleh karena itu Dewan Komisaris mengapresiasi kepiawaian manajemen Perseroan dan LPD dalam mempertahankan kepercayaan tersebut.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi manajemen Perseroan dan LPD yang senantiasa mengikuti perkembangan dari bisnis transaksi perdagangan secara daring yang sangat masif. Di tahun 2019 setidaknya terdapat 10 pengelola marketplace di Indonesia yang tergolong besar dimana posisi pertama terbesar diduduki oleh suatu marketplace yang mendapat kunjungan sebanyak 1,2 miliar di tahun tersebut. Sekalipun proses e-commerce berjalan secara digital, real time, dan berbasis data, namun para pelaku usaha e-commerce terutama pengelola market place dan payment point online bank (PPOB) tetap membutuhkan

layanan sambungan telepon tetap yang sampai saat ini masih menjadi platform percakapan yang andal karena lebih minim gangguan. Di samping itu, salah satu cara untuk menjaga reputasi dan merespon kebutuhan konsumen secara cepat, perusahaan e-commerce juga memerlukan layanan contact center. Oleh karenanya, Dewan Komisaris juga menantang Direksi Perseroan untuk merespon cepat dan merebut peluang dari perkembangan e-commerce tersebut.

Secara umum Dewan Komisaris berpandangan bahwa manajemen telah melaksanakan strategi perusahaan secara terstruktur dan fokus sehingga dapat meraih pertumbuhan yang positif. Catatan penting, Direksi selain berfokus kepada kinerja keuangan juga telah melakukan perubahan terhadap organisasi Perseroan sesuai kebutuhannya, dengan harapan dapat memberikan nilai untuk jangka panjang yang berkesinambungan. Perubahan organisasi tersebut meliputi berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya manusia mulai dari komposisi yang diperlukan dalam rangka mencapai target Perseroan hingga kompetensi yang dibutuhkan. Dengan penyesuaian aspek kompetensi, kebutuhan bisnis, dan target Perseroan, manajemen dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan memastikan bahwa karyawan mengembangkan kompetensi yang tepat. Hal ini juga penting untuk merekrut dan mempertahankan talent yang baik, dalam rangka memastikan keberhasilan jangka panjang Perseroan.



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata kelola perusahaan telah menjadi nilai tersendiri bagi Perseroan. Sepanjang tahun, Direksi dengan dukungan Dewan Komisaris terus menekankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam semua kegiatan bisnis dan operasional. Dalam tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite tersebut memberikan masukan yang berharga terhadap pengendalian keuangan, eksposur risiko, dan perencanaan remunerasi dan regenerasi dalam rangka memastikan kelangsungan jangka panjang dari usaha Perseroan.

## PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris memiliki keyakinan bahwa dengan pola kerja cepat dan tepat dalam menangkap dan mengeksekusi setiap peluang akan membawa keberhasilan Perseroan terutama untuk jangka panjang. Direksi harus terus menerus memikirkan dan mampu mengimplementasikan model bisnis atau inisiatif baru di tengah persaingan usaha yang akan semakin kompetitif.

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Direksi Perseroan dan manajemen unit usaha dapat mencari dan mendapatkan peluang di tengah perkembangan transaksi e-commerce yang masif dan penambahan ruang kantor di gedung vertikal. Terhadap ITN, Dewan Komisaris memiliki harapan agar manajemen dapat mengoptimalkan kemampuan ITN dalam pengerjaan berbagai proyek sipil dan teknologi baik yang bersifat one-time project maupun recurring project. Dalam APBN tahun 2021, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 414 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Gencarnya pembangunan infrastruktur dengan nilai proyek yang sangat besar ini sudah seharusnya menjadi tantangan dan peluang tersendiri oleh ITN untuk mengambil bagian di dalamnya. Di sisi lain kebutuhan pengadaan atau pemutakhiran layanan teknologi informasi di sektor swasta maupun badan usaha milik negara atau daerah juga menjadi potensi besar bagi ITN yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.

## PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Dewan Komisaris mengalami perubahan pada tahun 2019 dimana Bapak Anindya Novyan Bakrie, Bapak Bobby Gafur Umar, dan Bapak Ai Mulyadi Mamoer tidak lagi menjadi anggota Dewan Komisaris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan. Kemudian komposisi Dewan Komisaris selanjutnya dijabat oleh kami, Taufan E.N. Rotorasiko selaku komisaris utama, Bapak Robertus Bismarka Kurniawan selaku komisaris, dan Bapak John Pieter Nazar sebagai komisaris independen.

Kami berharap agar dapat terus bahu-membahu bekerja sama di tahun mendatang dan mendukung Direksi Perseroan untuk mencapai sasaran yang dituju.

## PENUTUPAN

Atas nama Dewan Komisaris, saya ingin berterima kasih kepada manajemen dan seluruh karyawan PT Bakrie Telecom Tbk dan unit usaha atas kerja keras, kontribusi, dan komitmen di tahun 2019, serta mitra dan pemegang saham untuk dukungan mereka. Dengan soliditas semua komponen Perseroan kita berharap kesuksesan bagi Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Atas nama Dewan Komisaris



**TAUFAN EN ROTORASIKO**

Komisaris Utama





**HARYA MITRA HIDAYAT**  
Direktur Utama

DIREKSI

**PARA PEMANGKU KEPENTINGAN  
YANG KAMI HORMATI,**

Peta kompetisi industri jasa telekomunikasi semakin ketat di tahun 2019 dengan pertumbuhan di sektor ini yang cenderung stagnan mengikuti catatan di tahun sebelumnya. Namun demikian, sebagai industri sektor tersier, jasa telekomunikasi memberikan kontribusi yang tergolong baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 yang tercatat 5,02%. Daya beli masyarakat Indonesia yang terjaga dengan baik mendorong kestabilan pertumbuhan usaha di berbagai sektor terutama sektor yang mengandalkan pendapatan dari masyarakat dalam negeri, termasuk industri jasa telekomunikasi.

## OPERASIONAL USAHA

Di tahun 2019, kinerja operasional PT Bakrie Telecom Tbk cenderung membaik dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Perseroan masih didominasi oleh kontribusi PT Layanan Prima Digital (LPD), unit usaha Perseroan yang menyediakan layanan sambungan telepon bagi pelanggan korporat di gedung-gedung tinggi atau high rise building di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lebih dari 10 ribu users dari pelanggan korporasi yang menggunakan lebih dari 2.000 sambungan telepon yang disediakan LPD menjadi sumber pemasukan utama LPD sepanjang tahun 2019. Pembangunan gedung vertikal atau high rise building terutama di wilayah Jakarta dan area sekitarnya menciptakan pangsa baru pasar layanan sambungan telepon. Dengan prediksi penambahan pasokan ruang perkantoran kurang lebih 1,5 juta meter persegi di Jakarta dan sekitarnya sampai tahun 2021, Perseroan masih memiliki ruang yang cukup luas untuk mengembangkan lini usaha sambungan telepon maupun layanan data internet yang juga semakin diminati pelanggan korporat. Di sisi lain, LPD tetap mempertahankan dan mengembangkan lini usaha contact center yang telah berjalan dan melayani klien korporat selama lebih dari 10 tahun dengan kapasitas 250 agen yang dapat memberikan layanan 24 jam. Selain mengelola bisnis eksisting melalui LPD, Perseroan di tahun 2019 juga mengimplementasikan rencana usaha sehubungan transformasi dan diversifikasi usaha Perseroan untuk jangka panjang dengan mengambilalih PT Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) yang bergerak di bidang teknologi informasi dan jasa sipil.



## Operasional Usaha

Segera setelah pengambilalihan tersebut, manajemen Perseroan bergerak cepat untuk fokus menyusun rencana kerja dengan model bisnis dan inisiatif dengan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh ITN. Oleh karenanya kontribusi ITN secara konsolidasi terhadap Perseroan di tahun 2019 memang belum signifikan atau sekitar 23%.

## PERFORMANSI KEUANGAN

Dari tinjauan kinerja keuangan, di tahun 2019 LPD menyumbang porsi pendapatan kotor Perseroan sebesar Rp 7,9 miliar yang dihasilkan dari operasional bisnis telekomunikasi, contact center, dan data connectivity. Sedangkan ITN berkontribusi pada pos yang sama sebesar Rp 2,4 miliar terdiri dari pendapatan jasa teknologi informasi dan jasa sipil. Atas kontribusi pendapatan dari kedua entitas anak tersebut secara konsolidasian Perseroan mencatat peningkatan pendapatan kotor sebesar 20,9% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu.

Walaupun Perseroan masih membukukan EBITDA negatif Rp 22,9 miliar di tahun 2019 namun catatan tersebut menunjukkan perbaikan sebesar 34.9% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat negatif Rp 35,2 miliar. Perbaikan EBITDA tersebut disebabkan karena upaya Perseroan untuk menekan beban usaha, mencari sumber-sumber pendapatan baru. Di samping itu, Perseroan juga mencatatkan laba selisih kurs akibat pergerakan nilai tukar dengan selisih laba kurs Rp. 195 miliar yang dihitung dari beban hutang Perseroan dalam mata uang asing sebesar USD 380 juta.

Di bulan Oktober 2019, terdapat momen penting terkait aspek keuangan dan performansi Perseroan dalam pemenuhan kewajiban kepada pemerintah. Perseroan berhasil memenuhi pembayaran Biaya hak Penggunaan (BHP) Frekuensi kepada pemerintah sebesar Rp. 500 miliar melalui pencairan jaminan pelaksanaan pembayaran atau surety bond, dan karenanya aset tidak lancar Perseroan menjadi turun sebesar 98,4%.

## PROSPEK USAHA

Dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang, Direksi telah menganalisa peluang atau potensi perkembangan gedung vertikal dimana menurut Colliers International, diperkirakan tersedia lebih dari 1,5 juta meter persegi tambahan area perkantoran hingga tahun 2021. Tentunya ini menjadi potensi tambahan pangsa pasar yang baru dan besar bagi LPD. Selain itu menurut riset Statista, penetrasi pengguna untuk e-Commerce di Indonesia diekspektasikan mencapai 73.3% di tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 15.4%. Hal ini

juga menjadikan peluang usaha bagi LPD untuk mengembangkan layanan call center maupun sambungan telepon yang dibutuhkan oleh industri e-Commerce.

Potensi lain yang akan direspon cepat oleh Perseroan adalah penetrasi internet yang diperkirakan mencapai 256 Juta pengguna di tahun 2025 dibanding saat ini yang mencapai 185 Juta. Di sektor infrastruktur, dalam APBN 2021 pemerintah telah menganggarkan belanja proyek infrastruktur senilai Rp 414 triliun. Suatu angka yang sangat besar dan Direksi memandang hal ini sebagai potensi yang sangat besar bagi ITN untuk ikut ambil bagian baik dalam proyek infrastruktur ini.

Masih dalam kerangka prospek bisnis ke depan menyongsong analog switch off di industri penyiaran TV dengan menghadirkan siaran TV berbasis digital, sejak beberapa waktu terakhir Perseroan terus memantapkan rencana untuk mengambil peran sebagai penyedia dan pengelola infrastruktur jaringan siaran TV digital. Sebagai tahap awal, Perseroan direncanakan untuk mengelola infrastruktur jaringan stasiun televisi terrestrial digital yang berada dalam naungan Kelompok Usaha Bakrie. Sebagai bagian dari pengembangan ITN ke depan, Perseroan juga telah berhasil mendapatkan kesepakatan dengan beberapa korporasi dimana Perseroan melalui ITN akan menjadi penyedia dan pengelola *Low Range (LoRa) technology Internet of Things (IOT)*. Kegiatan bisnis ini pada dasarnya memberikan value added service pada korporasi menggunakan basis internet protokol untuk bisa mengoptimalkan peralatan dan equipment yang telah terpasang dan dipergunakan korporasi dalam menjalankan operasionalnya.

## ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Terkait dengan organisasi perusahaan, di tahun 2019 Perseroan telah melakukan penyesuaian organisasi terutama pada posisi satu level di bawah Direksi. Prinsip right man on right place masih sangat relevan bagi Perseroan dalam rangka kinerja organisasi yang efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana usaha Perseroan. Inisiatif penyesuaian organisasi tersebut mencakup beberapa aspek terkait pengelolaan sumber daya manusia mulai dari komposisi yang diperlukan dalam rangka mencapai target Perseroan hingga kompetensi yang dibutuhkan. Dengan penyelarasan aspek kompetensi, kebutuhan bisnis, dan target Perseroan, manajemen dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan memastikan bahwa karyawan mengembangkan kompetensi yang tepat. Hal ini juga penting untuk merekrut dan mempertahankan talent yang baik, dalam rangka memastikan keberhasilan jangka panjang Perseroan.

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Terkait tata kelola perusahaan, Perseroan secara terus menerus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) yang telah menjadi nilai yang menyatu dengan, kode etik, dan budaya yang dianut Perseroan. Sepanjang tahun 2019 Direksi merasakan dukungan yang nyata dari Dewan Komisaris maupun komite-komite yang berada di bawah kendali Dewan Komisaris dalam rangka memastikan Perseroan dijalankan dengan mengusung prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komunikasi yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan insidental baik secara formal maupun informal menunjukkan sinergi pengelolaan dan pengawasan jalannya Perseroan yang semakin membaik.



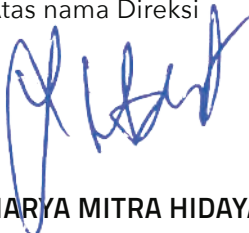
## PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI

Susunan anggota Direksi mengalami perubahan pada tahun 2019 dimana Bapak Robertus Bismarka Kurniawan dan Bapak Taufan Eko Nugroho Rotorasiko tidak lagi berada dalam jajaran Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Juni 2019. Selanjutnya kami, Harya Mitra Hidayat didaulat sebagai Direktur Utama menggantikan Bapak Robertus Bismarka Kurniawan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Robertus Bismarka Kurniawan dan Bapak Taufan Eko Nugroho Rotorasiko atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan di tahun 2019. Direksi berkeyakinan dapat mencapai sasaran yang dituju oleh Perseroan pada tahun-tahun mendatang dengan modal kekompakan dan kerjasama yang sudah terjalin cukup lama di antara anggota Direksi yang didukung oleh Dewan Komisaris.

## PENUTUP

Akhir kata, atas segala pencapaian Perseroan di tahun 2019 dan atas dukungan semua pihak terutama Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, segenap karyawan dan mitra kerja terhadap Perseroan, kami mewakili Direksi Perseroan ucapkan terima kasih. Semoga semua upaya, kerja keras, kerjasama dan dukungan terus menerus dari semua pemangku kepentingan akan membawa kesuksesan bagi Perseroan.

Atas nama Direksi



**HARYA MITRA HIDAYAT**  
Direktur Utama



# PERUSAHAAN DARI WAKTU KE WAKTU

## 2003 - 2006

- Meluncurkan ESIA, layanan Fixed Wireless Access dengan teknologi terkini CDMA (Code Division Multiple Access).
- Perseroan berganti nama menjadi PT Bakrie Telecom.
- Talktime menjadi jargon baru untuk perhitungan biaya durasi percakapan telepon sebagai bagian dari inisiatif Perseroan yang mengusung prinsip disruptive innovation
- Perluasan wilayah layanan FWA di area JBB.
- Membuka partisipasi modal publik dengan mencatatkan saham perdana Perseroan (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Jakarta dan menjadi perusahaan terbuka.

## 2003 - 2006

## 2007 - 2010

## 1993 - 2002

## 1997 - 2002

Menyediakan layanan FWA di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (JBB) dengan teknologi E-TDMA.

## 2007 - 2010

- Penggelaran layanan FWA secara nasional.
- Meluncurkan pola bundling handset dan layanan ESIA dengan harga terjangkau sehingga masyarakat lapisan menengah bawah dapat menikmati layanan telekomunikasi.
- Perseroan mendapatkan kepercayaan investor dengan keberhasilan penyerapan obligasi Rp 650 miliar yang diterbitkan Perseroan.
- Right Issue senilai Rp 3 triliun dan mendapatkan fasilitas vendor financing senilai USD 150 juta.
- Meluncurkan layanan sambungan langsung internasional (SLI).
- Penerbitan Obligasi Global USD 250 juta yang seluruhnya diserap investor internasional.
- Meluncurkan layanan Broadband Wireless Access untuk akses data internet yang cepat.
- Penerapan tarif SMS sistem jumlah karakter pesan oleh Perseroan menjadi yang pertama di dunia.

## 2011 - 2014

- Mengeluarkan paket bundling ponsel android EVDO pertama dengan kartu perdana esia EVDO. Kerjasama kolaborasi dengan Smartfren
- Memperoleh lisensi layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak seluler
- Kesepakatan restrukturisasi utang dengan kreditur melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

## 2019

- Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi kepada Negara sebesar Rp 500 miliar
- Peningkatan jumlah sambungan telepon yang disediakan oleh PT Layanan Prima Digital menjadi lebih dari dua ribu sambungan
- PT Inovasi Teknologi Nusantara sebagai entitas anak Perseroan yang baru.


## 2011 - 2014

## 2015 - 2018

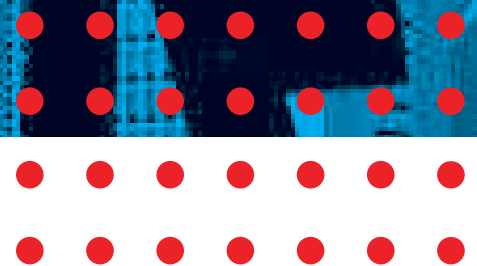
## 2019

## 2015 - 2018

- Layanan FWA Esia bekerjasama dengan PT Smartfren Telecom Tbk
- Meluncurkan aplikasi layanan voice OTT dengan brand ESIATalk.
- Penggelaran layanan telekomunikasi dengan sasaran pasar korporasi di high rise building oleh entitas anak Perseroan, PT Layanan Prima Digital



# PROFIL PERUSAHAAN



# PROFIL BAKRIE TELECOM

## NAMA PERUSAHAAN PUBLIK

PT BAKRIE TELECOM TBK.

## ALAMAT

WISMA BAKRIE LT. 2  
JL. HR RASUNA SAID KAV B-1 JAKARTA  
12920

## NO. TELP./FAX.

+6221 - 52920264

## WEBSITE

[WWW.BAKRIETELECOM.COM](http://WWW.BAKRIETELECOM.COM)

## EMAIL

[CORSEC@BAKRIETELECOM.COM](mailto:CORSEC@BAKRIETELECOM.COM)

## RIWAYAT PERUSAHAAN

PT Bakrie Telecom Tbk pertama kali didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Radio Telepon Indonesia (Ratelindo). Pada awal kehadirannya, Ratelindo mampu menghadirkan jasa layanan telekomunikasi sambungan telepon tetap yang menjadi alternatif pilihan terutama bagi pangsa masyarakat yang belum terlayani sambungan telepon yang diselenggarakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom).



Bersamaan dengan diluncurkan layanan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (Fixed Wireless Access (FWA) dengan brand “Esia” di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat (JBJB), Ratelindo mengubah nama korporasinya menjadi PT Bakrie Telecom. Selanjutnya di tahun 2006 Perseroan mencatatkan tonggak sejarah sebagai salah satu perusahaan jasa dan jaringan telekomunikasi yang menawarkan saham perdana kepada publik (Initial Public Offering/IPO) melalui Bursa Efek Indonesia. Perseroan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal ke dalam Perseroan. Sebagai perusahaan publik, nama

Perseroan berubah menjadi PT Bakrie Telecom Tbk dengan ticker BTEL.

Setelah keberhasilan layanan Esia di wilayah JBJB, Perseroan diberikan lisensi FWA baru oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memungkinkan Perseroan menggelar layanan telekomunikasi secara nasional di seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2007. Dengan lisensi tersebut Perseroan mulai mengembangkan dan memperluas layanan Esia ke beberapa kota dan provinsi di Indonesia, antara lain pulau Jawa, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan provinsi lainnya.

Di tahun yang sama Perseroan juga mulai menggelar layanan sambungan langsung internasional (SLI) dengan lisensi penyelenggaraan SLI yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Tidak berhenti pada layanan FWA dengan teknologi CDMA, pada tahun 2010 seiring semakin bertumbuhnya pasar data internet di Indonesia, BTEL mulai menambah layanan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada layanan percakapan dan SMS menjadi penyedia layanan data Broadband Wireless Access (BWA) dengan menggunakan teknologi terbaru yang merupakan pengembangan dari CDMA yaitu EVDO (Evolution Data Optimized) yang setara dengan teknologi GSM 3G (third generation) dimana dengan layanan terbaru ini pelanggan dapat menikmati layanan akses internet atau data dengan berbagai media atau *gadget*.

Pada tahun 2012, BTEL mengintegrasikan merek dagang layanan data internet AHA untuk berada di bawah naungan perusahaan Bakrie Connectivity (BCON) dan ESIA yang berada di bawah lingkup BTEL. Perpaduan dua merek dagang besar ini ditandai dengan peluncuran modem ESIA Max-D pada 1 Juni 2012. Di samping sejalan dengan strategi bisnis awal BTEL sebagai budget operator, langkah ini juga merupakan jawaban Perseroan dalam menghadapi tantangan persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat. Sejak tahun 2013 dan tahun 2014, BTEL mulai kembali mengkonsentrasikan layanannya secara lebih intensif di daerah JBJB yang secara historis dan operasional telah terbukti memberikan kontribusi paling besar dan dominan terhadap pendapatan Perseroan.



Setelah Perseroan dan kreditur menyetujui restrukturisasi utang melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhir tahun 2014, Perseroan mulai untuk mempersiapkan inisiatif baru yang bersifat jangka panjang dimana perwujudan salah satu inisiatif baru di tahun 2016 adalah penyediaan layanan telekomunikasi dengan fokus pada segmen pengguna di gedung-gedung tinggi (high rise building) melalui anak usaha Perseroan, PT Layanan Prima Digital dan tetap menjalankan bisnis call centre atau contact centre yang telah dipercaya oleh pelaku usaha. BTEL meyakini bahwa transformasi model bisnis yang saat ini sedang berjalan mempunyai harapan untuk menjadi lini usaha baru yang akan menjadi andalan Perseroan.

Di tahun 2019, PT Layanan Prima Digital tercatat telah menyediakan lebih dari dua ribu sambungan telepon aktif di beberapa *high rise building* di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pelanggan dari layanan PT Layanan Prima Digital didominasi oleh pelanggan korporasi yang memang menjadi target pasar. Di tahun yang sama anak usaha Perseroan yang lain, PT Inovasi Teknologi Nusantara walaupun belum menunjukkan kontribusi yang signifikan namun sudah mulai membentuk fundamental untuk mampu bersaing dalam penyediaan layanan teknologi informasi dan jasa sipil.

## VISI & MISI PERUSAHAAN

### VISI

Menghubungkan semua generasi dengan dunia digital.

### MISI

Memberikan pengalaman unik dan menyenangkan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan dunia informasi, komunikasi dan hiburan.



SION LED US HERE

## PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2019

- ▶ Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 500,000,000,000,- (lima ratus miliar rupiah).
- ▶ Pengambilalihan PT Inovasi Teknologi Nusantara, perusahaan yang bergerak di jasa layanan teknologi informasi dan jasa sipil, sebagai entitas anak yang terkonsolidasi dengan Perseroan.

## KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Perseroan didirikan pada tahun 1993 dengan suatu tujuan untuk menangkap setiap peluang seiring dengan semakin berkembangnya teknologi terutama teknologi informasi dan telekomunikasi. Berangkat pada kondisi pada awal 1990-an dimana masih banyak kalangan masyarakat yang belum mendapatkan layanan sambungan telepon tetap yang diselenggarakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Perseroan kemudian menangkap peluang besar dari ceruk pasar yang besar dan belum dimasuki oleh perusahaan lainnya. Perseroan memulai era sambungan telepon tetap tanpa sambungan kabel ke premis pelanggan dengan teknologi ETDMA (Enhanced Time Division Multiple Access).

Konsistensi Perseroan untuk berfokus pada kegiatan usaha telekomunikasi semakin nampak dengan transformasi produk layanan Perseroan yang sebelumnya hanya menyediakan layanan sambungan telepon tetap dengan teknologi ETDMA dengan menyediakan pula layanan Fixed Wireless Access dengan teknologi CDMA (Code Division Multiple Acces) di tahun 2003 dengan brand "esia". Dengan layanan FWA berbasis CDMA, pelanggan esia dapat menikmati layanan telepon nirkabel secara mobile dalam satu wilayah kode telepon. Perseroan pertama-tama mengembangkan layanan esia di area Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (JBJB).

Seiring dengan pertumbuhan pasar data internet yang pesat di awal tahun 2008,

Perseroan juga mulai untuk masuk dalam persaingan bisnis data internet sebagai pelengkap dari layanan FWA esia.

Setelah sebelumnya Perseroan menggelar sendiri layanan data internet, di tahun 2012 Perseroan mengintegrasikan layanan data internet tersebut ke anak perusahaannya yaitu PT Bakrie Connectivity dengan strategi pemfokusan bisnis data internet di anak perusahaan dan bisnis voice dan SMS tetap dijalankan oleh Perseroan. Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menggelar layanan esia bekerja sama atau berkolaborasi dengan PT Smartfren Telecom Tbk. Dengan kerjasama tersebut layanan esia dimungkinkan untuk dinikmati oleh pelanggan melalui jaringan yang diselenggarakan oleh PT Smartfren Telecom Tbk.



Mulai tahun 2016 Perseroan melalui entitas anak, PT Layanan Prima Digital (LPD) memulai inisiatif baru penyediaan layanan jasa telekomunikasi berupa sambungan telepon bagi pelanggan korporat di gedung-gedung tinggi atau high rise building di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai dengan tahun 2019 lebih dari 10 ribu users dari pelanggan korporasi yang menggunakan lebih dari 2.000 sambungan telepon yang disediakan LPD yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan usaha Perseroan. Di samping itu, LPD juga tetap mempertahankan dan mengembangkan layanan Contact Center yang tetap mendapatkan kepercayaan dari klien korporasi. Di tahun 2019 LPD tercatat memiliki kapasitas lebih 250 agen yang dapat memberikan layanan contact center

24 jam. LPD juga menyediakan short code berupa nomor unik dan singkat yang dapat dimanfaatkan oleh klien untuk mendukung kegiatan usahanya.

Di samping itu di tahun 2019 Perseroan mulai menjajaki memasuki model bisnis baru melalui PT Inovasi Teknologi Nusantara (ITN), entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan jasa sipil. Dari usaha pengelolaan IT solution dan infrastruktur, ITN telah memberikan sumbangan pendapatan Perseroan sebesar 23% di tahun 2019.

Kegiatan-kegiatan usaha tersebut merupakan sebagian dari kegiatan usaha lainnya yang dimungkinkan untuk dioperasikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu antara lain:

Menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa, telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap, serta jasa transaksi keuangan secara elektronik termasuk jasa pembayaran dengan menggunakan kartu dan jasa pengiriman uang secara elektronik baik di dalam maupun lintas negara dalam rangka memperluas pelayanan jasa telekomunikasi bagi masyarakat.

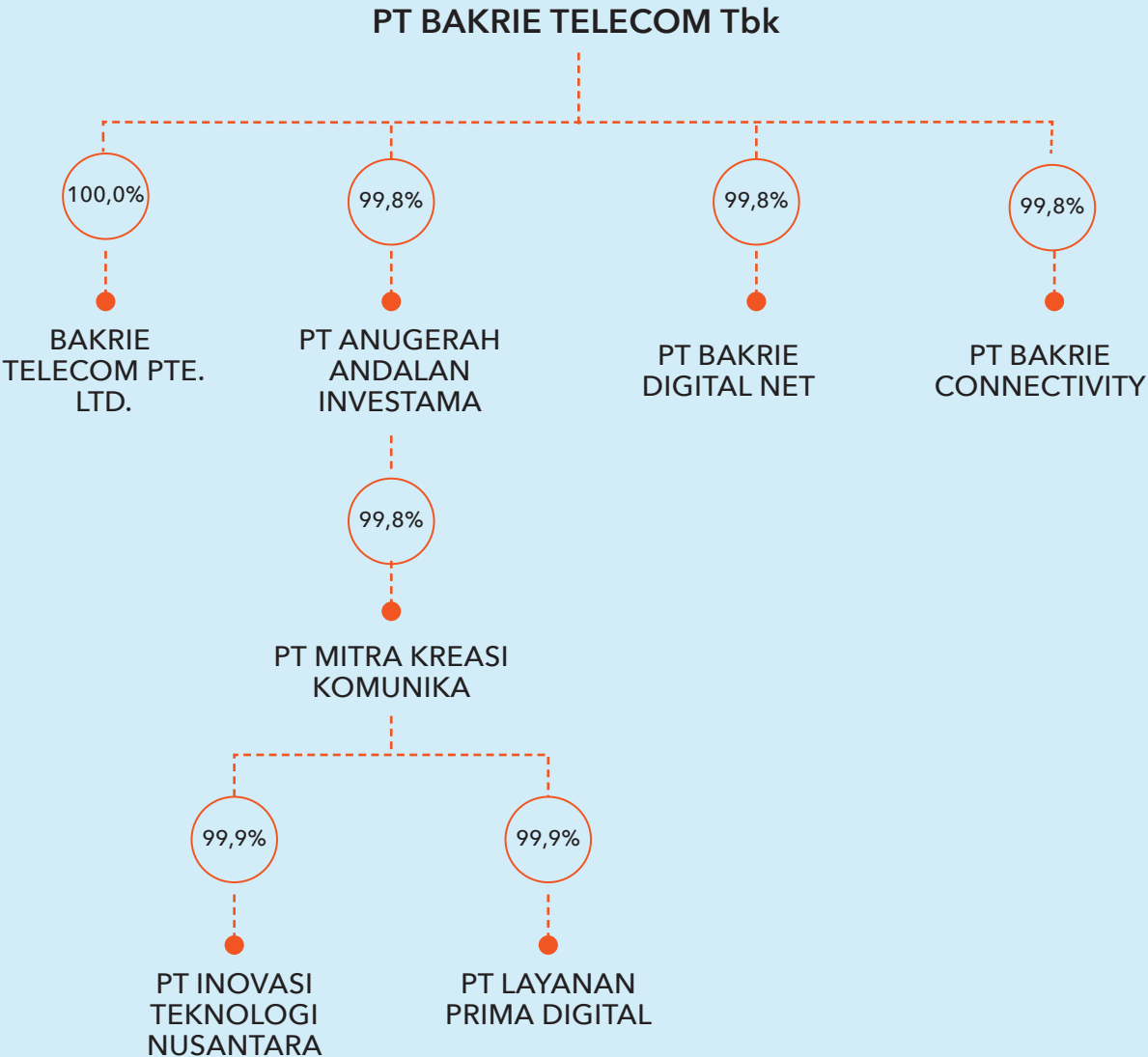
Merencanakan, mendesain, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya sebagai pendukung usaha Perseroan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi.

Melaksanakan usaha dan kegiatan pengoperasian, dan penjualan jaringan dan/atau jasa yang diselenggarakan Perseroan, pemeliharaan, penelitian, pengembangan dan/atau fasilitas telekomunikasi.

Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tidak terbatas import atas barang-barang, perangkat dan/atau produk-produk tersebut, termasuk namun tidak pada handset dan terminal telekomunikasi.

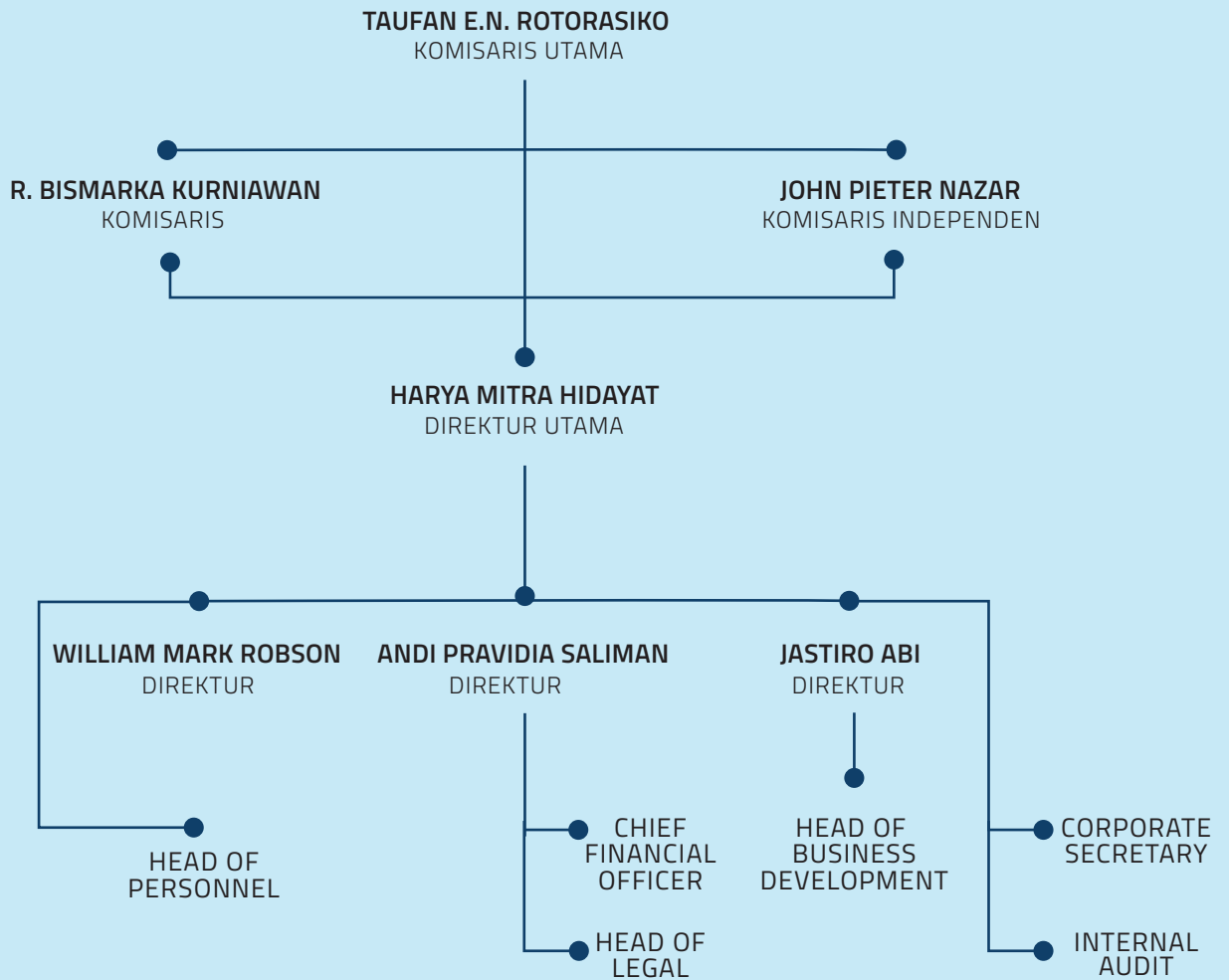


# STRUKTUR PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK





# STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN





BAKRIE TELECOM

# DEWAN KOMISARIS



**R. BISMARKA KURNIAWAN**  
KOMISARIS

**TAUFAN EKO NUGROHO ROTORASIKO**  
KOMISARIS UTAMA

**JOHN PIETER NAZAR**  
KOMISARIS INDEPENDEN

## PROFIL **DEWAN KOMISARIS**



### **TAUFAN EKO NUGROHO ROTORASIKO** KOMISARIS UTAMA

Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 2019. Menyelesaikan pendidikan di Strayer College Washington DC untuk meraih Bachelor of Science in Computer Information System pada tahun 1998 dan menyangang Master of Business Administration dari UCLA-NUS Executive MBA Program pada tahun 2009. Taufan E.N Rotorasiko memulai karir di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai Network Engineer dan Software Engineer di beberapa perusahaan IT di Amerika Serikat diantaranya Nth Information System, Bell Atlantic, dan Verizon. Beliau bergabung di Grup Bakrie sejak tahun 2002 sebagai Group Information System Administration Manager di PT Bakrie & Brothers sampai tahun 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Multi Kontrol Nusantara dan Komisaris PT Bakrie Indo Infrastructure.

## **R. BISMARCA KURNIAWAN**

### KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. R. Bismarka Kurniawan menjabat Komisaris Perseroan sejak 2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan 2016-2019. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Visi Media Asia Tbk sejak 2011. Di samping itu beliau juga dipercaya untuk menjabat beberapa posisi antara lain Komisaris Utama PT Digital Media Capital sejak 2015, Komisaris PT Bakrie Global Ventura, Komisaris PT Intermedia Capital Tbk. sejak 2012, Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi, Direktur PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal, Direktur Capital Managers Asia Pte. Ltd. dan Direktur Great Asian Holding Pte. Ltd. sejak 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science in Civil Engineering (Construction) dari the University of Southern California, USA in 1993, gelar Master of Engineering in Structural Engineering minoring in Business Administration dari Cornell University, USA pada tahun 1994, dan Master of Business Administration in Finance, Investment and Banking dari the University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, USA di tahun 1995.

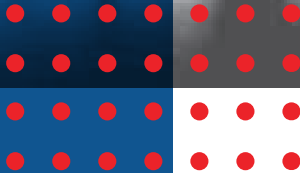




## **JOHN PIETER NAZAR**

### KOMISARIS INDEPENDEN

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. John Pieter Nazar menjabat Komisaris Independen sejak tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta dalam program studi Hukum Ekonomi pada tahun 1981 dan di tahun 1999 menyanggah master hukum dari Institute Business Law and Management-Jakarta. Beliau berprofesi sebagai advokat dengan segudang pengalaman baik litigasi maupun non-litigasi dan saat ini memimpin kantor hukum John Pieter Nazar & Partners. Sebelumnya beliau bergabung dengan beberapa firma hukum ternama di antaranya Harjono Tjitrosoebono Law Office, Law Firm Mahfud MD & Associates dan Maqdir Pieter Ishak Law Firm. Bapak John Pieter pernah memimpin organisasi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jakarta Pusat. Saat ini John Pieter Nazar juga menjabat sebagai Ketua Umum Mediator Nasional Indonesia (MNI), Ketua Dewan Kehormatan PERADI RBA (Persatuan Advokat Indonesia), Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Penegak Hukum Dan Lembaga Tinggi Negara Kadin Indonesia, dan Pendiri dan Kepala Lembaga (Lembaga Mediasi Bisnis) Kadin Indonesia.





BAKRIE TELECOM

# DIREKSI



**JASTIRO ABI**  
DIREKTUR

**ANDI PRAVIDIA S.**  
DIREKTUR

**HARYA MITRA HIDAYAT**  
DIREKTUR UTAMA

**W. MARK ROBSON**  
DIREKTUR

## PROFIL **DIREKSI**



### **HARYA MITRA HIDAYAT**

DIREKTUR UTAMA

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai direktur sejak tahun 2015. Sebelumnya di PT Bakrie Telecom Tbk. menjabat sebagai Executive Vice President 2006-2007. Jabatan lain sebelumnya adalah Direktur Utama PT Bakrie Toll Road dari 2007-2012, VP Corporate Finance di PT Bumi Resources Tbk. 2004-2007, VP Corporate Finance di Asia Capital Manager selama 2002-2004. Tahun 2001-2002 menjabat Associate Director di AAJ Associates. Tahun 1998 menjabat sebagai Management Trainee di Worldcom, Associates di Merrill Lynch, Singapura tahun 1999-2001. Memperoleh gelar MBA dari University of Baltimore, Maryland 1999, dan B.S. Business Administration di Denver University, Colorado 1996.

## **JASTIRO ABI**

DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Jastiro Abi menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan periode 2013 -2016 dan Wakil Direktur Utama Perseroan kurun waktu 2016-2019 dan Direktur Keuangan Perseroan dari tahun 2007 -2011. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Bakrie Swasakti Utama dan berbagai posisi manajerial pada divisi Corporate Banking, Credit Recovery Unit, Trade Finance di HSBC pada tahun 1998 sampai 2002 dan PT Astra International Tbk. pada tahun 1997 sampai 1998. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Pengawas di Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI). Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Diponegoro pada tahun 1995, M.Eng.Sc. dari Queensland University of Technology Australia pada tahun 1997, M.B.A. dari University of Western Australia pada tahun 2005, dan meraih gelar Doktor dari BINUS University pada tahun 2017.





## **ANDI PRAVIDIA SALIMAN**

DIREKTUR

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2016. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Lativi Mediakarya (tvOne). Selepas menuntaskan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, STEI/AAI, Jakarta pada tahun 1996, Andi Pravidia mulai berkarir sebagai auditor di beberapa Kantor Akuntan di Jakarta. Selanjutnya antara tahun 1998 sampai 2002, beliau berkarya di PT. Putra Sumber Utama Timber, Paper & Forest Product Industry dan di PT Dinar Securities. Pengalamannya sebagai auditor dan kompetensi di bidang keuangan dan accounting membawa Andi Pravidia bergabung dengan Group Bakrie pada tahun 2002 sampai dengan saat ini dengan beberapa posisi terakhir antara lain Vice President PT Bakrie Global Ventura, Presiden Direktur PT Fajar Bumi Sakti.

## W. MARK ROBSON

DIREKTUR

Warga Negara Inggris, 52 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak 2016. Menempuh pendidikan di Sheridan College, Institute for Technology, Toronto, Canada dengan bidang studi Architectural Engineering dan di George Brown College, Toronto, Canada dengan disiplin ilmu Fiber Optics Engineering and Installation Electrical Engineering. Mark Robson mengawali karirnya sebagai CATV, SMATV and CADD Designer pada tahun 1988 di Cen-Comm Communications, Toronto, Canada. Karir dan kompetensi beliau kian terasah sebagai Technical Advisor di Fortress Satellite Hong Kong LTD, Hong Kong dan Rogers Cable TV & Telecom, Toronto, Canada. Pengalaman di sektor TV engineering membawa beliau selanjutnya untuk berkarya di Indonesia pada tahun 1997, bergabung dengan Group Lippo dalam beberapa unit usaha diantaranya Kabel Vision dan First Media. Mark juga berkontribusi dalam pengembangan Sitra dan Wimax-Bolt dengan posisi terakhir sebagai Vice President of System Network Implementation & Engineering sampai tahun 2012. Dengan pengalaman dan keahlian engineering tersebut Mark bergabung sebagai Technical Advisor pada tahun 2012 sampai dengan pertengahan 2015 dengan Pay TV Company yang menggelar layanan TV kabel berbayar.



## SUMBER DAYA MANUSIA



Untuk mewujudkan visi, misi dan target transformasi Perseroan terutama atas inisiatif dan kegiatan usaha yang berfokus pada layanan telekomunikasi dan teknologi informasi dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, berkompeten, dan selalu berkemauan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Di samping itu, efisiensi jumlah sumber daya manusia berikut pemetaan tugas dan tanggung jawab berbasis keahlian merupakan salah satu prasyarat utama bagi Perseroan dalam proses transformasi usaha ini. Pada tahun 2019 seiring dengan pertumbuhan usaha Perseroan, jumlah karyawan dalam grup Perseroan adalah 67 orang dengan demografi sebagai berikut:

### PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	2019	2018
S3	2%	-
S2	7%	9%
S1	73%	70%
Diploma	11%	17%
SMA/ Sederajat	7%	4%

### PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN USIA

TAHUN	2019	2018
25-35	16%	8%
36-45	52%	56%
>45	32%	36%

# KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

## Daftar Pemegang Saham

DAFTAR PEMEGANG SAHAM per 31 Desember 2019	SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH (LEMBAR)	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
PT Huawei Tech Investment	6.189.313.980	16,83
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	13,60
PT Era Bhakti Persada	2.012.019.117	5,47
Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch S/A Best Quality Global Limited	2.213.279.000	6,02
PT Bakrie & Brothers Tbk.	43.043.142	0,12
Masyarakat	21.315.810.396	57,96
<b>TOTAL</b>	<b>36.773.904.635</b>	<b>100,00</b>

## Daftar Pemegang Saham Khusus:

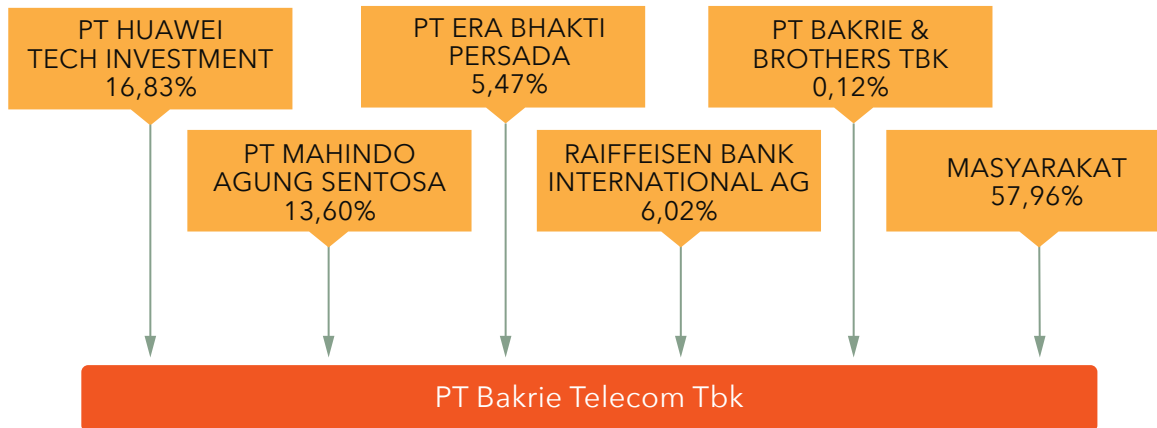
Di tahun 2019 dan saat ini tidak ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

## Komposisi Kepemilikan Institusi dan Individu per 31 Desember 2019:

PEMEGANG SAHAM	SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH (LEMBAR)	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
Institusi Lokal	21.534.399.005	58,56
Institusi Asing	8.757.312.599	23,81
Individu Lokal	6.429.661.387	17,48
Individu Asing	52.531.644	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>36.773.904.635</b>	<b>100,00</b>

## PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Bakrie.



## ANAK PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN	% KEPEMILIKAN	BIDANG USAHA	MULAI BEROPERASI	DOMISILI
PT. Bakrie Connectivity	99,8%	Perdagangan Telekomunikasi	2010	Indonesia
PT. Bakrie Digital Net (dahulu PT. Bakrie Network)	99,8%	Infrastruktur Telekomunikasi	Belum Operasional	Indonesia
Bakrie Telecom Pte. Ltd	100%	Entitas Bertujuan Khusus	2010	Singapura
PT. Anugrah Andalan Investama	99,8%	Perdagangan dan Jasa	2016	Indonesia
PT. Mitra Kreasi Komunika (dimiliki oleh AAI)	99,8%	Perdagangan dan Jasa	2016	Indonesia
PT Layanan Prima Digital (dimiliki oleh MKK)	99,9%	Teknologi Informasi dan Multimedia	2014	Indonesia
PT Inovasi Teknologi Nusantara (dimiliki oleh MKK)	99,9%	Jasa Teknologi dan Jasa Sipil	2015	Indonesia

## PENCATATAN SAHAM

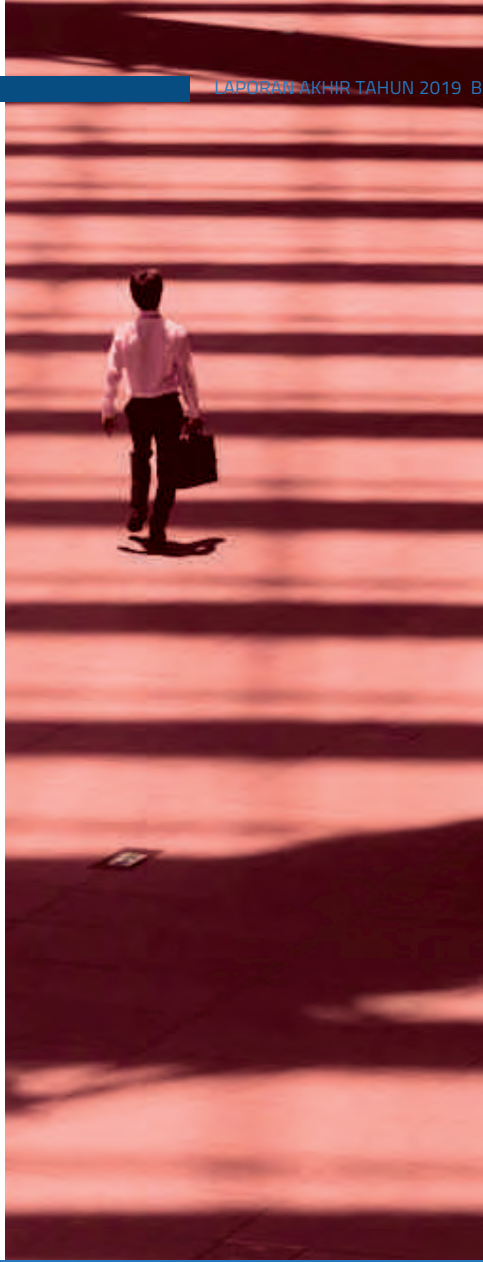
JENIS PENCATATAN	TANGGAL PENCATATAN	JUMLAH SAHAM BEREDAR (LEMBAR)
Penawaran Umum Perdana	3 FEBRUARI 2006	5.500.000.000
Pencatatan Saham	3 FEBRUARI 2006	18.779.415.495
Penerbitan Saham Dengan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu	29 FEBRUARI 2008	28.482.417.579
Penerbitan Saham Tanpa Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu	22 JUNI 2012 dan 29 AGUSTUS 2012	30.584.590.655
Penerbitan Saham Tanpa Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (Konversi Obligasi Wajib Konversi)	1 MARET 2017	36.773.904.635

## PENCATATAN OBLIGASI

NAMA OBLIGASI	JUMLAH NOMINAL	TINGKAT SUKU BUNGA	JATUH TEMPO	PERINGKAT
Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007	Rp. 650.000.000.000	11,9% P.A.	4 September 2012 (Lunas)	Id A-
Wesel Senior (Diterbitkan Oleh Bakrie Telecom Pte. Ltd.)	USD 380.000.000	11,5% P.A.	7 Mei 2015	-

## PROFESI PENUNJANG

PROFESI PENUNJANG	ALAMAT	TIPE JASA	No STTD
PT Ficomindo Buana Registrar	Mayapada Tower Lantai 10, Suite 02B Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920	Biro Administrasi Efek	09.03.1.66.53633
KAP Krisnawan, Nugroho & Fahmy	Pesanggrahan Office R 102 Jl. Lebak Bulus III No. 50 Jakarta 12440, Indonesia	Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasi	Kep-367/KM.1/2017
Leolin Jayayanti, SH, M.Kn	Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta, 12170	Notaris Publik	N-44/PM.22/2018



# ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN



Pembahasan dan analisis kinerja keuangan BTEL berikut ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan serta informasi tertentu mengenai data keuangan dan operasi yang terkonsolidasikan.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk beberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013, serta peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM-LK).

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tahun 2018 telah diaudit oleh KAP Krisnawan, Nugroho, dan Fahmy. Auditor untuk tahun 2019 maupun tahun 2018 tidak memberikan opini atas laporan konsolidasi Perseroan, dengan pertimbangan seperti yang dijelaskan pada laporan audit yang terlampir dalam laporan tahunan ini.

## ANALISIS HASIL OPERASIONAL

Sejak tahun 2018 dan berlanjut di tahun 2019, Perseroan termasuk anak perusahaan melayani pelanggan korporasi terutama dengan layanan solusi komunikasi, contact center, data connectivity, jasa teknik dan IT.

Kegiatan usaha Perseroan terutama dilakukan oleh PT. Layanan Prima Digital (LPD) dan PT. Inovasi Teknologi Nusantara (ITN).

Ruang lingkup kegiatan LPD meliputi penyediaan jasa internet dan multimedia, jasa televisi berbayar, jasa telekomunikasi, jasa publikasi dan penyiaran, jasa e-commerce dan jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa-jasa terkait lainnya.

Ruang lingkup kegiatan ITN utamanya adalah dalam bidang jasa teknologi informasi dan jasa sipil yang meliputi pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi dan multimedia, jasa perbaikan dan pemeliharaan alat-alat komunikasi dan multimedia dan jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi.

## PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha Perseroan di tahun 2019 berbanding tahun 2018 meningkat 20,9% yang disokong dari hasil pendapatan entitas anak dapat digambarkan sebagai berikut:

DESKRIPSI	2019	%	2018	%	PERUBAHAN
Pendapatan Usaha Kotor	10,3	100	8,5	100,0	20,9%
Pendapatan Jasa Telekomunikasi	7,3	71,1	8,0	94,4	-9,0%
Pendapatan lain-lain	3,0	28,9	0,5	5,9	494,7%
Beban Pokok Pendapatan	(6,3)	(60,8)	(4,7)	(56,9)	-32,4%
Pendapatan Usaha Bersih	4,0	39,2	3,8	44,8	5,7%

Pada tahun 2019, PT Layanan Prima Digital menyumbang porsi pendapatan kotor Perseroan sebesar Rp 7,9 miliar yang dihasilkan dari operasional bisnis telekomunikasi, contact center, dan data connectivity. Sedangkan PT Inovasi Teknologi Nusantara berkontribusi pada pendapatan kotor Perseroan sebesar Rp 2,4 miliar terdiri dari pendapatan jasa teknologi informasi dan jasa sipil. Atas kontribusi pendapatan dari kedua entitas anak tersebut secara konsolidasian Perseroan mencatat peningkatan pendapatan kotor sebesar 20,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

## BEBAN USAHA

Secara umum di tahun 2019 Perseroan berhasil untuk menekan beban usaha sampai 33,1% dengan uraian pos beban usaha sebagai berikut:

DESKRIPSI	2019	%	2018	%	PERUBAHAN
Total Beban Usaha	27,3	100	40,8	100,0	-33,1%
Penyusutan	0,3	1,3	1,8	4,4	-80,8%
Operasi dan Pemeliharaan	3,4	12,5	1,2	2,9	177,9%
Administrasi dan Umum	14,6	53,4	29,2	71,6	-50,1%
Karyawan	8,6	31,6	8,3	20,3	4,1%
Penjualan dan Pemasaran	0,3	1,3	0,4	1,0	-11,2%

**ADITYA IRAWAN**  
Chief Financial Officer



Di tahun 2018 Perseroan mencatatkan total beban usaha sebesar Rp 40,8 miliar yang didominasi oleh pos beban administrasi dan umum. Keberhasilan Perseroan untuk menekan total beban usaha menjadi sebesar Rp 27,3 miliar di tahun 2019 disebabkan penurunan variabel beban sebagai berikut:

- Beban penyusutan menurun 80,8% sebagai akibat telah habisnya nilai buku aset tetap peralatan CDMA sejak tahun 2017.
- Beban operasi dan pemeliharaan naik menjadi Rp3,4 miliar disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional.
- Beban administrasi dan umum turun menjadi Rp14,6 miliar atau sekitar 53,4%, terutama disebabkan oleh penurunan beban jasa profesional.
- Beban karyawan naik sebesar 4,1%, dari Rp. 8,3 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 8,6 miliar di tahun 2019.
- Beban penjualan dan pemasaran tahun 2019 sebesar Rp345 juta (turun 11,2% dari tahun 2018), yang merupakan biaya promosi.

## BEBAN PENYUSUTAN

Beban penyusutan terdiri dari beban penyusutan atas peralatan jaringan dan aset tetap lainnya, termasuk beban instalasi dan beban konstruksi.

## BEBAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Beban operasi dan pemeliharaan di tahun 2019 sebesar Rp 3,4 miliar, meningkat 178% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 1,2 miliar. Beban ini terutama merupakan biaya listrik, pembayaran sewa dan beban operasional lainnya. Pada tahun 2019 persentase beban operasi dan pemeliharaan terhadap pendapatan adalah 33,3% berbanding 14,4% di tahun 2018.

## BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi Perseroan mendominasi porsi beban usaha Perseroan di tahun 2019 walaupun beban umum dan administrasi tersebut mengalami penurunan sebesar 50,1% dari tahun 2018 yang sebesar Rp 29,2 miliar. Uraian pos beban umum dan administrasi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	%	2018	%	PERUBAHAN
Total Beban Umum dan Administrasi	14,6	141,8	29,2	343,8	-50,1%
Jasa Profesional	8,0	77,9	18,6	219,2	-57,0%
Perijinan, lisensi dan bea masuk	5,4	52,1	3,6	42,2	49,2%
Sewa	0,1	0,9	2,9	34,0	-96,7%
Rugi Penurunan Nilai Piutang	0,0	0,0	1,4	16,4	-99,7%
Lain - lain (masing-masing di bawah Rp 500 juta)	1,1	10,8	2,7	32,0	-59,4%



**EKONOMI AKAN SELALU  
BERTUMBUH DAN  
MENCIPTAKAN BANYAK  
PELUANG.**

## BEBAN KARYAWAN

Variabel beban karyawan terdiri dari biaya gaji dan upah, transportasi dan biaya karyawan lainnya yang berkaitan dengan manfaat dan pelatihan. Di tahun 2019 beban karyawan terbilang cukup stabil dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu mengalami sedikit kenaikan sebesar 5.2% dengan uraian pos beban sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	%	2018	%	PERUBAHAN
Total Beban Karyawan	8,6	83,9	8,2	96,1	5,2%
Gaji dan Upah	8,3	81,2	7,6	89,4	9,5%
Transportasi dan Tunjangan	0,3	2,7	0,6	6,7	-51,8%

## LABA DAN MARGIN USAHA

Walaupun Perseroan masih membukukan EBITDA negatif Rp 22,9 miliar di tahun 2019 namun catatan tersebut menunjukkan perbaikan sebesar 34.9% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat negatif Rp 35,2 miliar. Perbaikan EBITDA tersebut disebabkan karena upaya Perseroan untuk menekan beban usaha dan mencari sumber-sumber pendapatan baru.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	2018	PERUBAHAN
EBITDA	(22,9)	(35,2)	-34,9%
Margin EBITDA	-223,2%	-434,6%	-
Laba (Rugi) Usaha	(23,3)	(37,1)	-37,3%

## PENDAPATAN (BEBAN) *NETO* LAIN-LAIN

Pada tahun 2019, Perseroan mencatat laba selisih kurs akibat pergerakan nilai tukar dari Rp 14.481/USD per 31 Desember 2018 turun menjadi Rp 13.901/USD per 31 Desember 2019.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	%	2018	%	PERUBAHAN
Penghasilan (Beban) Lain-lain	30,6	298,0	(690,9)	8.103,8	-104,4%
Beban Keuangan	(0,0)	(0,1)	(605,7)	7.104,7	-100,0%
Laba (Rugi) Selisih Kurs	195,8	1.905,8	(84,0)	985,3	-333,1%
Lain-lain Bersih	(165,2)	(1.608,1)	(1,2)	13,8	13.880,3%

## LABA (RUGI) BERSIH

Pada tahun 2019, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 7,3 miliar.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	2018	PERUBAHAN
Laba (Rugi) Bersih	7,3	(720,6)	-101,0%
Manfaat (Beban) Pajak	(0,1)	7,4	-100,9%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	7,3	(728,0)	-101,0%

## LIKUIDITAS DAN EKUITAS

Dana likuiditas Perseroan sepanjang tahun 2019 masih bersumber pada aktivitas operasional Perseroan. Dana tersebut dibelanjakan oleh Perseroan utamanya untuk operasi pemeliharaan peralatan dan jaringan yang dipergunakan untuk penyediaan layanan telekomunikasi oleh LPD. Pada akhir tahun 2019 tercatat Perseroan mengalami defisiensi modal sebesar Rp 15,2 triliun yang diakibatkan oleh kerugian operasional dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan masih melebihi Total Aset Lancar dalam hal ini Rp 9,8 triliun berbanding Rp 4,0 miliar. Sehubungan dengan hal ini, manajemen Perseroan telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mematuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui oleh para Kreditor dan dihomologasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Mengembangkan bisnis yang ada saat ini yaitu di bidang layanan telekomunikasi untuk pelanggan korporat, contact center, layanan teknologi informasi dan jasa sipil.
- Perseroan terus mencari peluang pengembangan bisnis baru dan melakukan persiapan yang diperlukan sekaligus dengan memperhatikan peraturan terkait.
- Pada tahun 2017, perusahaan mulai melakukan pembayaran atas utang-utang perusahaan melalui konversi Obligasi Wajib Konversi-A (OWK-A) menjadi saham Perseroan, sebagai salah satu pelaksanaan penyelesaian utang melalui PKPU.
- Perseroan terus menerapkan kebijakan pengendalian biaya dalam operasinya.

## ARUS KAS

Arus Kas Perseroan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dapat diringkas sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	2018	PERUBAHAN
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	0,61	0,03	1.933,0%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(0,05)	(0,07)	-22,9%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	-
Arus Kas Bersih	0,56	(0,04)	-1.489,8%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	0,56	(0,04)	-1.489,8%
Kas dan Setara Kas, Awal Tahun	0,31	0,35	-11,4%
Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun	0,87	0,31	179,3%

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Selama tahun 2019, kas bersih dari aktivitas operasi adalah Rp 610 juta, yang merupakan selisih dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp8,9 miliar, diikuti dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 17,8 miliar, pembayaran untuk karyawan Rp 8,3 miliar, dan penerimaan lainnya sebesar Rp 17,8 miliar.

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Selama tahun 2019, kas bersih yang dikeluarkan Perseroan untuk aktivitas investasi adalah Rp 54 juta untuk pembelian aset tetap.

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Selama tahun 2019, tidak ada kas bersih yang diterima Perseroan dari aktivitas pendanaan.

## POSISI KEUANGAN

### ASET LANCAR

Aset lancar Perseroan di tahun 2019 meningkat sebesar 42,9% dari Rp 2,9 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 4,2 miliar. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan piutang usaha.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	2018	PERUBAHAN
Total Aset Lancar	4,2	2,9	42,9%
Kas dan Setara Kas	0,9	0,3	179,2%
Aset Lancar Lainnya	3,3	2,6	26,7%

## ASET TIDAK LANCAR

Pada bulan Oktober 2019, Perseroan melakukan pembayaran kewajiban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi melalui pencairan jaminan pembayaran BHP frekuensi (Surety Bond).

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	2018	PERUBAHAN
Aset Tidak Lancar	11,5	710,6	-98,4%
Aset Tetap - Neto	0,4	0,7	459,5%
Aset Tidak Lancar Lainnya	11,1	8,9	24,7%
Jaminan	-	700,1	-100,0%

## LIABILITAS

Jumlah Liabilitas Perseroan mencapai Rp 15,3 triliun pada 31 Desember 2019. Liabilitas Jangka Pendek menurun 2,6% menjadi Rp 9,8 triliun pada tahun 2019. Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 424,0 miliar merupakan saldo di luar utang usaha yang diselesaikan melalui PKPU.

Pada tahun 2019, utang sebesar Rp 5,4 triliun dicatat sebagai Liabilitas Jangka Panjang dalam akun utang yang diselesaikan melalui PKPU yang terdiri atas:

- Utang usaha sebesar Rp 1,3 triliun.
- Utang kepada penyedia menara sebesar Rp 3,0 triliun.
- Utang atas biaya hak penggunaan frekuensi dan Universal Service Obligation (USO) & Jastel sebesar Rp 326,7 miliar.
- Utang dengan jaminan yang difasilitasi oleh Madison Pacific Trust Limited, sebesar Rp 716,0 miliar.
- Utang terminasi lindung nilai sebesar Rp 197,0 miliar akibat derivatif yang digunakan untuk lindung nilai fluktuasi nilai tukar.
- Utang dari afiliasi Perseroan sejumlah Rp 74,2 miliar.

(dalam miliar Rupiah)

DESKRIPSI	2019	2018	PERUBAHAN
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	9.827,9	10.096,6	-2,7%
Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo	5.282,4	5.502,8	-4,0%
Dalam Waktu Satu Tahun - Wesel Senior			
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	4.545,5	4.593,7	-1,0%
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Pajak Tangguhan	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	0,6	0,2	191,2%
Utang yang Diselesaikan Melalui PKPU	5.431,6	6.036,1	-10,0%

## OBLIGASI GLOBAL / WESEL SENIOR

Untuk keterangan lebih lengkap mengenai Wesel Senior dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit halaman 48 catatan 13.

## PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Melalui proses PKPU, Perseroan dan Kreditur mencapai kesepakatan restrukturisasi utang pada tanggal 8 Desember 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (lihat catatan 34 atas Laporan Keuangan konsolidasian).

## RASIO UTANG

DESKRIPSI	2019	2018
Rasio Hutang terhadap Asset	973,3	22,6
Rasio Hutang terhadap Ekuitas	-1,0	-1,0

## TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

DESKRIPSI	2019	2018
Jumlah Hari Piutang	83,8	40,8

## STRUKTUR PERMODALAN

Struktur Permodalan Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

DESKRIPSI	2019	2018
Hutang	10.714,0	11.538,9
Jangka Pendek	5.282,4	5.502,8
Jangka Panjang	5.431,6	6.036,1
Modal	(15.244,0)	(15.419,2)

Perseroan berada pada posisi defisiensi modal sebesar Rp 15,2 triliun per 31 Desember 2019. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kerugian operasional tahun-tahun sebelumnya.

## INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2019, Perseroan tidak melakukan perikatan material untuk investasi barang modal dan belum merealisasikan investasi barang modal baru. Hal ini karena bisnis yang dilakukan Perseroan belum sampai pada tahap untuk pengadaan barang modal.

## PROSPEK USAHA

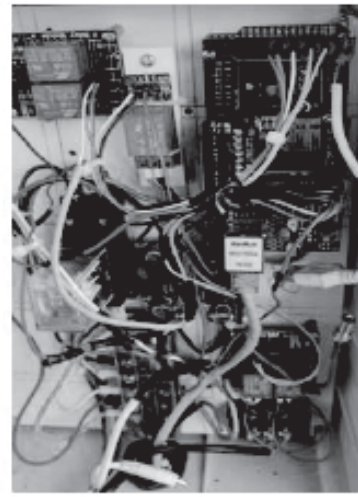
Untuk pengembangan usaha Perseroan, terdapat beberapa potensi berdasarkan analisa industri sebagai berikut:

- **Potensi perkembangan gedung:** Berdasarkan laporan Colliers International, saat ini diperkirakan tersedia lebih dari 9 juta meter persegi area perkantoran yang akan tumbuh 20% hingga tahun 2024, yang mana akan meningkatkan kebutuhan jasa telekomunikasi perkantoran yang dapat disediakan oleh LPD.
- **Potensi E-Commerce:** Menurut riset Statista, penetrasi pengguna untuk E-Commerce di Indonesia diekspektasikan mencapai 73.3% di tahun 2024 (naik dari 50.5% di tahun 2020), dengan tingkat pertumbuhan tahunan 15.4%. Hal ini juga menjadikan peluang usaha bagi LPD untuk mengembangkan layanan call center yang dibutuhkan oleh industri E-Commerce.
- **Potensi penetrasi internet:** Hingga saat ini, total pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 185 Juta dan memiliki potensi untuk mencapai 256 Juta pengguna di tahun 2025 (Statista). Dengan demikian diperkirakan kebutuhan akan jasa IT akan terus meningkat. ITN dapat mengembangkan layanan terkait teknologi informasi, termasuk managed service, jasa instalasi dan perawatan.

## STRATEGI PEMASARAN

Dalam melakukan pemasaran atas produknya, strategi Perseroan adalah dengan menargetkan pangsa pasar perkantoran dan hunian yang berlokasi di gedung-gedung tinggi. Perseroan juga memfokuskan pada pelanggan yang produktif yang menghasilkan pendapatan per pelanggan yang tinggi.





## KEBIJAKAN **DEVIDEN**

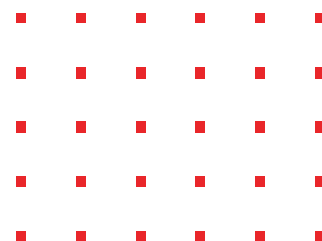
Selama 2 tahun buku terakhir, Perseroan tidak membagikan deviden oleh karena Perseroan mencatatkan rugi komprehensif pada periode 2 tahun buku terakhir tersebut.

## REALISASI PENGGUNAAN DANA **HASIL PENAWARAN UMUM**

Perseroan melakukan Penawaran Umum terakhir kali adalah pada tahun 2008 untuk Penawaran Umum Terbatas I tahun 2008, dimana tujuan penggunaan telah selesai dilaporkan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian sejak akhir pelaporan tersebut hingga saat ini Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membuat dan menyampaikan pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ataupun perubahannya.

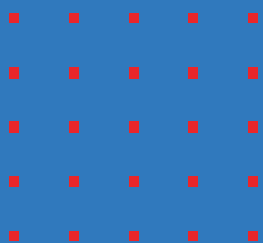
## INFORMASI **MATERIAL**

Pada tahun 2019 PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK), entitas anak dari PT. Anugerah Andalan Investama (AAI), entitas anak Perseroan mengambil alih 99,9% saham PT. Konvergensi Digital International pada PT. Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) berdasarkan akte pernyataan keputusan rapat nomor 48, tanggal 30 November 2019 yang kemudian ditegaskan Kembali melalui akte pernyataan keputusan rapat nomor 58, tanggal 27 Desember 2019 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina S, SH, M.Kn notaris di Tangerang.





# LAPORAN BERKELANJUTAN



# TATA KELOLA PERUSAHAAN



## DIREKSI

Perseroan dipimpin dan dikelola oleh Direksi yang merupakan komponen utama manajemen dimana ketentuan tentang pengangkatan Direksi BTEL tercantum dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi BTEL diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai tujuannya.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:
  - Meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
  - Memperoleh dengan membeli atau dengan cara lain (kecuali hibah), barang tidak bergerak dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
  - Menjual atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
  - Mendirikan suatu usaha baru dan/ atau turut serta dalam perusahaan lain tanpa mengurangi setiap persetujuan yang mungkin diperlukan dari instansi yang berwenang, satu dan lain tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan bursa efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
  - Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist)  
Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur manajemen Perseroan
- d. Direktur Utama dan satu anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan



Remunerasi yang diterima oleh Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang memperoleh pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan memperhatikan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Direksi telah memiliki dan menyatakan komitmennya terhadap Piagam Direksi (Board of Directors Charter) sebagai pedoman etik dan perilaku sebagai anggota direksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengurusan Perusahaan.

Keanggotaan dan periode jabatan Direksi Perseroan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN TERAKHIR	PERIODE JABATAN
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama	RUPS Tahunan 20 Juni 2019	2019 - 2021
Jastiro Abi	Direktur	RUPS Tahunan 20 Juni 2019	2019 - 2021
Andi Pravidia Saliman	Direktur	RUPS Tahunan 26 Juni 2018	2018 - 2021
W. Mark Robson	Direktur	RUPS Tahunan 26 Juni 2018	2018 - 2021

Bidang tugas dan tanggung jawab anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama	Koordinasi seluruh bidang kerja Direksi
Jastiro Abi	Direktur	Strategy & Business Development
Andi Pravidia Saliman	Direktur	Kuangan
W. Mark Robson	Direktur	Produk & Teknologi

TANGGAL	FOKUS AGENDA
16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan awal kinerja operasional dan keuangan di tahun 2018</li> <li>• Pembahasan rencana kerja untuk tahun 2019</li> <li>• Rencana perubahan struktur organisasi Perseroan</li> <li>• Rencana audit laporan keuangan tahun 2018</li> </ul>
7 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan rencana pengambilalihan perusahaan</li> <li>• Pembahasan permohonan Chapter 15 di Amerika Serikat.</li> </ul>
14 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan update audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018</li> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Januari dan Februari 2019</li> </ul>
11 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Update audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018</li> <li>• Pembahasan penyusunan Laporan Tahunan 2018</li> </ul>
20 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Maret dan April 2019</li> <li>• Rencana RUPS Tahunan</li> <li>• Persiapan libur Idul Fitri</li> </ul>
13 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan materi untuk rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>• Persiapan RUPS Tahunan</li> </ul>
17 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Mei 2019</li> <li>• Persiapan RUPS Tahunan</li> <li>• Pembahasan masukan dan nasihat dari Dewan Komisaris.</li> <li>• Persiapan Public Expose</li> </ul>
30 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan semester 1 tahun 2019</li> <li>• Pembahasan suspensi saham Perseroan oleh IDX</li> </ul>
19 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan</li> <li>• Pembahasan pengangkatan suspensi saham Perseroan</li> </ul>
17 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Juli dan Agustus 2019</li> </ul>
17 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Juli dan Agustus 2019</li> <li>• Pembahasan permohonan chapter 15 di Amerika Serikat</li> </ul>
21 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Oktober 2019</li> <li>• Pembahasan kewajiban dalam kesepakatan pengakhiran hubungan kerja dengan karyawan</li> </ul>
12 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan November 2019</li> <li>• Persiapan materi rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>• Rekomendasi penunjukan auditor untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.</li> </ul>
17 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan strategi bisnis dan rencana kerja tahun 2020</li> <li>• Pembahasan masukan dan nasihat dari Dewan Komisaris untuk rencana kerja 2019</li> </ul>

Tingkat kehadiran anggota Direksi Perseroan yang menjabat sampai 20 Juni 2019 dalam Rapat Direksi sepanjang tahun 2019:

NAMA	JABATAN	KEHADIRA	PROSENTAS
R. Bismarka Kurniawan	Direktur Utama	7/7	100%
Taufan E.N. Rotorasiko	Wakil Direktur Utama	7/7	100%
Jastiro Abi	Wakil Direktur Utama	6/7	86%
Harya Mitra Hidayat	Direktur	7/7	100%
Andi Pravidia Saliman	Direktur	7/7	100%
W. Mark Robson	Direktur	7/7	100%

Tingkat kehadiran anggota Direksi Perseroan yang menjabat sejak 20 Juni 2019 dalam Rapat Direksi sepanjang tahun 2019:

NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	PROSENTASE
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama	7/7	100%
Jastiro Abi	Direktur	7/7	100%
Andi Pravidia Saliman	Direktur	6/7	86%
W. Mark Robson	Direktur	5/7	71%

Komite-komite Perusahaan secara aktif memantau situasi Perusahaan dan memberikan masukan, saran, serta rekomendasi kepada direksi apabila diperlukan. Selain itu, forum diskusi dan konsultasi yang diadakan antara komite-komite dengan direksi juga merupakan sarana yang efektif bagi direksi untuk mendapatkan masukan, saran, serta rekomendasi dari komite-komite tersebut.



## DEWAN KOMISARIS

Atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan Perseroan, Direksi diawasi dan diberikan masukan serta nasihat dari Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai pengangkatan Dewan Komisaris tercantum dalam Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi menanggapi laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan, dan hal-hal penting lainnya
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran dengan segera memberikan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh
- Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan
- Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS



Dewan Komisaris telah memiliki dan menyatakan komitmennya terhadap Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) sebagai pedoman etik dan perilaku sebagai anggota dewan komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi Perusahaan.

Keanggotaan dan periode jabatan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN TERAKHIR	PERIODE JABATAN
Taufan E.N. Rotorasiko	Komisaris Utama	RUPS Tahunan 20 Juni 2019	2019 - 2021
R. Bismarka Kurniawan	Komisaris	RUPS Tahunan 20 Juni 2019	2019 - 2021
John Pieter Nazar	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 20 Juni 2019	2019 - 2021

Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak lima kali sepanjang tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	FOKUS AGENDA
22 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan evaluasi untuk Direksi atas kinerja operasional dan keuangan tahun 2019</li> </ul>
21 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan laporan keuangan dan Laporan Tahunan 2018</li> <li>Pembahasan masukan untuk RUPS Tahunan</li> </ul>
17 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan rencana untuk RUPS Tahunan</li> <li>Pembahasan update kinerja Perseroan</li> </ul>
10 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan kinerja operasional dan keuangan semester I tahun 2019</li> </ul>
17 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Update kinerja operasional dan keuangan secara umum tahun 2019</li> <li>Masukan kepada Direksi untuk Rencana kerja operasi tahun 2020.</li> </ul>

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai tanggal 20 Juni 2019 dalam Rapat Komisaris sepanjang tahun 2019:

NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	PROSENTASE
Anindya Novyan Bakrie	Komisaris Utama	3/3	100%
Bobby Gafur Umar	Komisaris	3/3	100%
Ai Mulyadi Mamoer	Komisaris Independen	1/3	33,3%

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sejak tanggal 20 Juni 2019 dalam Rapat Komisaris sepanjang tahun 2019:

NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	PROSENTASE
Taufan E.N. Rotorasiko	Komisaris Utama	2/2	100%
R. Bismarka Kurniawan	Komisaris	2/2	100%
John Pieter Nazar	Komisaris Independen	2/2	100%

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak mengeluarkan atau memberikan gaji atau remunerasi lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali kepada para Komisaris Independen yang mendapatkan remunerasi dari Perseroan sebesar Rp. 337 juta untuk tahun 2019. Dalam beberapa tahun terakhir dan sampai dengan saat ini, Pemegang Saham pengendali Perseroan telah menanggung dan membayarkan gaji atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, selain Komisaris Independen, sebagai komitmen dan kontribusi Pemegang Saham pengendali untuk tetap mengedepankan peningkatan kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Selama 2019 Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat bersama sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	FOKUS AGENDA
22 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update umum kinerja operasional dan keuangan tahun 2018</li> <li>• Pembahasan rencana kerja tahun 2019</li> </ul>
21 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 2018.</li> </ul>
17 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan kinerja operasional dan keuangan sampai bulan Mei 2019</li> <li>• Persiapan RUPS Tahunan</li> <li>• Pembahasan laporan keuangan dan Laporan Tahunan 2018.</li> <li>• Pembahasan public expose</li> </ul>
10 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan semester I tahun 2019</li> </ul>
17 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan secara umum tahun 2019</li> <li>• Rencana kerja operasi tahun 2020.</li> </ul>

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Bersama sepanjang tahun 2019

NAMA	JABATAN SAMPAI 20 JUNI 2019	JABATAN SEJAK 20 JUNI 2019	KEHADIRAN	PROSENTASE
Anindya Novyan Bakrie	Komisaris Utama	-	3/3	100%
Bobby Gafur Umar	Komisaris	-	3/3	100%
Ai Mulyadi Mamoer	Komisaris Independen	-	1/3	33.3%
Taufan E.N. Rotorasiko	Wakil Direktur Utama	Komisaris Utama	5/5	100%
R. Bismarka Kurniawan	Direktur Utama	Komisaris	5/5	100%
John Pieter Nazar	-	Komisaris Independen	2/2	100%
Harya Mitra Hidayat	Direktur	Direktur Utama	5/5	100%
Jastiro Abi	Wakil Direktur Utama	Direktur	5/5	100%
Andi Pravidia Saliman	Direktur	Direktur	5/5	100%
W. Mark Robson	Direktur	Direktur	4/5	80%

## KOMITE-KOMITE

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi atau memiliki fungsi tugas Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan komite-komite lainnya merupakan suatu wewenang yang dimiliki oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai ketentuan pasal 121 UU PT dan hal ini merupakan itikad baik dari perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

### 1. KOMITE AUDIT

#### a. Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit.

Komite Audit Perseroan pertama kali dibentuk dan pengangkatan anggota Komite Audit didasarkan pada peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana diubah melalui Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

#### b. Dalam menjalankan kegiatannya, Komite Audit memiliki kerangka tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

c. Susunan Komite Audit pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

• **JOHN PIETER NAZAR**

(CV dapat dilihat di profil Dewan Komisaris)

• **ARYDHIAN B. DJAMIN**

Selain sebagai anggota Komite Audit di Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT Intermedia Capital Tbk, PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, dan PT Dwi Guna Laksana Tbk. Beliau juga sebagai pengajar di Perbanas Institute sejak tahun 2008 sampai sekarang dan sebelumnya mengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Bina Nusantara. Pengalaman sebagai auditor yaitu di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto dengan posisi terakhir sebagai Junior Partner. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia, dan Magister Sains Akuntansi dari Universitas Indonesia.

• **DWI WINARNO**

Beliau sebelumnya bertugas di Perseroan sejak tahun 2005 dengan posisi terakhir sebagai VP Business Control.

d. Perseroan telah menyusun dan memiliki Piagam Komite Audit yang menjadi salah satu pedoman bagi Komite Audit dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komite Audit secara konsisten mendorong dan mengingatkan manajemen untuk menerapkan dan menjaga prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Pakta Integritas Komite Audit. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Pakta Integritas ini didukung dengan 7 karakteristik integritas BTEL yang menjadi landasan penerapan Good Corporate Governance yaitu sebagai berikut:

1. Jujur, yang bermakna bahwa terdapat keselarasan antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan; menghindari benturan kepentingan; menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas; dan mengakui kesalahan serta menyampaikan sesuatu sesuai fakta.
2. Tanggung Jawab, yang bermakna bahwa terdapat kemampuan untuk menerima amanat dan menjalankan tugas serta kewajiban yang diberikan; dan menuntaskan pekerjaan yang diberikan
3. Visioner, yang bermakna bahwa terdapat keyakinan dalam mewujudkan rencana dan cita-cita; dan ingin melakukan penyempurnaan dan menjadi yang terbaik.

4. Disiplin, yang bermakna bahwa konsistensi terhadap rencana yang telah dibuat dan menjalankan sesuai ketentuan; dan tidak berhenti berupaya hingga mencapai hasil yang diinginkan.
5. Kerja sama, yang bermakna bahwa terdapat optimalisasi potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, dan saling mendukung untuk menyelesaikan tugas bersama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang disepakati bersama;
6. Adil, yang bermakna bahwa terdapat pengambilan sikap dan keputusan secara proporsional, dan mengapresiasi serta menghukum sesuai dengan ketentuan.
7. Peduli, yang bermakna bahwa terdapat pemahaman atas kondisi pihak lain dan ikut merasakan kesulitan yang dihadapi; dan berinisiatif membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan.

e. Laporan Kegiatan Tahun 2019

Komite Audit mengadakan rapat sepanjang tahun 2019 sebanyak dua kali dengan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris dan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:

- i. Agar Direksi memperhatikan dan mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terkait penyampaian Laporan Keuangan akhir tahun, tengah tahun dan interim sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- ii. Agar Direksi mempertahankan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjaga integritas manajemen dan seluruh karyawan dari tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan dengan tujuan di luar kepentingan Perseroan.



## 2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

a. Dasar Hukum pengangkatan Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Bapepam/OJK No. IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko (Risk Management Policy) dan memberikan penilaian atas limit risiko (risk appetite and risk tolerance) yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan prasarana, sarana, sumber daya, dan kompetensi untuk penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Manajemen (ERM)).
3. Memastikan pelaksanaan program Manajemen Risiko Perusahaan (risks identification, risks assessment and risks treatment, risks monitoring) berlangsung sesuai dengan standar Manajemen Risiko yang diakui secara internasional.
4. Meminta dan mengumpulkan laporan secara berkala dari manajemen mengenai risiko-risiko usaha yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 

• Risiko Teknologi	• Risiko Persaingan Usaha
• Risiko Regulasi	• Risiko Keuangan
• Risiko Operasional	• Risiko Kemitraan
• Risiko Strategis	• Risiko Sosial
5. Melakukan diskusi, evaluasi, verifikasi, dan rekomendasi atas laporan-laporan Manajemen Risiko tersebut pada butir (4) dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
6. Bila diperlukan Komite Manajemen Risiko dapat berkomunikasi dengan Komite Audit terkait dengan hasil audit yang menyangkut aspek pengkajian risiko dan kepatuhan.
7. Bila diperlukan Komite Manajemen Risiko atas persetujuan Dewan Komisaris dapat mengundang pihak luar yang independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM).
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Wewenang Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh data/informasi dari Internal Auditor mengenai hasil audit internal yang terkait dengan risiko usaha
  2. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan pantauan risiko dan kepatuhan yang dilakukan Auditor Eksternal
  3. Memantau secara langsung efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko perusahaan dan berkomunikasi dengan penanggung jawab pelaksana Manajemen Risiko perusahaan
  4. Atas persetujuan Dewan Komisaris, dapat memperoleh fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:
    - Mendapatkan asistensi, nasehat, masukan dari tenaga ahli risiko
    - Mendapatkan informasi yang diperlukan dari seluruh karyawan mengenai risiko
    - Menemui semua pejabat perusahaan, Eksternal Auditor, dan Konsultan perusahaan bila diperlukan
  5. Atas persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, melaksanakan pemeriksaan khusus bila ditemukan adanya indikasi penanganan risiko usaha yang tidak benar yang dapat menimbulkan dampak besar bagi perusahaan
- d. Komite Manajemen Risiko terdiri dari dua orang yaitu satu ketua dan satu anggota. Seluruh keanggotaan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria independensi keahlian dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. Susunan Komite Manajemen Risiko pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Taufan E.N. Rotorasiko	Ketua
R. Bismarka Kurniawan	Anggota

- e. Laporan Kegiatan tahun 2019
- Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sepanjang tahun 2019 sebanyak dua kali dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Agar direksi selalu memperhatikan dan memutakhirkan risiko-risiko yang telah disusun dan diungkapkan sebelumnya dan masih relevan dengan kondisi saat ini serta memonitor langkah mitigasinya. Secara khusus Komite Manajemen Risiko meminta Direksi memperhatikan risiko hukum dan bisnis sehubungan dengan perkara hukum yang dihadapi Perseroan dan terkait dengan suspensi saham Perseroan oleh Bursa Efek Indonesia.
  - ii. Agar direksi kembali memastikan upaya-upaya untuk penyelesaian utang sesuai Perjanjian Perdamaian PKPU BTEL dan memperhatikan risiko hukum yang ada.

### 3. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

#### a. Dasar Hukum

Dasar hukum/legal pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Bapepam No. IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik
3. Peraturan OJK No, 34/PJOK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik

#### b. Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
    - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - d. Memberikan usulan mengenai calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.



2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- i. Struktur Remunerasi;
- ii. Kebijakan atas Remunerasi;
- iii. Besaran atas Remunerasi.

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**c. Susunan Keanggotaan dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.**

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2019 sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
John Pieter Nazar	Ketua
Budi Benzani ( <i>Chief Human Resources Officer</i> )	Anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan OJK Nomor 34/PJOK.04/2014 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

**d. Laporan Kegiatan Tahun 2019.**

Sepanjang tahun 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi BTEL melaksanakan kegiatan pertemuan sebanyak 1 (satu) kali yang dirangkaikan dengan kegiatan evaluasi kinerja serta melakukan pengkajian terhadap kemungkinan penyesuaian organisasi perusahaan.

## AUDITOR INDEPENDEN

BTEL menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Nugroho & Fahmy sebagai Auditor Independen yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian BTEL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kantor akuntan yang ditunjuk tidak menerima penugasan lain yang menyebabkan benturan kepentingan. Kantor akuntan ini juga tidak ada kaitan apapun ataupun hubungan istimewa dengan Perseroan. Biaya audit total untuk laporan keuangan tahunan 2019 BTEL adalah sebesar Rp 268 juta di luar PPN.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi Sekretaris Perusahaan telah dimiliki Perusahaan sejak tahun 2006 ketika Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan mencatatkan sahamnya di Bursa. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, tugas dan wewenang sekretaris perusahaan adalah sebagai berikut:



1. Mengikuti Perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan/atau dewan komisaris;
  - d. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan/atau dewan komisaris.
4. Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sekretaris perusahaan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya untuk menjalankan tugasnya.

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas untuk menjadi penghubung komunikasi dan informasi antara Perusahaan dan pemangku kepentingan di bidang pasar modal, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, pemegang saham, dan masyarakat. Selain itu Sekretaris Perusahaan melakukan korespondensi dengan institusi pasar modal baik yang merupakan

mandatori seperti laporan berkala dan penyampaian informasi penting, maupun yang bersifat administratif atau rutin. Sekretaris Perusahaan juga memastikan agar segala kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham, public expose, dan kegiatan wajib lainnya dapat diselenggarakan sebaik-baiknya dan mematuhi peraturan yang berlaku.



**AGUSTINUS HARIMURTI**  
Sekretaris Perusahaan

## PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi sekretaris Perusahaan saat ini dijabat sejak tahun 2015 oleh Agustinus Harimurti, Warga Negara Indonesia, 44 tahun dan berdomisili di Indonesia. Sebelum diangkat menjadi sekretaris Perusahaan beliau menjabat sebagai Executive Vice President di BTEL. Agustinus Harimurti memperoleh gelar sarjana di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999. Memulai karier sebagai advokat/pengacara di Kantor Hukum Yan Apul & Rekan dan kemudian bergabung dengan PT Bakrie Swasakti Utama sebagai Manager Legal pada tahun 2001 selain juga menempati posisi managerial di PT Austral Byna, dan selanjutnya bergabung dengan PT Bakrie Telecom Tbk pada tahun 2004.



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai organ tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh Perseroan dengan mengikuti dan memperhatikan prinsip kepatuhan yang terdapat pada peraturan yang berlaku, di antaranya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/POJK.04/2017 tahun 2017, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diselenggarakan oleh Perseroan sebagai perusahaan publik satu

kali dalam satu tahun. Sedangkan RUPS Luar Biasa diadakan oleh Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham atas hal-hal diluar agenda RUPS Tahunan. Penyelenggaraan RUPS merupakan bentuk pelaporan atau permintaan persetujuan kepada pemegang saham sebagai pemegang kepentingan investasi langsung atas Perseroan yang pengelolaannya dijalankan oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E, Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan paparan publik dan keterbukaan informasi kepada publik baik informasi atau laporan yang bersifat rutin atau berkala maupun yang insidental.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebagai berikut:

**Jenis RUPS:** RUPS Tahunan  
**Tanggal:** 20 Juni 2019

### Keputusan Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2018 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

### Keputusan Agenda Kedua

Menyetujui pemberian kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk"

### Keputusan Agenda Ketiga

Menyetujui:

- a. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
Komisaris	: Robertus Bismarka Kurniawan
Komisaris Independen	: John Pieter Nazar

Direksi	
Direktur Utama	: Harya Mitra Hidayat
Direktur	: Jastiro Abi
Direktur	: Andi Pravidia Saliman
Direktur	: W. Mark Robson

- b. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam masa jabatannya dengan mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris;
- c. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta Notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## PAPARAN PUBLIK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Perseroan telah melaksanakan paparan publik (public expose) baik insidentil maupun tahunan yang diikuti oleh beberapa kalangan diantaranya, analis, investor, pemegang saham, media massa dan lainnya.

**Tanggal:** 9 Juli 2019

**Public Expose:** Public Expose Insidentil

**Materi Paparan:**

Penjelasan Perseroan atas opini yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

**Tanggal:** 9 Juli 2019

**Public Expose:** Public Expose Insidentil

**Materi Paparan:**

Penjelasan kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan update operasional Perseroan sampai dengan semester I tahun 2019



## KORESPONDENSI DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BURSA EFEK INDONESIA

Selama tahun 2019, di samping pertemuan bersifat konsultatif dan diskusi, Perseroan telah melakukan komunikasi dan korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE OJK) yang terintegrasi dengan sistem pelaporan elektronik IDXNet yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia. Setiap pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan secara elektronik akan diterima dan terunduh dalam sistem pelaporan elektronik SPE OJK dan IDXNet. Kewajiban pelaporan melalui SPE OJK diatur berdasarkan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2018 tanggal 25 April 2018. Pelaporan Perseroan kepada OJK dan Bursa secara elektronik sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL
14 Mei 2019	0593/EST.06/Corsec/V/2019	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
15 Mei 2019	0594/EST.06/Corsec/V/2019	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
30 Mei 2019	0600/EST.06/CorSec/V/2019	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2019
31 Mei 2019	0602/EST.06/CorSec/V/2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penjelasan atas opini kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT. Bakrie Telecom Tbk yang berakhir 31 Des 2019
31 Mei 2019	0603/EST.06/CorSec/V/2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penjelasan atas opini kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT. Bakrie Telecom Tbk yang berakhir 31 Des 2019 (KOREKSI)
31 Mei 2019	0604/EST.06/CorSec/V/2019	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penjelasan atas opini kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT. Bakrie Telecom Tbk yang berakhir 31 Des 2019 (KOREKSI)
31 Mei 2019	0599/EST.06/Corsec/V/2019	Perubahan Akuntan Publik
31 Mei 2019	0605/EST.06/CorSec/V/2019	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
20 Juni 2019	0612/EST.06/Corsec/VI/2019	Penyampaian laporan tahunan
24 Juni 2019	0614/EST.06/Corsec/VI/2019	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
25 Juni 2019	0616/EST.06/Corsec/VI/2019	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Insidentil

TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL
1 Juli 2019	0616/EST.06/Corsec/VII/2019	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal I tahun 2019
4 Juli 2019	0619/EST.06/Corsec/VII/2019	Penyampaian Materi Public Expose - Insidentil
4 Juli 2019	0620/EST.06/Corsec/VII/2019	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan
9 Juli 2019	0621/EST.06/Corsec/VII/2019	Laporan Hasil Public Expose - Insidentil
9 juli 2019	0622/EST.06/Corsec/VII/2019	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan
12 Juli 2019	0623/EST.06/Corsec/VII/2019	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
15 Juli 2019	0624/EST.06/Corsec/VII/2019	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
30 Agustus 2019	0627/EST.06/Corsec/VIII/2019	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal II tahun 2019
11 September 2019	0628/EST.06/Corsec/IX/2019	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
11 September 2019	0629/EST.06/Corpsec/IX/2019	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
19 Nopember 2019	0637/EST.06/Corpsec/XI/2019	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Kuartal III tahun 2019

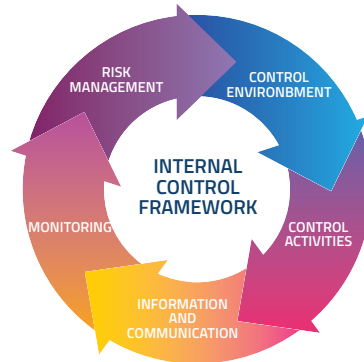


# INTERNAL CONTROL

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal mengacu pada Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Internal Control Framework yang diterapkan secara menyeluruh pada Perseroan. Perseroan memandang pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Penerapan pengendalian internal ini meliputi:

- Lingkungan pengendalian
- Penilaian risiko
- Aktivitas pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan



Pengendalian yang dilakukan dalam lingkup tersebut dilaksanakan melalui berbagai tindakan dan kegiatan pimpinan dan semua pegawai yang ada dalam organisasi Perseroan, dirancang dengan pencapaian tujuan organisasi Perseroan terkait dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, kehandalan pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan pengendalian internal ini terdapat job description dan Standard Operation Procedure (SOP) yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan struktur organisasi. BTEL juga telah menerapkan prosedur risk assessment yang dilakukan melalui sistem wawancara langsung dengan kepala divisi masing-masing unit kerja dan para pelaksana. Penentuan risiko berdasarkan aktivitas kerja di unit tersebut dengan SOP yang telah ada.

Agar proses pengendalian internal berjalan dengan lancar, maka penyebaran komunikasi dan informasi ke seluruh lapisan organisasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Selama tahun 2019 telah dilakukan beberapa aktivitas penilaian efektivitas pengendalian untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Aktivitas penilaian efektivitas pengendalian tersebut, dilakukan melalui audit operasional yang dilakukan secara berkala di seluruh unit kerja sesuai dengan rencana audit tahun 2019.

Perseroan memandang bahwa sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkesinambungan agar dapat berfungsi semestinya, meliputi kesadaran risiko dan pengendaliannya guna mencapai tujuan Perseroan.

## AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal BTEL dilaksanakan oleh Corporate Internal Audit (CIA) yang saat ini diketuai oleh Christin Simon Efendi. Sebelumnya pernah menjabat sebagai General Manager Business Control dan berpengalaman sebagai Treasury dan Accounting Manager. Memiliki gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Atmajaya Jakarta tahun 2001.

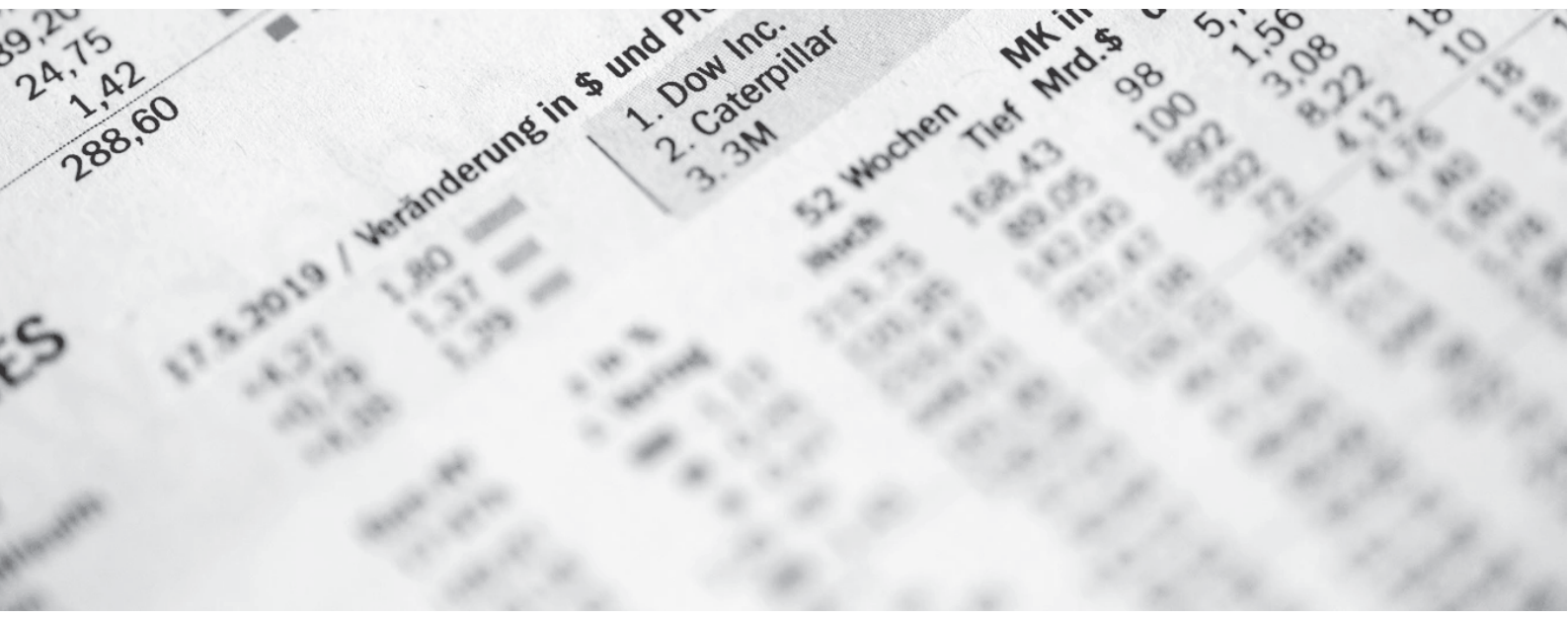
CIA berperan sebagai strategic business partner bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran BTEL dengan melakukan evaluasi berdasarkan risk-based audit secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias, dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan stakeholder, pemahaman terhadap pokok permasalahan dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan dapat dilaksanakan.

## PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal BTEL yang disetujui oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 3 April 2009 dimaksudkan sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh BTEL serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal. Piagam Audit Internal ini ditujukan pula agar terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan BTEL.

Ruang lingkup pekerjaan audit oleh CIA mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi BTEL. Pekerjaan audit tersebut dilakukan melalui pendekatan risk-based audit dengan melihat risiko-risiko terkait dengan objek penugasan audit.

CIA bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berdasarkan arahan Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris ruang lingkup pekerjaan audit oleh CIA juga mencakup kegiatan badan-badan usaha afiliasi dan anak perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan BTEL.



Ruang lingkup CIA mencakup audit dan penilaian atas efektivitas risk management, kecukupan dan efektivitas system pengendalian intern, kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan, serta efektivitas governance processes dengan melakukan:

1. Audit ketaatan (compliance audit) terhadap kebijakan, rencana dan anggaran, prosedur, peraturan dan kegiatan operasional lainnya.
2. Audit operasional (operational/management audit) dalam rangka meningkatkan efisiensi, pengamanan sumber daya dan dana, serta konsistensi dan efektivitas atas manfaat suatu kegiatan operasional atau program yang telah ditetapkan.
3. Audit Teknologi Sistem Informasi (TSI) untuk memastikan terjaminnya integritas data (benar, lengkap, aman, tepat waktu), efektivitas dan efisiensi prosedur operasional dan kelangsungan operasional teknologi sistem informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknologi sistem informasi. Termasuk melakukan audit atas setiap implementasi aplikasi TSI untuk memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan yang ditetapkan, kepatuhan terhadap ketentuan, terdapat control yang memadai dan tersedianya sarana penelusuran kembali (audit trail), serta memberi rekomendasi mengenai kontrol yang perlu diterapkan.
4. Audit jaringan telekomunikasi (telecommunication network) untuk optimasi peningkatan kualitas jaringan radio CDMA dalam pemenuhan cakupan, kualitas, dan kapasitas jaringan.
5. Audit khusus dan investigasi (special and investigation audit) terhadap hal-hal yang patut diduga atau diperkirakan merupakan suatu tindak perbuatan kecurangan/penyalahgunaan/manipulasi (fraud), penggelapan, penyimpangan terhadap ketentuan/peraturan internal maupun eksternal, dan lain sebagainya berdasarkan instruksi Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Pemantauan secara off-site atau monitoring (desk audit) terhadap segala aktivitas di seluruh unit kerja BTEL melalui analisis terhadap dokumen dan laporan.

Sesuai dengan program kerjanya, CIA melakukan kegiatan audit yaitu kegiatan internal consulting services. Pada pelaksanaannya, jasa konsultasi internal diarahkan pada pengawalan untuk penyelenggaraan operasional perusahaan khususnya berkenaan dengan respon terhadap risiko, pengembangan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko, termasuk proses risk assessment, dalam pemetaan terhadap unit bisnis yang berisiko tinggi sebagai langkah antisipatif agar penyelenggaraan bisnis tetap mengindahkan rambu-rambu yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa hasil audit dan internal consulting memperoleh tanggapan yang memadai dari auditee, maka dilakukan upaya pengawasan tindaklanjut. Tindaklanjut di lapangan dilakukan oleh auditee yang kemudian dimonitor oleh CIA. Untuk hal ini, tindaklanjut dibatasi pada area-area proses bisnis yang signifikan dengan target waktu yang disepakati bersama.

## KEGIATAN INTERNAL AUDIT

Pada tahun 2019, fokus kegiatan Internal Audit lebih pada pengawasan dan pengawalan strategi dan rencana bisnis Perseroan sehubungan model bisnis dan inisiatif baru Perseroan. Baik diminta oleh Direksi maupun proaktif, Internal Audit melakukan internal consulting services dengan titik berat pada penyelenggaraan operasional perusahaan khususnya berkenaan dengan respon terhadap risiko, pengembangan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko, termasuk proses risk assessment, dalam pemetaan terhadap unit bisnis yang berisiko tinggi sebagai langkah antisipatif agar penyelenggaraan bisnis tetap mengindahkan rambu-rambu yang berlaku. Untuk memastikan bahwa hasil audit dan internal consulting memperoleh tanggapan yang memadai dari auditee, maka dilakukan upaya pengawasan tindaklanjut. Tindaklanjut di lapangan dilakukan oleh auditee yang kemudian dimonitor oleh CIA. Untuk hal ini, tindaklanjut dibatasi pada area-area proses bisnis yang signifikan dengan target waktu yang disepakati bersama.



## MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko bagi BTEL merupakan bagian penting dari implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Peran sistem manajemen risiko disadari penuh oleh BTEL sangat krusial dalam setiap proses operasional Perusahaan. Setiap tahapan proses dari awal sampai akhir akan diukur dan disimulasikan dengan potensi risiko kemungkinan besar akan dihadapi berikut dengan perencanaan mitigasi yang matang. Meskipun dalam kondisi dan situasi kinerja keuangan yang kurang menguntungkan, namun Perseroan tetap memegang dan menerapkan sistem manajemen risiko sebagai proses yang menghasilkan produk layanan yang handal sekaligus siap dengan segala antisipasi yang diperlukan terlebih untuk menjalankan model bisnis dan inisiatif baru Perseroan. BTEL melaksanakan prosedur manajemen risiko yang disebut risk self assessment, yang membantu BTEL mengevaluasi eksposur risiko di setiap proses bisnis. Seluruh karyawan yang terlibat di dalam proses bisnis berperan dalam menentukan, mengevaluasi, dan mengawasi risiko dalam upaya membangun kerja sama tim dan komitmen yang kuat untuk mengelola risiko dan melaksanakan proses bisnis.

## PROSES MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL BTEL

Proses manajemen risiko di BTEL dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:



### 1. Identifikasi Risiko Operasional

Identifikasi dilakukan untuk setiap produk, aktivitas, proses dan sistem informasi yang ada dan akan digunakan oleh perusahaan. Identifikasi dimulai dari memahami bagaimana proses bisnis dilakukan sesuai dengan pemetaan proses operasional yang ada. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran perusahaan.

### 2. Penilaian/Pengukuran Risiko Operasional

Melakukan klasifikasi kejadian risiko ke dalam beberapa kategori, mulai dari yang impact dan atau frekuensinya paling rendah (Very Low Frequency/Very Low Impacts) hingga yang tertinggi (Very High Frequency/Very High Impacts). Kemudian diterapkan Risk Appetite untuk menentukan level besaran risiko operasional yang dapat diterima Perseroan agar mampu memaksimalkan hasil dari risiko operasional yang ada ataupun yang mungkin akan terjadi. Toleransi risiko operasional BTEL direfleksikan dalam suatu evaluasi risiko berupa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko operasional yang telah disepakati yang dihasilkan dalam proyek ERM. Aspek dalam kriteria yang berdampak lebih besar dari high tidak dapat ditoleransi dan perlu ditangani dengan segera.

### 3. Pengawasan/Pemantauan Risiko Operasional

Pemantauan/pengawasan risiko operasional dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (loss events) yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional (major business line), antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal (internal control). Fungsi Operational Risk menyusun laporan mengenai dampak kerugian risiko operasional dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi.

## RISK MATRIX

Likelihood of the Consequence	Maximum Reasonable Consequence				
	(1) Insignificant	(2) Minor	(3) Moderate	(4) Major	(5) Catastrophic
(A) Almost certain	11 High	16 High	20 Extreme	23 Extreme	25 Extreme
(B) Likely	7 Moderate	12 High	17 High	21 Extreme	24 Extreme
(C) Occasionally	4 Low	8 Moderate	13 High	18 Extreme	22 Extreme
(D) Unlikely	2 Low	5 Low	9 Moderate	14 High	19 Extreme
(E) Rare	1 Low	3 Low	6 Moderate	10 High	15 High

Source: AS/NZS 4360:2004 Risk Management

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi, risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya risiko operasional melainkan juga risiko-risiko lainnya yang bersumber dari berbagai lingkungan internal dan eksternal yang terkait erat dengan industri telekomunikasi. Risiko-risiko ini dikendalikan dibawah koordinasi Direksi dan fungsi-fungsi terkait di BTEL dan melalui arahan Komite Manajemen Risiko BTEL. Risiko-risiko yang menjadi lingkup pengendalian manajemen BTEL adalah:

### 1. Risiko Stabilitas Ekonomi.

Perusahaan menghadapi risiko dari kondisi perekonomian domestik maupun global; termasuk faktor perekonomian makro seperti inflasi, tingkat bunga, dan nilai tukar. BTEL telah mengantisipasi risiko tersebut dengan melakukan pengawasan dan mencari ahli di luar BTEL yang akan memberikan saran jika diperlukan.

### 2. Risiko Perubahan Politik dan Pemerintahan.

Industri telekomunikasi merupakan industri yang sangat ditata oleh peraturan. Setiap perubahan dalam peraturan pemerintah akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. BTEL mengantisipasi risiko ini dengan menyusun rencana contingency untuk menghadapi lingkungan politik yang tidak mendukung atau kurang mendukung. Di samping itu, BTEL mengoptimalkan kinerja unit-unit terkait yang menjalankan fungsinya dalam memonitor kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga kepatuhan tetap terjaga.



### **3. Risiko Fluktuasi Valuta Asing.**

BTEL beroperasi di Indonesia dengan pendapatan dalam mata uang Rupiah. Di lain pihak, sebagian kewajiban BTEL adalah dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dapat berdampak langsung kepada keuntungan Perusahaan.

### **4. Risiko Persaingan.**

BTEL menghadapi persaingan yang ketat dengan banyaknya pemain di sektor telekomunikasi. Perusahaan mengantisipasi lingkungan yang penuh persaingan dengan meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk secara terus-menerus dan dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh.

### **5. Risiko Perkembangan Teknologi.**

BTEL sangat dipengaruhi oleh perubahan yang cepat di bidang teknologi yang terdapat di industri telekomunikasi. BTEL mengantisipasi risiko ini dengan cara mendorong product development yang mengikuti dan mengantisipasi perkembangan teknologi terkini. Langkah ini membuat BTEL mampu mengantisipasi kebutuhan pasar terhadap teknologi tersebut.

### **6. Risiko Ketergantungan pada Jaringan Pihak Lain.**

Kegiatan usaha BTEL sangat tergantung kepada perjanjian interkoneksi atau perjanjian pemanfaatan Jaringan telekomunikasi dengan pihak atau operator penyedia jaringan telekomunikasi serta infrastruktur lainnya yang melekat. Tidak tersedianya jaringan dapat berdampak pada terjadinya terganggunya layanan kepada pelanggan dan hilangnya pendapatan potensial. Untuk mengurangi risiko ini, BTEL sangat memperhatikan hubungan dengan pemerintah dan operator-operator lain untuk memungkinkan pemanfaatan jaringan secara terus-menerus.

## 7. Risiko ketergantungan pada Pola Kemitraan.

Model bisnis baru di depan maupun yang telah ada saat ini dapat dijalankan oleh BTEL dengan setidaknya dua pola, yaitu pola mandiri dan pola kemitraan. Pola mandiri dimaksudkan bahwa BTEL dapat menjalankan sendiri bisnisnya dengan sarana dan prasarana yang disediakan sendiri. Hal ini berkaitan langsung dengan lisensi yang dimiliki atau peraturan yang dapat dipenuhi oleh BTEL dan kesanggupan secara keuangan dan operasional dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Pola kedua adalah kemitraan dimana dalam kondisi BTEL belum memiliki sarana dan prasarana sendiri maupun lisensi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, maka bermitra dengan pihak lain yang telah memiliki fasilitas dan lisensi yang diperlukan merupakan pilihan yang rasional. Namun demikian, risiko yang mungkin timbul adalah terkait dengan posisi tawar dan dominan yang biasanya berada lebih besar pada mitra. Pemutusan kemitraan dari waktu ke waktu merupakan risiko dengan perencanaan mitigasi tersendiri.

## 8. Risiko Fraud dan Berkurangnya Pendapatan.

Dalam aktivitas operasional dan finansial BTEL, ada kemungkinan muncul risiko terhadap terjadinya fraud. Fraud adalah penipuan, penggelapan atau bentuk penyimpangan lainnya baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas operasional dan finansial BTEL. Dengan banyaknya inovasi pasar yang dilakukan oleh BTEL, risiko yang berasal dari fraud memiliki potensi dampak negatif yang harus diperhitungkan jika berlangsung dalam waktu lama dan dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan dan keuntungan. BTEL melakukan pencegahan terhadap terjadinya fraud dengan menerapkan revenue assurance untuk pencegahan pengurangan pendapatan. Revenue assurance melakukan pemeriksaan pencatatan, kelengkapan transaksi dan sistem penagihan secara menyeluruh. Prosedur pengujian juga berlaku bagi produk dan layanan baru, sebelum diluncurkan secara komersial.

## PERKARA PENTING

Pada tahun 2019 terdapat perkara penting yang melibatkan Perusahaan yaitu:

1. Perkara gugatan perdata di pengadilan New York Amerika Serikat terhadap beberapa yaitu Universal Investment Advisory SA, Vaquero Master EM Credit Fund Ltd, dan Trucharm Ltd yang yang memegang lebih dari 25% (duapuluh lima persen) Wesel Senior -USD yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom, Pte.Ltd (entitas anak). Gugatan tersebut terkait pemenuhan kewajiban pembayaran bunga Wesel Senior-USD. Gugatan ini sudah muncul sejak September 2014. Di tahun 2019 proses sidang perkara gugatan ini dihentikan sementara karena Perseroan mengajukan permohonan Chapter 15 ke Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

2. Permohonan Chapter 15 oleh Perseroan kepada the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York untuk pengakuan atas keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanggal 9 Desember 2014. Sampai akhir 2019, persidangan masi berlangsung dan belum terdapat keputusan dari hakim pengadilan.

## SANKSI ADMINISTRASI

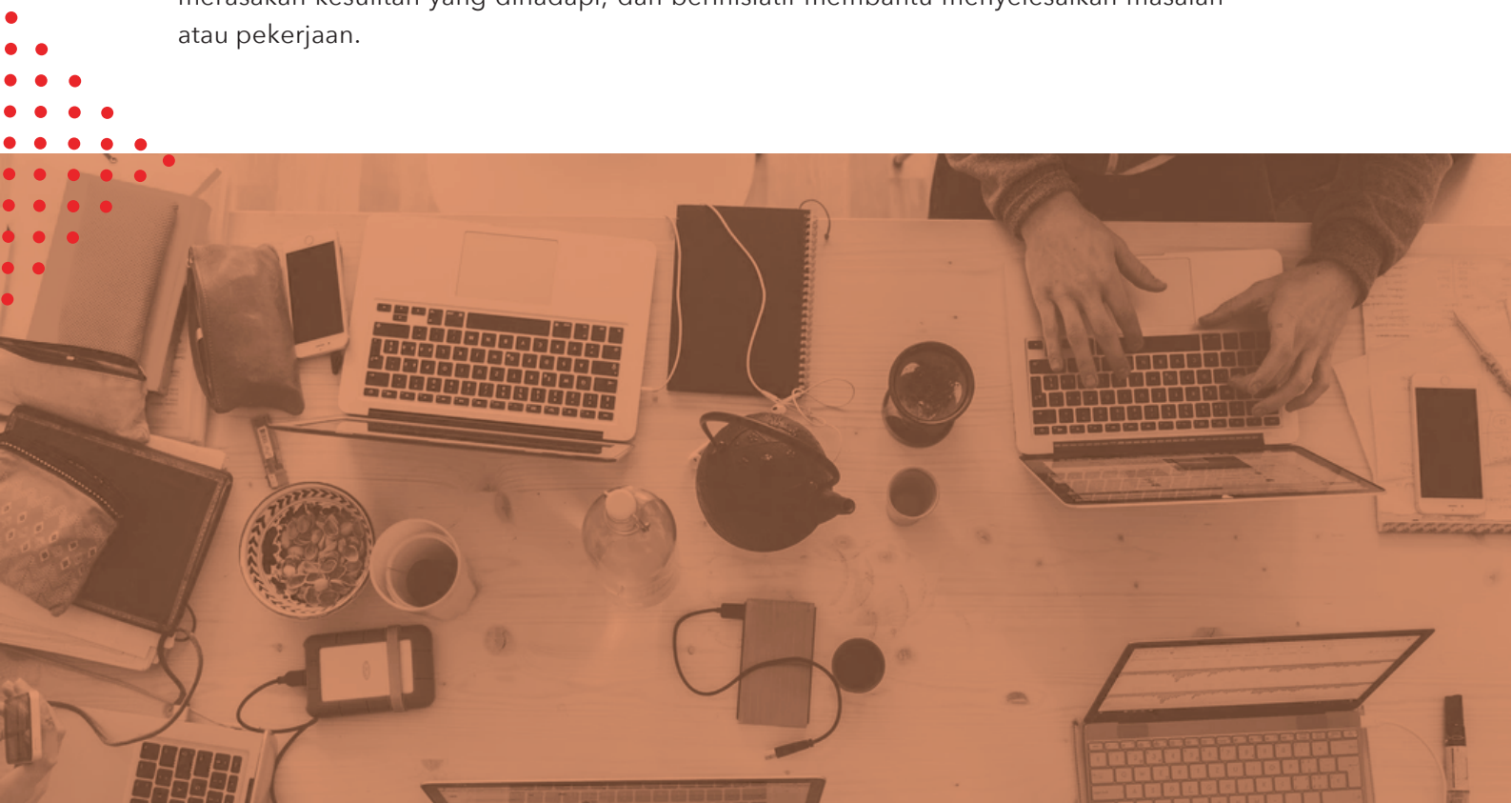
Sebagai perusahaan publik dan emiten, BTEL memiliki kewajiban terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan -undangan di bidang pasar modal, dalam hal ini terutama peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (Bursa). Pada tahun 2019, Perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan akhir tahun buku 2018 yang terdapat konsolidasi dengan entitas anak. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan tahunan 2018 kepada OJK dan Bursa. Atas keterlambatan tersebut OJK dan Bursa mengenakan sanksi administrasi berupa denda untuk dibayarkan dengan baik oleh Perseroan.



## KODE ETIK

Kode Etik yang dipegang sebagai bagian dari nilai-nilai Perusahaan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Jujur, yang bermakna bahwa terdapat keselarasan antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan; menghindari benturan kepentingan; menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas; dan mengakui kesalahan serta menyampaikan sesuatu sesuai fakta.
2. Tanggung Jawab, yang bermakna bahwa terdapat kemampuan untuk menerima amanat dan menjalankan tugas serta kewajiban yang diberikan; dan menuntaskan pekerjaan yang diberikan
3. Visioner, yang bermakna bahwa terdapat keyakinan dalam mewujudkan rencana dan cita-cita; dan ingin melakukan penyempurnaan dan menjadi yang terbaik.
4. Disiplin, yang bermakna bahwa konsistensi terhadap rencana yang telah dibuat dan menjalankan sesuai ketentuan; dan tidak berhenti berupaya hingga mencapai hasil yang diinginkan.
5. Kerja sama, yang bermakna bahwa terdapat optimalisasi potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, dan saling mendukung untuk menyelesaikan tugas bersama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang disepakati bersama;
6. Adil, yang bermakna bahwa terdapat pengambilan sikap dan keputusan secara proporsional, dan mengapresiasi serta menghukum sesuai dengan ketentuan.
7. Peduli, yang bermakna bahwa terdapat pemahaman atas kondisi pihak lain dan ikut merasakan kesulitan yang dihadapi; dan berinisiatif membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan.



# CORPORATE CULTURE

## Nilai-nilai Perusahaan

Dalam kerangka kerja Perusahaan di samping dukungan sistem pengendalian internal, penerapan GCG, dan kode etik, Perusahaan juga membangun nilai-nilai yang didorong menjadi corporate culture dan identitas yang melekat pada setiap insan Perusahaan.

- **PASSION**

Dorongan untuk menyebarkan energi positif dan menularkannya kepada lingkungan perusahaan. Perilaku nilai tersebut meliputi integritas, penghargaan martabat, motivasi, semangat, dan mempelajari tren, teknologi, metode, dan keterampilan baru.

- **APPRECIATING PEOPLE**

Menghargai karyawan sebagai faktor terpenting dengan memahami dan mengakui kontribusi setiap individu. Perilaku nilai tersebut meliputi penghormatan dan penghargaan terhadap sesama, baik internal maupun eksternal, dan pengembangan para pegawai dan mitra sendiri.

- **CUSTOMER CENTRIC**

Menyenangkan pelanggan dan melayani mereka dengan produk dan layanan berkualitas tinggi. Perilaku nilai tersebut meliputi interaksi secara langsung dengan pasar, mencari tahu dan memahami kebutuhan pelanggan, pelayanan yang setara bagi semua pelanggan.

- **OPERATIONAL EXCELLENCE**

Memahami pentingnya efisiensi dan efektivitas dan dampaknya kepada kepuasan pelanggan. Perilaku nilai tersebut meliputi semangat lebih cepat, lebih baik, dan lebih terjangkau harganya, profesionalisme, disiplin, kerja sama dan sinergi.

- **INNOVATION**

Keberanian untuk berkompetisi, memproduksi, dan menyuarakan terobosan untuk mendorong perusahaan agar menjadi yang terdepan dalam persaingan bisnis. Perilaku nilai tersebut meliputi mental "Bisa", berpikir kreatif, berpikir secara unik dalam hubungan dengan pengalaman pelanggan, dan berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan.

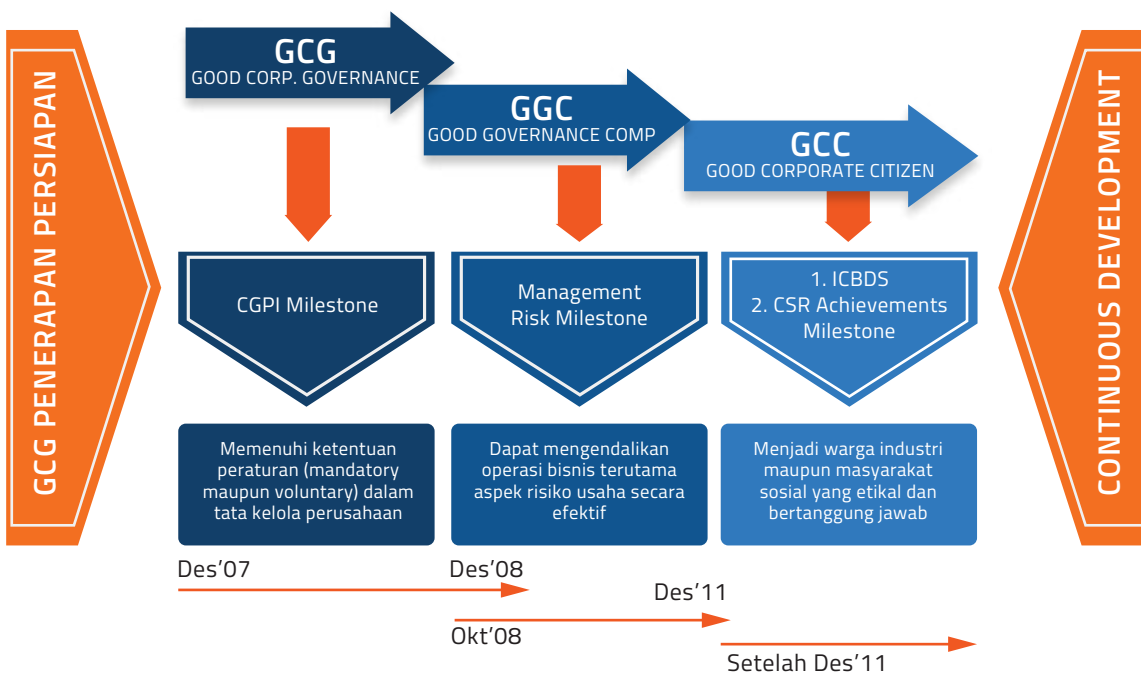
## Penerapan GCG

### Tata Kelola Perusahaan Dan Penerapannya

Sebagai perusahaan publik yang wajib mengedepankan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, Perseroan senantiasa dalam keadaan apapun mempraktekkan secara konsisten gagasan prinsip-prinsip dasar GCG dengan antara lain untuk:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan melalui penerapan maksimal prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan agar Perseroan mempunyai daya saing kuat baik secara nasional maupun regional.
2. Mendukung pengelolaan perusahaan secara bersih, transparan, dan profesional serta memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing organ BTEL, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Karyawan.
3. Mendorong agar pengelolaan perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral integritas yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial BTEL terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar BTEL.

Dari sisi eksternal, penerapan GCG di Perusahaan berpatokan pada kerangka hukum yang menjadi dasar gagasan pemikiran dan penerapan GCG tersebut yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- **Milestone 1. GCG (Good Corporate Governance)**

Memenuhi ketentuan dan peraturan (mandatory maupun voluntary) dalam tata kelola perusahaan

- **Milestone II. GGC (Good Governance Compliance)**

Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif

- **Milestone III. GCC (Good Corporate Citizen)**

Menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang memiliki etika dan bertanggung jawab

Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meskipun dalam kondisi keuangan dan operasional yang kurang menguntungkan, Perseroan tetap berupaya seoptimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usaha untuk secara konsisten memperhatikan perangkat pendukung prinsip tata kelola perusahaan sebagai berikut:

## 1. PAKTA INTEGRITAS (PI)

PI merupakan pernyataan/janji pimpinan dan karyawan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan. Komitmen tersebut ditunjukkan BTEL dengan telah ditandatanganinya Piagam Pakta Integritas sejak 1 Agustus 2006 dan dilanjutkan dengan penyusunan Modul PI PT Bakrie Telecom Tbk. yang merupakan kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci, meliputi segala aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan PI secara benar dan efektif di lingkungan PT Bakrie Telecom Tbk., menuju perwujudan Perseroan sebagai suatu lingkungan integritas yang efektif di Indonesia.

## 2. TATA KELOLA PERUSAHAAN/ CORPORATE GOVERNANCE (CG)

Secara umum CG didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Baik (Good) dalam konteks CG adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep CG. Untuk memastikan tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), BTEL menggunakan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

### 3. ATURAN BERPERILAKU/ CODE OF CONDUCT (CoC)

Aturan berperilaku yang diterapkan BTEL mencakup kewajiban dan larangan yang mengatur hubungan kerja baik secara hubungan internal antar pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, dan hubungan eksternal antara perusahaan dengan pihak eksternal.

CoC berasal dari budaya Perseroan. Dalam CoC terdapat dua panduan etika:

- a. Etika umum sebagai kontrol atas perilaku karyawan, misalnya dalam hal berinteraksi dan kerahasiaan.
- b. Etika bisnis yang berlaku dalam masalah tender dan berinteraksi dengan piutang dagang.

### 4. FOIS (FINANCIAL OPERATIONAL INTEGRATED SYSTEM)

FOIS (Financial Operational Integrated System) dalam logical framework penerapan BTP (Bersih, Transparan, dan Profesional) di BTEL memiliki fungsi menterjemahkan prinsip-prinsip GCG dan CoC ke dalam tindakan nyata dengan menitikberatkan pengecekan secara detail dan simetris antara kegiatan operasional di lapangan dengan aspek keuangannya baik dalam anggaran, penggunaan, dan pencatatannya.

Kegunaan FOIS adalah mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang bersifat koruptif baik yang dilakukan oleh orang dalam, maupun bekerja sama dengan pihak luar. Ada 2 hal yang diperhatikan dalam penerapan FOIS, yaitu:

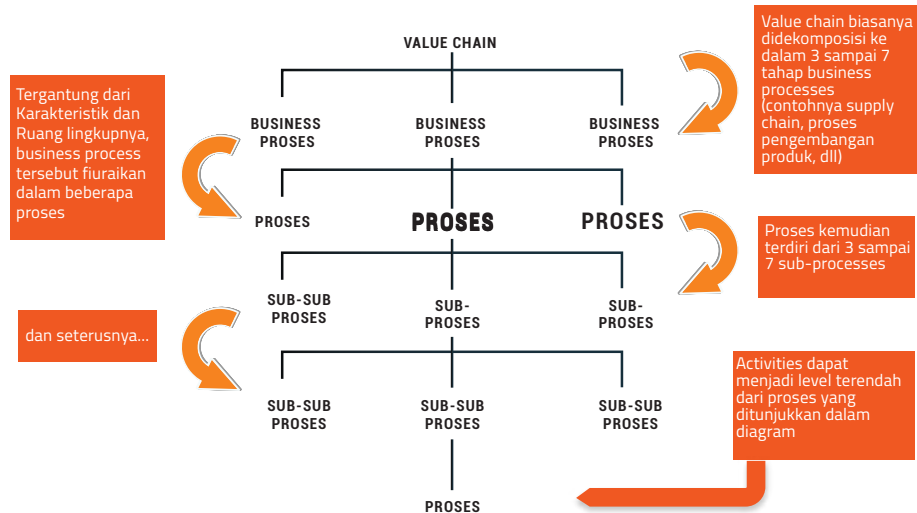
- a. Aktualisasi kebijakan, aturan, dan SOP di operasional perusahaan yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan; dan
- b. Sistem pengawasan dari aspek keuangan dan operasional secara terpadu.

#### TOP DOWN APPROACH

Dimulai dari value chain BTEL kemudian dikembangkan dalam bussines process dan sub process sampai ke level aktivitas.

#### BOTTOM UP APPROACH

Pendekatan yang dimulai dari aktivitas-aktivitas yang telah ada di level operasional kemudian dikembangkan menjadi suatu prosedur kerja standar (SOP)



## 6. ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan bagian awal dari upaya BTEL untuk membangun kerangka GCG di Perseroan. Etika bisnis merupakan kerangka dasar tingkah laku atau filosofi yang digunakan oleh seluruh karyawan BTEL dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dengan berpedoman pada etika bisnis maka akan terbentuk perusahaan yang bersih (GCG).

Konsep etika bisnis di BTEL adalah bagaimana unsur-unsur yang ada di BTEL yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu dan perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis atau menjalankan bisnis berlaku secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Prinsip yang digunakan dalam etika bisnis, yaitu:

- a. Prinsip Otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya lebih baik untuk dilakukan. Dan orang yang otonom tahu apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.
- b. Prinsip Kejujuran, yang terbagi menjadi tiga bagian:
  - Kejujuran dalam syarat perjanjian dan kontrak.
  - Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harga.
  - Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
- c. Prinsip Keadilan, menekankan perlakuan yang sama pada setiap individu sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Prinsip Saling Menguntungkan, menekankan agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution.
- e. Prinsip Integritas Moral, dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan.





## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019 dan dalam beberapa tahun terakhir, bentuk pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan lebih difokuskan dalam bentuk sinergi dan kolaborasi bersama badan sosial yang dikelola oleh Kelompok Usaha Bakrie dimana Perseroan menjadi bagian di dalamnya. Dalam hal ini Perseroan memberikan kontribusi sosial baik materi maupun tenaga dan pikiran yang disalurkan melalui Bakrie Amanah dan Yayasan Bakrie Untuk Negeri.

Di samping itu sudah beberapa tahun terakhir, Perseroan memberikan kontribusi secara aktif dan rutin dengan bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Esia dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Bakrie Telecom, menyediakan konsumsi berbuka puasa bagi jamaah masjid Wisma Bakrie. Jamaah tersebut tidak hanya para karyawan Perseroan maupun dari kantor tetapi juga masyarakat sekitar Wisma Bakrie dalam hal ini termasuk para pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar Wisma Bakrie. Di samping itu terdapat pula penyaluran dana zakat/infaq, karyawan melalui Komunitas Majelis Ta'lim ESIA dan HRD Perseroan (Employee Relations).

Perseroan bersinergi dengan Bakrie Amanah dan Yayasan Bakrie Untuk Negeri juga secara berkala menyelenggarakan kegiatan amal berupa pemberian donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia.

HALAMAN INI SENGAJA  
DIKOSONGKAN





**SURAT PERNYATAAN  
 ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA  
 DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB  
 ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019  
 PT BAKRIE TELECOM TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bakrie Telecom Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Juli 2020

**DEWAN KOMISARIS**

**TAUFAN E.N. ROTORASIKO**  
 Komisaris Utama

**R. BISMARCA KURNIAWAN**  
 Komisaris

**JOHN PIETER NAZAR**  
 Komisaris Independen

**DIREKSI**

**HARYA MITRA HIDAYAT**  
 Direktur Utama

**JASTIRO ABI**  
 Direktur

**ANDI PRAVIDIA SALIMAN**  
 Direktur

**W. MARK ROBSON**  
 Direktur

HALAMAN INI SENGAJA  
DIKOSONGKAN



# **Bakrie Telecom**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**

***Consolidated Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
For the Year Ended December 31, 2019***

***PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES***

**Daftar Isi****Table of Content**

	Halaman / <i>Page</i>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor Independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan defisiensi modal konsolidasian	5	<i>Consolidated statements of changes in capital deficiency</i>
Laporan arus kas konsolidasian	6	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	7	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PT BAKRIE TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
OF PT BAKRIE TELECOM Tbk AND  
SUBSIDIARIES FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Harya Mitra Hidayat  
Alamat kantor : PT Bakrie Telecom Tbk  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,  
Jakarta - 12920  
Alamat rumah : Jl. Pejaten Barat II No.5A  
RT 004/RW 008 Pejaten Barat  
Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telepon : (62 21) 91101112  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Andi Pravidia Saliman  
Alamat kantor : PT Bakrie Telecom Tbk  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,  
Jakarta - 12920  
Alamat rumah : Jl. Puter II ED 2/32 Bintaro 5  
RT.002/RW.009  
Jurangmangu Timur  
Pondok Aren - Tangerang  
Telepon : (62 21) 91101112  
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name : H. Harya Mitra Hidayat  
Office address : PT Bakrie Telecom Tbk  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,  
Jakarta - 12920  
Residential address : Jl. Pejaten Barat II No.5A  
RT 004/RW 008 Pejaten Barat  
Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telephone : (62 21) 91101112  
Title : President Director
2. Name : Andi Pravidia Saliman  
Office address : PT Bakrie Telecom Tbk  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,  
Jakarta - 12920  
Residential address : Jl. Puter II ED 2/32 Bintaro 5  
RT.002/RW.009  
Jurangmangu Timur  
Pondok Aren - Tangerang  
Telephone : (62 21) 91101112  
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;  
b. PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' internal control system.

This statement is made in all truth.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

  
H. Harya Mitra Hidayat  
Direktur Utama / President Director

  
Andi Pravidia Saliman  
Direktur / Director

Jakarta, 20 Juli 2020 / 20 July, 2020

PT Bakrie Telecom Tbk

Office:

00101/2.1107/AU.1/06/1293-2/1/III/2020

## Laporan Auditor Independen

### Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

### PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya ("Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dan entitas anaknya tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan entitas anaknya yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian dan entitas anaknya tersebut berdasarkan audit yang sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun karena hal yang dijelaskan dalam paragraph Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit.

### Basis untuk opini tidak menyatakan pendapat

Seperti diungkapkan dalam Catatan 13 laporan keuangan konsolidasian, Entitas Anak, Bakrie Telecom Pte. Ltd ("BTPL"), memiliki kewajiban pembayaran utang Wesel Senior dengan pokok sebesar USD380 juta, sampai saat ini BTPL belum melakukan pembayaran utang Wesel Senior tersebut. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") antara Perusahaan, PT Bakrie Telecom Tbk dengan para kreditur termasuk dengan BTPL (sehubungan dengan utang Wesel Senior tersebut), pembayaran utang dapat dilakukan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi.

## Independent Auditors' Report

### The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

### PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bakrie Telecom Tbk (the "Company") and its Subsidiaries (the "Group"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2019, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements and subsidiaries in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the presentation of consolidated financial statements and subsidiaries that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements and its subsidiaries based on conducting the audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute Certified of Public Accountants. However, because of the matter described in the Basis for Disclaimer of Opinion paragraph, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

### Basis of disclaimer of opinion

As disclosed in Note 13 to the consolidated financial statements, the Company's Subsidiary, Bakrie Telecom Pte. Ltd ("BTPL") has the obligation to repay debts of Senior Notes with a principal of USD380 million. BTPL has not been able to pay the Senior Notes obligations. Based on amicable settlement agreement in the PKPU between the Company, PT Bakrie Telecom Tbk and its creditors, including BTPL (related to the Senior Wesel's debt), debt payments could be settled by issuing Mandatory Convertible Bonds.

00101/2.1107/AU.1/06/1293-2/1/VI/2020

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Independent Auditors' Report (continued)**

**Basis untuk opini tidak menyatakan pendapat (lanjutan)**

**Basis of disclaimer of opinion (continued)**

Dalam catatan 14 laporan keuangan konsolidasian dijelaskan bahwa sampai dengan tanggal laporan keuangan, utang yang harus diselesaikan melalui PKPU adalah sejumlah Rp 5.431 triliun termasuk pembayaran untuk Porsi Tunai yaitu sejumlah 30% dari utang tersebut belum dapat dilakukan karena belum terdapat sisa kas operasional Perusahaan yang mencukupi dan Perjanjian Perdamaian telah mengatur bahwa dalam hal Perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran utang Porsi Tunai tersebut maka penyelesaian utang tersebut akan dilakukan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi.

*In note 14 of the consolidated financial statements, it is explained that up to presence, the settlement of payables through PKPU amount of Rp5.431 trillion, including payment for 30% of the Cash Portions of debts, cannot be made due to insufficient remaining operational cash of the Company and Amicable Settlement Agreement stipulates that in the event that the Company cannot pay the Cash Portion debt, the settlement will be carried out with the issuance of the Mandatory Convertible Bonds.*

Hal-hal tersebut di atas mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan terlampir termasuk catatan atas laporan keuangannya tidak mengungkapkan fakta tersebut.

*The above matters indicate a material uncertainty that may cause a significant doubt on the ability of the Group to maintain as its going concern and the Group may not be able to pay its liabilities in normal business activities. The accompanying financial statements including notes to the financial statements do not disclose such facts.*

Kami tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas saldo Wesel Senior sejumlah USD 380 juta atau setara dengan Rp 5.282 triliun dan saldo akrual bunga sejumlah Rp 3.659 triliun seperti dijelaskan dalam catatan 13 dan 12 atas laporan keuangan konsolidasian.

*We were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence for the balance of Senior Notes amounting of USD 380 million or equivalent to Rp 5.282 trillion and the balance of accrued interest amount of Rp 3.659 trillion as described in notes 13 and 12 to the consolidated financial statements.*

**Opini tidak menyatakan pendapat**

**Disclaimer of opinion**

Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraph Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir.

*Because of the significance of the matter describe in the Basis for Disclaimer Opinion paragraph, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion. Accordingly, we do not express an opinion on the accompanying consolidated financial statements and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended.*

**Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant  
KRISNAWAN, NUGROHO & FAHMY**

  
Fahmy, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP. 1293 / License of Public Accountant No. AP. 1293

20 Juli 2020 / July 20, 2020

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2019	2018	
<b><u>ASET</u></b>				<b><u>ASSETS</u></b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2c,4	866	310	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	2d,5	40	40	Restricted cash
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 72.741 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 72.204 pada tanggal 31 Desember 2018)	6	2.360	953	Trade receivables (net allowances for impairment loss of Rp 72,741 as of December 31, 2019 and Rp 72,204 as of December 31, 2018)
Uang muka	7	714	313	Advances
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>3.980</b>	<b>1.616</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Pajak dibayar dimuka	25a	179	1.292	Prepaid Tax
Aset tetap - bersih (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 9.371.089 pada tahun 2019 dan Rp 9.370.736 pada tahun 2018)	2h,2i,2j 2k,8	425	724	Fixed assets - net (Net accumulated depreciation of Rp 9,371,089 as of December 31, 2019 and Rp 9,370,736 as of December 2018)
Aset tidak lancar lainnya	9	11.093	709.873	Others non- current assets
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>11.697</b>	<b>711.889</b>	<b>Total Non-Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>15.677</b>	<b>713.505</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b><u>LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL</u></b>				<b><u>LIABILITIES AND CAPITAL DEFICIENCY</u></b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha				Trade payables
pihak ketiga	10	407.077	406.667	Third parties
pihak berelasi	2e,10	16.861	17.036	Related parties
Utang lain-lain	11	148.955	143.150	Other payables
Utang pihak berelasi	2e,26	47.098	47.098	Due to related parties
Beban akrual	12	3.904.219	3.959.154	Accrued expenses
Utang pajak	2r,25b	21.330	20.580	Tax payables
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Wesel senior - bersih	13	5.282.382	5.502.780	Current maturities of long-term liabilities: Senior notes - net
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>9.827.922</b>	<b>10.096.465</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas imbalan kerja	2p,27	599	206	Employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang yang diselesaikan melalui PKPU	14,34	5.431.572	6.036.077	Long-term liabilities - net of current maturities:  Settlement of payables through PKPU
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>5.432.171</b>	<b>6.036.283</b>	<b>Total Non-current Liabilities</b>
<b>Total Liabilitas</b>		<b>15.260.093</b>	<b>16.132.748</b>	<b>Total Liabilities</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2019	2018	
<b>DEFISIENSI MODAL</b>				<b>CAPITAL DEFICIENCY</b>
Modal saham				Capital stock
Nilai nominal				Par value
Saham biasa				Common shares
seri A Rp 200				series A Rp200
seri B Rp 100				series B Rp100
(dalam satuan penuh)				(in full amount)
Modal dasar				Authorized shares
Saham biasa seri A				Common shares series A
10.000.000.000 saham				10,000,000,000 shares
pada tanggal 31 Desember				as of December 31,
2019 dan 2018				2019 and 2018
Saham biasa seri B				Common shares series B
87.111.652.195 saham				87,111,652,195 shares
pada tanggal				as of December 31,
31 Desember 2019 dan 2018				2019 and 2018
Modal ditempatkan dan				Issued and fully
disetor penuh				paid shares
Saham biasa seri A				Common shares series A
5.751.502.450 saham pada				5,751,502,450 shares as of
31 Desember 2019 dan 2018				December 31, 2019 and 2018
Saham biasa seri B				Common shares series B
31.022.402.185 saham pada				31,022,402,185 shares as of
31 Desember 2019 dan 2018	15	4.252.542	4.252.542	December 31, 2019 and 2018
Tambahan modal disetor	16	2.488.871	2.488.871	Additional paid-in capital
Saham beredar yang				Treasury stock
diperoleh kembali	2n,17	(11.000)	(11.000)	Premium on
Agio saham beredar yang				Treasury stock
diperoleh kembali	2n,17	50.623	50.623	Premium on conversion stock
Agio konversi hutang menjadi saham	14,15	618.931	618.931	Other capital reserves
Cadangan modal lainnya		(368.429)	(536.249)	Deficit
Defisit		(22.275.521)	(22.282.801)	
Defisiensi modal yang dapat				Capital deficiency
diatribusikan kepada pemilik				atributable to owners
entitas induk		(15.243.983)	(15.419.083)	of the parent entity
Kepentingan non pengendali	2b,18	(433)	(160)	Non-controlling interest
<b>Defisiensi Modal - Neto</b>		<b>(15.244.416)</b>	<b>(15.419.243)</b>	<b>Capital Deficiency - Net</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN</b>				<b>TOTAL LIABILITES AND</b>
<b>DEFISIENSI MODAL</b>		<b>15.677</b>	<b>713.505</b>	<b>CAPITAL DEFICIENCY</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain )

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2019	2018	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	2e,2o,19			<b>OPERATING REVENUE</b>
Pendapatan usaha - bruto	19,31			Operating revenues - gross
Jasa telekomunikasi dan teknologi informasi		10.275	8.526	Telecommunication services and Information technology
Beban pokok pendapatan		(6.251)	(4.720)	Cost of goods revenues
Pendapatan Usaha - Neto		4.024	3.806	Operating Revenues - Net
<b>BEBAN USAHA</b>				<b>OPERATING EXPENSES</b>
Penyusutan	2e,2o,2h,8,26	353	1.820	Depreciation
Operasi dan pemeliharaan	20	3.423	1.232	Operating and maintenance
Karyawan	22	8.619	8.194	Employee
Umum dan administrasi	21	14.563	29.221	General and administrative
Penjualan dan pemasaran	23	345	389	Sales and Marketing
Total Beban Usaha		27.303	40.856	Total Operating Expenses
<b>RUGI USAHA</b>		<b>(23.279)</b>	<b>(37.050)</b>	<b>OPERATING LOSS</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				<b>OTHER INCOME (CHARGES)</b>
Beban keuangan	24b	(15)	(605.744)	Financing charges
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2q,24a	195.829	(84.006)	Gain (loss) foreign exchange - net
Lain-lain - neto	24c	(165.192)	(1.179)	Others - net
Beban Lain-lain - Neto		<b>30.622</b>	<b>(690.929)</b>	Other Charges - Net
<b>RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>7.343</b>	<b>(727.979)</b>	<b>LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>(63)</b>	<b>7.404</b>	<b>INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)</b>
<b>RUGI NETO</b>		<b>7.280</b>	<b>(720.575)</b>	<b>NET LOSS</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain )

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2019	2018	
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				<b>Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:</b>
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja		-	806	Remeasurement again on employee benefit liability
Pajak penghasilan terkait		-	-	Related income tax
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				<b>Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:</b>
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(368.429)	(544.111)	Exchange differences due to financial statements translation
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - Neto setelah pajak</b>		(368.429)	(543.305)	<b>Other Comprehensive Income - Net Of Tax</b>
<b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF</b>		<b>(361.149)</b>	<b>(1.263.880)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE LOSS</b>
<b>Rugi neto yang dapat diatribusikan kepada</b>				<b>Net loss attributable to:</b>
Pemilik entitas induk		7.280	(720.575)	Owner of the parent
Kepentingan non-pengendali	2b,18	-	-	Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>7.280</b>	<b>(720.575)</b>	<b>Total</b>
<b>Total rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Total comprehensive loss attributable to:</b>
Pemilik entitas induk		(361.149)	(1.263.941)	Owner of the parent
Kepentingan non-pengendali	2b,18	-	61	Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>(361.149)</b>	<b>(1.263.880)</b>	<b>Total</b>
<b>RUGI NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka penuh)</b>				<b>BASIC LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNER OF PARENT (Full amount)</b>
<b>RUGI NETO</b>	2s,30	<b>0,20</b>	<b>(19,59)</b>	<b>NET LOSS</b>

	Defisiensi Modal yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Capital Deficiency Attributable to Owner of the Parent										
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid Shares	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Saham Beredar yang Diperoleh Kembali / Treasury Stock	Agio Saham Beredar yang Diperoleh Kembali / Premium on Treasury Stock	Agio Saham yang Dikonversi dari Hutang/ Premium on Conversion Stock	Cadangan Modal Lainnya / Other Capital Reserves	Defisit / Deficit	Total / Total	Kepentingan Non-pengendali / Non-controlling Interest	Defisiensi Modal - Neto / Capital Deficiency - Net	
Saldo 1 Januari 2018 dilaporkan sebelumnya	4.252.542	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	7.056	(21.562.226)	(14.155.203)	(221)	(14.155.424)	Balance as of January 1, 2018 as previously reported
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(720.575)	(720.575)	-	(720.575)	Net loss for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:											Other comprehensive income for the year:
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	806	-	806	-	806	Remeasurement gain on employee benefits liability
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	(544.111)	-	(544.111)	-	(544.111)	Exchange differences due to financial statements translation
Perubahan kepentingan non- pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	Changes in non-controlling interest
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>4.252.542</b>	<b>2.488.871</b>	<b>(11.000)</b>	<b>50.623</b>	<b>618.931</b>	<b>(536.249)</b>	<b>(22.282.801)</b>	<b>(15.419.083)</b>	<b>(160)</b>	<b>(15.419.243)</b>	<b>Balance as of December 31, 2018</b>
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	7.280	7.280	-	7.280	Net loss for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:											Other comprehensive income for the year:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	167.820	-	167.820	-	167.820	Exchange differences due to financial statements translation
Perubahan kepentingan non- pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(273)	(273)	Changes in non-controlling interest
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>4.252.542</b>	<b>2.488.871</b>	<b>(11.000)</b>	<b>50.623</b>	<b>618.931</b>	<b>(368.429)</b>	<b>(22.275.521)</b>	<b>(15.243.983)</b>	<b>(433)</b>	<b>(15.244.416)</b>	<b>Balance as of December 31, 2019</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk**  
**DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN ANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk**  
**AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	8.869	8.433	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya	(17.790)	(42.747)	<i>Cash paid to suppliers and other operating activities</i>
Pembayaran kepada karyawan	(8.270)	(21.806)	<i>Cash paid to employees</i>
Pembayaran beban keuangan	(15)	(13)	<i>Payment of financing charges</i>
Pembayaran pajak	(416)	(174)	<i>Payment of taxes</i>
Penerimaan bunga	46	3	<i>Receipt of interest</i>
Penerimaan lainnya	18.186	56.334	<i>Others receipt</i>
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<u>610</u>	<u>30</u>	<b>Net Cash Flows Received from Operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembelian aset tetap	(54)	(73)	<i>Purchased fixed assets</i>
<b>Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<u>(54)</u>	<u>(73)</u>	<b>Net cash Flows Used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>556</b>	<b>(43)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>EFEK PERUBAHAN NILAI KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<u>310</u>	<u>350</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<u><u>866</u></u>	<u><u>310</u></u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

**1 . UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Bakrie Telecom Tbk (dahulu PT Radio Telepon Indonesia) ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1993 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris No. 94 oleh Muhani Salim, SH., sebagaimana diperbaiki dengan Akta Notaris Pembetulan No. 13 tanggal 5 November 1993 dan diubah dengan Akta Notaris No. 129 tanggal 27 November 1993, keduanya dibuat oleh Abdurachman Kadir, SH., Notaris pengganti dari Muhani Salim, SH.

Status Perusahaan mengalami perubahan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana tertuang dalam resolusi para pemegang saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 6 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Agus Madjid, SH. Dimana perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No. C-03880 HT.01.04.TH.2006, tanggal 13 Februari 2006.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi penyelenggaraan jasa telekomunikasi nasional dengan daerah operasi saat ini di Jakarta. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Bakrie, Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan. Perusahaan memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 November 1995.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Agustus 2008, ruang lingkup kegiatan Perusahaan telah diperluas yang meliputi; merencanakan, membangun dan menyewakan sarana/fasilitas telekomunikasi, melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana telekomunikasi, serta memperdagangkan perangkat/produk telekomunikasi.

**1 . GENERAL**

**a. Company Establishment**

*PT Bakrie Telecom Tbk (previously PT Radio Telepon Indonesia) (the "Company") was established in the Republic of Indonesia on August 13, 1993 within the framework of the Domestic Investment Law No. 6 Year 1968, as amended by Law No. 12 Year 1970 based on Notarial Deed No. 94, of Muhani Salim, SH., as amended by Amendment Notarial Deed No. 13 dated November 5, 1993 and amended by Notarial Deed No. 129 dated November 27, 1993, both made of Abdurachman Kadir, SH., substitute of Notary Muhani Salim, SH.*

*The Company's status was changed to that of a public company through the resolutions of the Company's shareholders as notarized by Deed No. 6 of Agus Madjid, SH., dated February 3, 2006. This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. C-03880 HT.01.04.TH.2006 dated February 13, 2006.*

*The scope of activities of the Company comprises the provision of telecommunication national services. The Company's operational areas currently in Jakarta. The Company is domiciled in Jakarta with its head office located at Wisma Bakrie, 3rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, South Jakarta. The Company started its commercial operations on November 1, 1995.*

*Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting held on August 11, 2008, the scope of activities of the Company was modified to comprise; planning, development and lease of telecommunication equipment/ facilities, marketing and sales activities of telecommunication network and/ or services, maintenance, research and development of telecommunication facilities, and selling of telecommunication products/ utilities.*

**1 . UMUM (lanjutan)**

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan modal dasar ditempatkan Perusahaan, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 dan No. 28 masing-masing tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH.

Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No.AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara No.98 Tambahan No. 43892 tanggal 6 November 2015, tanggal 7 Agustus 2015.

Untuk saat ini perusahaan memiliki ijin jasa koneksi internet (*Internet Service Provider / ISP*) dan ijin jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak seluler.

Pada tanggal 26 September 2014, Perusahaan memperoleh persetujuan pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz PT Bakrie Telecom Tbk kepada PT Smartfren Telecom Tbk, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular.

Perusahaan tergabung dalam Kelompok Usaha Bakrie.

**b. Penawaran Umum Saham Perdana**

Pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan mencatat sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Penawaran Umum Perdana Saham Seri B Atas Nama Tahun 2005 sebanyak lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham.

**1 . GENERAL (continued)**

*The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment in relation to the Company's Articles of Association that have been adapted to the Financial Services Authority (OJK) rules and the increase of authorized capital issued was based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 29, 2015, as stated in Deed of Resolution No. 27 and No. 28 which dated June 22, 2015 made before Lenny Janis Ishak, SH, Notary.*

*This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 and was published in the State Gazette No. 89, Supplement No. 43892 dated November 6, 2015. dated August 7, 2015.*

*The Company's currently has internet service provider licence / ISP and basic telephony services true mobile seluler network.*

*On September 26, 2014, the Company obtained approval permits for transfer the radio frequency spectrum bandwidth 800 Mhz of PT Bakrie Telecom Tbk to PT Smartfren Telecom Tbk, based on Decision Letter of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 in respect to Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 30 Year 2014 concerning Settlement 800 MHz Radio Frequency Band the Purpose of Implementation of Cellular Mobile Network.*

*The Company is part of the Bakrie Group.*

**b. Initial Public Offering**

*On February 3, 2006, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) through an Initial Public Offering (IPO) of five billion five hundred million (5,500,000,000) registered Shares Series B in Year 2005 with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.*

**1 . UMUM (lanjutan)**

Dalam rangka penawaran umum perdana ini, Perusahaan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak satu miliar seratus juta (1.100.000.000) lembar Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma yang menyertai seluruh saham Seri B atas nama. Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Seri B atas nama dengan harga pelaksanaan sebesar seratus tiga puluh lima rupiah (Rp135) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 3 Agustus 2006 sampai 2 Februari 2009.

Pada bulan Maret 2009, semua waran telah selesai dilaksanakan.

Penawaran Umum Saham Perdana tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 September 2005 dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 39 oleh Agus Madjid, SH.

**c. Penawaran Umum Terbatas (PUT)**

Pada tanggal 14 Februari 2008, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa keuangan melalui surat No. S-944/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350). PUT tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Februari 2008 dengan Akta Notaris No. 38 oleh Agus Madjid, SH., dan pada tanggal 29 Februari 2008, PUT tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

**d. Pembelian kembali (buy-back) Saham Perusahaan**

Pada tanggal 15 Oktober 2008, Direksi menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak satu koma satu triliun rupiah (Rp1,1 triliun) atau 20% dari modal disetor Perusahaan. Pembelian kembali saham tahap pertama akan dilakukan sebesar-besarnya seratus miliar rupiah (Rp100,0 miliar) dan pembelian kembali saham tahap kedua akan dilakukan sesuai dengan kemampuan, keperluan dan kondisi Perusahaan.

**1 . GENERAL (continued)**

*For the purposes of this public offering, the Company also simultaneously issued one billion one hundred million (1,100,000,000) Series I Warrants that were issued at no cost (naked warrants) accompanying the registered Series B shares. Series I Warrants gave the right to their holders to purchase Series B shares at an exercise price of one hundred and thirty-five rupiah (Rp135) per share, which could be exercised within the period of August 3, 2006 to February 2, 2009.*

*In March 2009, all warrants had been accomplished.*

*The IPO was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on September 23, 2005 and notarized by Deed No. 39 of Agus Madjid, SH.*

**c. Rights Issue**

*On February 14, 2008, the Company obtained the notice of effectiveness from the Chairman of the Financial Services Authority per letter No. S-944/BL/2008 dated February 14, 2008 of its Rights Issue for a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share. The Rights Issue, which was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on February 15, 2008 and notarized by Deed No. 38 of Agus Madjid, SH., was listed on the Indonesia Stock Exchange on February 29, 2008.*

**d. Buy-Back of the Company's Shares of Stock**

*On October 15, 2008, the Board of Directors approved the buy-back of the Company's shares up to a maximum of one point one trillion rupiah (Rp1.1 trillion) or 20% of the paid-in capital of the Company. The buy-back of shares of stock in the first phase worth of up to one hundred billion rupiah (Rp100.0 billion) and the second phase of the balance will be carried out according to the availability, needs and condition of the Company.*

**1 . UMUM (lanjutan)**

Pembelian kembali dilaksanakan dalam periode Oktober dan November tahun 2008, dimana sebanyak enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (689.425.500) lembar saham telah dibeli kembali, dan pada tahun 2009, sebanyak lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (579.425.500) lembar saham telah dijual kembali (Catatan 17).

**e. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD)**

Pada tanggal 22 Juni 2012 dan 29 Agustus 2012, Perusahaan menerbitkan saham Seri B dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham masing-masing sebesar lima ratus enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam (566.037.736) saham dan satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh (1.536.135.340) saham, untuk PT Bakrie Global Ventura, pihak berelasi melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) dengan harga pelaksanaan dua ratus enam puluh lima rupiah (Rp265) per saham.

**f. Struktur Entitas Anak**

Pada tanggal 11 Maret 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 03 dibuat oleh Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Bakrie Connectivity.

Ruang lingkup kegiatan Entitas Anak meliputi usaha perdagangan produk dan/atau perangkat telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyedia dan pemanfaatan multimedia dan jasa pengadaan sumber daya manusia, telekomunikasi serta media cetak.

Pada tanggal 11 Maret 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 04 dibuat oleh Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network). Perubahan nama Entitas Anak berdasarkan Akta Notaris No. 03 pada tanggal 9 September 2013. Pada tanggal 31 Desember 2015, Entitas Anak masih dalam tahap pengembangan.

Pada tanggal 19 April 2010, Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama Bakrie Telecom Pte., Ltd. Kantor Entitas Anak berlokasi di Singapura. Entitas Anak tidak memiliki kegiatan usaha lain selain memberikan jasa kepada Perusahaan dan memperoleh pendapatan dari jasa tersebut.

**1 . GENERAL (continued)**

*The buy-back was undertaken during the period of October and November 2008, during which time six hundred eighty-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (689,425,500) shares were bought back, and in 2009, five hundred seventy-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (579,425,500) shares were reissued (Note 17).*

**e. Capital Stock Issuance Through Non-Preemptive Right (PMT-HMETD)**

*On June 22, 2012 and August 29, 2012, the Company issued Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share amounting to five hundred sixty-six million, thirty-seven thousand, seven hundred thirty-six (566,037,736) shares and one billion, five hundred thirty-six million, one hundred thirty-five thousand, three hundred forty (1,536,135,340) shares, respectively, to PT Bakrie Global Ventura, a related party through Capital Stock Issuance Without Preemptive Right (PMT-HMETD) at an exercise price of two hundred sixty-five rupiah (Rp265) per share.*

**f. Structure of the Subsidiaries**

*On March 11, 2010, based on Notarial Deed No. 03, of Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., the Company established a Subsidiary, PT Bakrie Connectivity.*

*The scope of its Subsidiary activities consists of trading of products and/ or telecommunications equipment, services as information technology service providers, and the use of multimedia and human resources services, telecommunications and media.*

*On March 11, 2010, based on Notarial Deed No. 04, of Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., the Company established a Subsidiary, PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network). The change in name of the Subsidiary was based on Notarial Deed No. 03 dated September 9, 2013. As of December 31, 2015, this Subsidiary is still under the development stage.*

*On April 19, 2010, the Company established a Subsidiary, Bakrie Telecom Pte., Ltd. The registered office of the Subsidiary is located in Singapore. The Subsidiary has no other business operation than to provide services to the Company and earns revenue from it.*

**1 . UMUM (lanjutan)**

Pada tanggal 16 Juni 2016, berdasarkan Akta Notaris No. 09 dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Anugerah Andalan Investama (AAI).

Ruang lingkup kegiatan AAI adalah meliputi perdagangan produk dan jasa berbasis internet, internet provider, jasa penyediaan sumber daya manusia, jasa televisi berbayar, jasa multimedia, dan jasa media cetak dan elektronik.

Pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No 22 yang kemudian ditegaskan kembali dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2017 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI telah mengambil alih saham-saham pada PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK).

Ruang lingkup kegiatan MKK adalah meliputi perdagangan barang dan jasa antara lain perdagangan alat-alat telekomunikasi, elektronik, jasa pembangunan instalasi telekomunikasi, industri barang-barang elektronik, jasa penerbitan dan desain grafis, jasa teknologi informasi dan internet konten serta jasa multimedia.

MKK adalah selaku pemegang saham pada PT. Layanan Prima Digital (LPD) berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Agustus 2016 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No. 2 tanggal 28 Oktober 2016 yang keduanya dibuat oleh Firdhonal S.H.

Ruang lingkup kegiatan LPD meliputi perdagangan barang-barang elektronik dan telekomunikasi serta peralatan Jaringan, penyediaan jasa internet dan multimedia, jasa televisi berbayar, jasa telekomunikasi, jasa publikasi dan penyiaran, jasa e-commerce dan jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa-jasa terkait lainnya.

MKK adalah pemegang saham pada PT. Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 30 November 2019 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No. 58 tanggal 27 Desember 2019 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina S, SH, M.Kn.

Ruang lingkup kegiatan ITN dalam bidang perdagangan dan industri meliputi alat-alat telekomunikasi, informatika dan multimedia. Dalam bidang multimedia dan telekomunikasi meliputi pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi dan multimedia. Dalam bidang jasa perawatan meliputi perbaikan dan pemeliharaan alat-alat komunikasi dan multimedia dan jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi.

**1 . GENERAL (continued)**

*On June 16, 2016, based on Notarial Deed no. 09 of Ervina Christina Sembiring, SH.,M.Kn. The Company established a Subsidiary, PT Anugerah Andalan Investama (AAI).*

*The scope of AAI consist of trading and services internet product, internet provider, human resources services, subscription television services, multimedia services, and printing and electronic media services.*

*On December 27, 2016, based on Notarial Deed No. 22 reaffirmed with Notarial Deed No. 15 dated January 24, 2017 of Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, both of them, AAI has taken over PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK) shares.*

*The scope of MKK consist of trading goods and services such as telecommunication equipment, electronic, develop telecommunication instalation, electronic goods, services publications and graphic design, information technology services, and internet content with multimedia services.*

*MKK as a shareholders at PT. Layanan Prima Digital (LPD) based on Notarial Deed No. 8 dated August 31, 2016 reaffirmed with Notarial Deed No.2 dated October 28, 2016 of Firdhonal S.H both of them.*

*The scope of LPD consist of trading electronic telecommunication goods with and network equipment, internet and multimedia services provider, subscription television services, telecommunicaton services, publication and broadcasting services, e-commerce services, and multimedia services and utilize through the telecommunication and others related services.*

*MKK as a shareholders at PT. Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) based on Notarial Deed No. 48 dated November 30, 2019 reaffirmed with Notarial Deed No. 58 dated December 27, 2019 of Ervina Christina S, SH, M.Kn both of them.*

*The scope of ITN in trading and industry consist of telecommunication goods, informatika and multimedia. In multimedia and telecommunication consists of telecommunications and multimedia network infrastructure construction. In maintenance services consist of repair and maintenance of communication and multimedia telecommunications network maintenance services.*

**1 . UMUM** (lanjutan)

Dalam bidang jasa teknologi informasi dan internet content meliputi jasa televisi berbayar, televisi berlangganan, jasa akses internet dan jasa interkoneksi internet.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan sebagai berikut (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut sebagai "Kelompok Usaha"):

Entitas Anak / Subsidiaries	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Bidang Usaha / Scope of Activities	Saat Dimulainya Kegiatan Usaha Komersial / Start of Commercial Operation	Domisili / Domicile	Total Aset Sebelum Eliminasi / Total Asset Before Elimination	
					2019	2018
Kepemilikan Langsung / Direct Ownership :						
PT Bakrie Connectivity	99,99	Perdagangan Telekomunikasi / Telecommunication Trading	2010	Indonesia	1	1
PT Bakrie Digital Net	99,80	Infrastruktur Telekomunikasi / Telecommunication Infrastructure	-	Indonesia	511	511
Bakrie Telecom Pte., Ltd	100,00	Entitas Bertujuan Khusus / Special Pupose Entity	2010	Singapura/ Singapore	9.038.241	9.415.349
PT Anugerah Andalan Investama	99,80	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	15.645	9.173
Kepemilikan Tidak Langsung / Indirect Ownership :						
Melalui / Through AAI						
PT Mitra Kreasi Komunika	70,00	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	10.557	8.650

**g. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**1 . GENERAL** (continued)

*In information technology services and internet content consist of pay television services, pay television, internet access services and internet interconnection services.*

*As of December 31, 2019 and 2018 , the Company had ownership interest in Subsidiaries as follows (together with the Company herein after referred to as the "Group"):*

**g. Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee and Employees**

*The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 and 2018 was as follows:*

	2019	dan / and	2018	
<b>Dewan Komisaris</b>				<b>Board of Commissioners</b>
Komisaris Utama	Taufan E.N Rotorasiko		Anindya Novyan Bakrie	President Commissioner
Wakil Komisiner Utama	-		Gafur Sulistyono Umar	Vice President Commissioner
Komisaris	R. Bismarka Kurniawan		-	Commissioner
Komisaris Independen	John Pieter Nazar		Ai Mulyadi Mamoer	Independent Commissioner

1 . UMUM (lanjutan)

1 . GENERAL (continued)

g. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta  
 Karyawan (lanjutan)

g. Boards of Commissioners, Directors and Audit  
 Committee and Employees (continued)

	2019	dan / and	2018	
<b>Direksi</b>				<b>Board of Directors</b>
Direktur Utama	Harya Mitra Hidayat		R. Bismarka Kurniawan	President Director
Wakil Direktur Utama	-		Jastiro Abi	Vice President Director
Wakil Direktur Utama	-		Taufan E.N Rotorasiko	Vice President Director
Direktur Independen	-		W. Mark Robson	Independent Director
Direktur	Jastiro Abi		Harya Mitra Hidayat	Director
Direktur	Andi Pravidia Saliman		Andi Pravidia Saliman	Director
Direktur	W. Mark Robson		-	Director

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee and the sole Corporate Secretary as of December 31, 2019 and 2018 was as follows:

	2019	dan / and	2018	
<b>Komite Audit</b>				<b>Audit Committee</b>
Ketua	John Pieter Nazar		Ai Mulyadi Mamoer	Chairman
Anggota	Arydhian B Djamin		Arydhian B Djamin	Member
Anggota	Dwi Winarno		Dwi Winarno	Member
<b>Sekretaris Perusahaan</b>	Agustinus Harimurti			<b>Corporate Secretary</b>

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah karyawan Kelompok Usaha masing-masing adalah 67 dan 6 karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2019 and 2018, the Group had 67 and 6 employees, respectively (unaudited).

h. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

h. Completion of the Consolidated Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2020.

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on July 20, 2020.

2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN

2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority (OJK).

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, kecuali untuk penerapan pernyataan dan interpretasi baru dan revisi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017 seperti yang diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi dan interpretasi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 dan relevan bagi perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 3 (revisi 2016) "Laporan Keuangan"
- PSAK 24 (revisi 2016) "Imbalan Kerja"
- PSAK 58 (revisi 2016) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK 60 (revisi 2016) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"
- ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas – Prakarsa Pengungkapan"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan – Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*The accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2014, except for the adoption of new and revised statements and interpretations effective January 1, 2017 as described in the related accounting policies.*

*The adoption of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from January 1, 2017 and relevant for Company, but did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year financial statements:*

- *Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"*
- *PSAK 3 (revised 2016) "Financial Statements"*
- *PSAK 24 (revised 2016) "Employee Benefits"*
- *PSAK 58 (revised 2016) "Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation"*
- *PSAK 60 (revised 2016) "Financial Instruments: Disclosure"*
- *ISAK 31 "Interpretation on the scope of PSAK 13: Investment Property"*
- *ISAK 32 "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"*

*New standards, amendments and interpretations issued and relevant for company but not yet effective for the financial year begin or after the date January 1, 2017 are as follows:*

- *Amendment to PSAK 16 "Fixed Asset"*
- *Amendment to PSAK 2 "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative"*
- *Amendment to PSAK 46 "Taxation – Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealised Losses"*
- *Amendment to PSAK 62 "Insurance Contract"*
- *Amendment to PSAK 71 "Financial Instrument"*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

- Amandemen PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- Amandemen PSAK 73 "Sewa"

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perseroan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak tertentu.

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasi**

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian". Dengan diterbitkannya PSAK tersebut, PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" diubah namanya menjadi PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", dan juga menggantikan ISAK No. 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus".

Penerapan PSAK No. 65 tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*) menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan *investee*.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

- Amendment to PSAK 72 "Revenue from Contract with Customers"
- Amendment to PSAK 73 "Leases"

*As at the authorisation date of these financial statements, the Company is reviewing the implication of the above standards, to its financial statements.*

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other basis described in the related accounting policies.*

*The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities.*

*When the entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassified the items in its financial statements, the statements of financial position at the beginning of comparative period are presented.*

*The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its certain Subsidiaries.*

**b. Principles of Consolidation**

*Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements." With the issuance of such PSAK, PSAK No. 4 (Revised 2009), "Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements" was renamed to PSAK No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements," and ISAK No. 7, "Consolidation - Special Purpose Entities" was superseded.*

*The adoption of PSAK No. 65 has no impact in the Group's consolidated financial statements.*

*An entity (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) were present consolidated financial statements. Investors, apart of the nature of its involvement with an entity (investee), determine whether the investor is a parent by assessing whether the investor controls the investee.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee* .

Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee* ;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* ; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee* .

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
- (b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- (c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang adalah entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

*An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.*

*Therefore, the investor controls the investee if and only if the investor has all of the following:*

- (a) *power over the investee;*
- (b) *exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee; and*
- (c) *the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns.*

*Investors reassess whether the investor controls the investee if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.*

*Investee is consolidated from the date of the investor obtains control of investee and continues to be consolidated until the date that such control ceases.*

*A parent determines whether the parent entity is an investment entity. An investment entity is an entity that:*

- (a) *obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;*
- (b) *its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and*
- (c) *measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.*

*A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.*

*Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau (jika sesuai) biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

**c. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**d. Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai "Kas yang Dibatasi Penggunaannya." Kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dalam satu (1) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Rekening bank dan deposito berjangka lainnya yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai aset tidak lancar.

**e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

Kelompok Usaha mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*Total comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.*

*All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.*

*If a parent loses control of a subsidiary, the parent:*

- (a) *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statements of financial position.*
- (b) *recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.*
- (c) *recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.*

**c. Cash and Cash Equivalents**

*Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral nor restricted in use.*

**d. Restricted Cash**

*Cash in banks and time deposits, which are restricted in use, are presented as "Restricted Cash." Restricted cash to be used to pay currently maturing obligations that are due within one (1) year are presented under current assets. Other current accounts and time deposits that are restricted in use are presented under non-current assets.*

**e. Transaction with Related Parties**

*The Group discloses transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures."*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**f. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*), dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

**g. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**h. Aset Tetap**

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	<b>Masa Manfaat / Economic Life Tahun / Years</b>	<b>Persentase Penyusutan / Percentage of Depreciation</b>	
Bangunan	20	20	<i>Building</i>
Peralatan telekomunikasi	5	5	<i>Telecommunication equipment</i>
Fasilitas telekomunikasi	5	5	<i>Telecommunication facilities</i>
Peralatan pengangkutan	5	5	<i>Transportation equipment</i>
Peralatan dan perabot kantor	4-5	4-5	<i>Office equipment and fixtures</i>
Aset sewaan	10	10	<i>Leased assets</i>

Masa manfaat ekonomis aset tetap dan metode depresiasi ditelaah, dan disesuaikan jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun. Sebelum tahun 2014, masa manfaat aset tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

*The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.*

*All significant transactions with related parties whether or not conducted under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.*

**f. Inventories**

*Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by the weighted-average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.*

**g. Prepaid Expenses**

*Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.*

**h. Fixed Asset**

*The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.*

*Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:*

*The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, at each end of the reporting period.*

*As of December 31, 2015 and 2014, the Group estimated the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years. Prior 2014, the useful lives of those assets were 10 (ten) years.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak disusutkan.

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**i. Sewa**

Sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, sewa pembiayaan dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan pada laba rugi. Aset sewaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan dicatat pada akun aset tetap dan disusutkan sepanjang masa manfaat dari aset sewaan tersebut atau periode masa sewa, mana yang lebih pendek, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Dalam hal transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*Land is stated at cost and is not depreciated.*

*Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.*

*The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.*

**i. Lease**

*Leases that transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item to the lessee are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or at the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than the fair value. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recorded in profit or loss. Leased assets held by the lessee under finance leases are included in fixed assets and depreciated over the estimated useful life of the assets or the lease term, whichever is shorter, if there is no reasonable certainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term.*

*In the case of sale and leaseback results in a finance lease, this is to be treated as two separate transactions, i.e. sale and lease. The excess of sales proceeds over the carrying amount is deferred and amortized over the lease term.*

*Leases that do not transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

**j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

PSAK No. 48 (Revisi 2014) menitikberatkan pada pengungkapan atas nilai terpulihkan untuk aset non-keuangan. Pernyataan yang direvisi mensyaratkan pengungkapan informasi tambahan jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset non-keuangan selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

**k. Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi tertentu terhadap pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**j. Impairment of Non-Financial Assets**

*Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets."*

*PSAK No. 48 (Revised 2014) focuses on the recoverable amount disclosures for non-financial assets. The revised statement requires additional disclosure of information if the recoverable amount represents the fair value less costs of disposal.*

*The Group evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.*

*Reversal on impairment loss for non-financial assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized on profit or loss, except for assets that presented using the revaluation model in accordance with other PSAK. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.*

**k. Borrowing Costs**

*Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.*

*For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying asset.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

**I. Jaminan**

Jaminan merupakan uang jaminan yang dibayarkan untuk sewa lokasi untuk menara *Base Transceiver Stations* (BTS), sewa gedung kantor dan apartemen sesuai dengan perjanjian dan akan dikembalikan pada saat berakhirnya periode sewa.

**m. Segmen Operasi**

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa CDMA Mobile dan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 19 dan 31).

**n. Saham Beredar Yang Diperoleh Kembali**

Saham beredar yang diperoleh kembali (*treasury stock*) untuk dikeluarkan lagi di kemudian hari dicatat dengan metode nilai nominal atau *par value method*. Berdasarkan metode ini, saham beredar yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Apabila saham beredar yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun tambahan modal disetor akan disesuaikan. Selisih lebih harga perolehan dari harga penerbitannya akan dikoreksi ke saldo laba.

**o. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak penjualan (PPN).

**Pendapatan Jasa Telekomunikasi**

Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan dari jasa penyambungan diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan sedangkan pendapatan pulsa serta pendapatan bulanan diakui pada saat terjadinya.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**I. Security Deposits**

*Security deposits represent guarantee for field rental of Base Transceiver Stations (BTS), office building rent and apartment rent in accordance with the agreements, which will be returned at the end of the rental period.*

**m. Operating Segment**

*The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board of Directors reviews the Company's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board of Directors considers the business from the return of invested capital perspective. Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment that provides CDMA Mobile and telecommunications network services to its customers. Further details are disclosed in (Notes 19 and 31).*

**n. Treasury Stock**

*Re-acquisition of capital stock to be held as treasury stocks for future reissuance is accounted for under the par value method. Under this method, treasury stock is presented at par value as a reduction from the capital stock account. If the treasury stock had been originally issued at a price above par value, the related additional paid-in capital account is adjusted. Any excess of the reacquisition cost over the original issuance price is treated as an adjustment to retained earnings.*

**o. Revenue and Expense Recognition**

*Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and sales taxes (VAT).*

**Telecommunication Services**

*For post-paid subscribers, revenues from connection services are recognized as income at the time the connections take place, while usage airtime and monthly subscription charges are recognized when earned.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Pendapatan kartu pra bayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana dan kartu pulsa isi ulang diakui sebagai berikut:

- \* Penjualan kartu perdana diakui sebagai pendapatan saat penyerahan kepada agen penjual atau penjualan langsung kepada pelanggan akhir.
- \* Penjualan kartu pulsa isi ulang (pra bayar) diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan diakui secara proporsional sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat kartu telah habis masa berlakunya.

**Pendapatan Interkoneksi**

Pendapatan dari interkoneksi, yang didasarkan pada perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional, diakui berdasarkan trafik sebenarnya yang tercatat dan disajikan sebesar pendapatan bruto (*gross*).

**Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat penyerahan jasa tersebut.

**Beban**

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**p. Imbalan Kerja**

Kelompok Usaha menentukan liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("Undang-undang") tanggal 25 Maret 2003. PSAK No. 24 (Revisi 2013) mensyaratkan entitas menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*Revenues from pre-paid cards, which consist of sale of starter packs and pulse reload vouchers, are recognized as follows:*

- \* *Starter pack sales are recognized as revenue upon delivery of starter packs to dealers or directly to customers.*
- \* *Pulse reload vouchers (pre-paid) sales are initially recorded as unearned revenue and then proportionally recognized as usage revenue based on successful calls made by the subscribers or whenever the unused stored value of the voucher has expired.*

**Interconnection Revenues**

*Revenues from network interconnection, which are based on agreements with other domestic and international telecommunication carriers are recognized based on the actual recorded traffic and are presented on a gross basis.*

**Other Revenues**

*Revenues from other services are recognized when the services are rendered.*

**Expenses**

*Expenses are recognized when incurred (accrual basis).*

**p. Employee Benefits**

*The Group determines its employee benefits liabilities under the Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("the Law"). PSAK No. 24 (Revised 2013) requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.*

*When an entity has a surplus in a defined benefit plan, an entity measures the defined benefit asset at the lower amount between the surplus of defined benefit plan and the upper limit on assets that determined using a discount rate.*

*An entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAKs require or permit such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Kelompok Usaha mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi. Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program. Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, Kelompok Usaha mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

- (a) *service cost in profit or loss;*
- (b) *net interest on net liability (asset) of defined benefits in profit or loss; and*
- (c) *remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.*

*Remeasurement on net liability (asset) of defined benefits that is recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.*

*Remeasurement the net liability (asset) of defined benefits consists of:*

- (a) *actuarial gains and losses;*
- (b) *return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and*
- (c) *any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).*

*The entity recognizes past service cost as an expense in an earlier of when the amendments or curtailment of program occurs and when the entity recognizes related restructuring costs or severances.*

*The Group recognizes gains or losses on the settlement of defined benefit plan when it occurs. A curtailment occurs when an entity make a material reduction in the number of employees covered by a plan; or amending the terms of a defined benefit plan so a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits. A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan. Before determining the past service cost, gains or losses on the settlement, the Group shall remeasure the net liability (asset) of defined benefits using current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) which reflects the rewards offered in the program prior to amendment, curtailment or settlement program.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

**q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Pembukuan Entitas Anak tertentu diselenggarakan dalam mata uang asing. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Entitas Anak pada tanggal pelaporan dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan, dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan penghasilan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Selisih kurs yang terjadi diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada akun "Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan".

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Dolar AS	13.901
Dolar Singapura	10.321

**r. Pajak Penghasilan**

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**q. Foreign Currency Transactions and Balances**

*Transactions in foreign currencies are translated into functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. Gains or losses resulted from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current period profit or loss.*

*The books of accounts of certain Subsidiaries are maintained in foreign currencies. For consolidation purposes, assets and liabilities of the Subsidiaries at the reporting date are translated into Rupiah, which is the presentation currency, using the exchange rates at that date, while income and expenses are translated at the transaction rates of exchange. Resulting translation adjustments are recognized in other comprehensive income under "Exchange Differences due to Financial Statements Translation" account.*

*The closing exchange rates used as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:*

	<u>2018</u>	
	14.481	US Dollar
	10.603	Singapore Dollar

**r. Income Taxes**

*Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes." The adoption of this revised PSAK has no impact in the Group's consolidated financial statements.*

*Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period.*

*Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

**s. Laba atau Rugi per Saham**

Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.*

*Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

*Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Group, when the result of the objection and/or appeal is determined.*

**s. Earnings or Losses per Share**

*Basic earnings or losses per share are calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

**t. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

**u. Instrumen Keuangan**

**1. Aset Keuangan**

Pengakuan Awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi yang pada awalnya diukur dengan nilai wajar. Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awal dan, sepanjang diperbolehkan dan diperlukan, ditelaah kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengakuan Selanjutnya

\* Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**t. Provisions and Contingencies**

*Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

*Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.*

**u. Financial Instruments**

**1. Financial Assets**

Initial Recognition

*Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss which are initially measured at fair value. Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL), held-to-maturity (HTM) investments, loans and receivables or available-for-sale (AFS) financial assets. The Group determines the classification of their financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each end of reporting period.*

Subsequent measurement

\* *Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

\* Investasi HTM

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Kelompok Usaha mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

\* Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

*Financial assets are classified as at FVTPL where the financial assets are either held for trading or they are designated as FVTPL at initial recognition. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at FVTPL are carried on the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The gains or losses recognized in profit or loss include any dividend or interest earned from the financial assets.*

\* *HTM investments*

*Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. Gains or losses are recognized in profit or loss when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

\* *Loans and receivables*

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted on an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

\* Aset keuangan AFS

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Akan tetapi, bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas (12) bulan dari tanggal pelaporan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah aset keuangannya mengalami penurunan nilai.

\* Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka jumlah kerugian tersebut, yang diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang dihitung saat pengakuan awal aset tersebut, diakui pada laba rugi.

\* Aset keuangan AFS

Jika terdapat bukti obyektif bahwa aset AFS mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

\* *AFS financial assets*

*AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial recognition, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses being recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and gains or losses due to changes in exchange rates, until the financial assets are derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously reported in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments. However, interest is calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss. These financial assets are classified as non-current assets unless the intention is to dispose of them within twelve (12) months from the reporting date.*

*Impairment of financial assets*

*The Group evaluates at the end of each reporting period whether any of their financial asset is impaired.*

\* *Financial assets measured at amortized cost*

*If there is objective evidence of impairment, the amount of loss, which is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred) discounted at the effective interest rate computed at initial recognition of the asset, is recognized in profit or loss.*

\* *AFS financial assets*

*If there is objective evidence that an AFS financial asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments even though such financial asset is not derecognized.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Kelompok Usaha mengalihkan aset keuangan, maka Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

**2. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Pengakuan Awal

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau sebagai derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha dicatat sebesar hasil yang diperoleh, dikurangi biaya penerbitan instrumen ekuitas.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

Derecognition of financial assets

*The Group derecognizes financial assets if, and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but assumes a contractual obligation to pay those cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Group transfers a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.*

**2. Financial Liabilities and Equity Instruments**

Initial Recognition

*The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition. Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.*

*Financial liabilities are classified as financial liabilities at FVTPL, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.*

*An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, dipisahkan antara liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi dengan menggunakan suku bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen *non-convertible* yang serupa.

Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas dengan dasar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan liabilitas tersebut berakhir melalui konversi atau pada tanggal instrumen jatuh tempo. Komponen ekuitas ditentukan dengan cara mengurangi jumlah komponen liabilitas dari keseluruhan nilai wajar instrumen keuangan majemuk. Jumlah tersebut diakui dan dicatat dalam ekuitas.

Pengukuran selanjutnya

(a) Liabilitas keuangan FVTPL  
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada FVTPL. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali liabilitas derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dinyatakan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi termasuk bunga yang dibayar atas liabilitas keuangan.

(b) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

*Compound financial instruments, a bond or similar instrument convertible by the holder into a fixed number of ordinary shares, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. At the date of issuance of compound financial instruments, the fair value of the liability component is estimated using the prevailing market interest rate for a similar non-convertible instrument.*

*This amount is recorded as a liability on an amortized cost basis using the effective interest method until extinguished upon conversion or at the instrument's maturity date. The equity component is determined by deducting the amount of the liability component from the fair value of the compound financial instruments as a whole. This amount is recognized and included in equity.*

Subsequent measurement

(a) *Financial liabilities at FVTPL*  
*Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL. Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The gains or losses recognized in profit or loss incorporate any interest paid on the financial liabilities.*

(b) *Financial liabilities measured at amortized cost*

*After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Kelompok Usaha dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

**3. Instrumen Derivatif**

Instrumen derivatif dicatat pada pengakuan awal sebesar nilai wajar pada tanggal perjanjian derivatif ditandatangani dan diukur kembali setiap akhir periode laporan. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif dan liabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

Derivatif melekat disajikan dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang mencerminkan penyajian yang memadai atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan. Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan atau kontrak awal diperlakukan sebagai derivatif yang berbeda saat risiko dan karakteristiknya tidak saling berhubungan dengan kontrak utamanya dan kontrak utama tersebut tidak diukur dengan nilai wajar serta perubahan pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa periode jatuh tempo dari instrumen tersebut lebih dari dua belas (12) bulan dan tidak diharapkan untuk direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui sebagai laba tahun berjalan, kecuali seluruh persyaratan khusus (contoh, dokumen formal, penetapan dan pengukuran keefektifan transaksi) untuk diakui sebagai "Penghasilan Komprehensif Lainnya" sesuai dengan tipe akuntansi lindung nilai tertentu terpenuhi.

Seluruh instrumen derivatif Kelompok Usaha tidak memenuhi kriteria khusus untuk akuntansi lindung nilai, dan oleh karenanya, tidak ditentukan sebagai transaksi lindung nilai untuk tujuan akuntansi.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*Derecognition of financial liabilities.*

*The Group derecognizes financial liabilities if, and only if, the Group's obligations are discharged, cancelled or expire.*

**3. Derivative Instruments**

*Derivative instruments are initially recognized at fair value as at the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured to their fair value at each end of reporting period. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.*

*Embedded derivative is presented with the host contract on the consolidated statements of financial position which represents an appropriate presentation of overall future cash flows for the instrument taken as a whole. Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts are treated as separate derivatives when their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value, with changes in fair value recognized in profit or loss.*

*A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than twelve (12) months and it is not expected to be realized or settled within twelve (12) months.*

*Gains or losses arising from changes in the fair value of the derivative instrument be recognized currently in earnings, unless meeting all the specific requirements (i.e., formal documentation, designation and assessment of the effectiveness of the transaction) to allow deferral as "Other Comprehensive Income" under certain types of hedge accounting.*

*None of the derivative instruments of the Group qualifies the specific criteria for hedge accounting, and therefore, are not designated as hedges for accounting purposes.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**4. Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**4. Offsetting of financial instruments**

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

**5. Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**5. Financial instruments measured at amortized cost**

*Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.*

**6. Pengukuran Nilai Wajar**

PSAK No. 68 bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi kompleksitas dengan memberikan definisi yang tepat dari nilai wajar dan sumber tunggal pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan untuk digunakan di seluruh PSAK. Persyaratan ini tidak memperluas penggunaan akuntansi nilai wajar namun memberikan pedoman tentang bagaimana hal tersebut diterapkan ketika penggunaannya sudah disyaratkan atau diizinkan oleh pernyataan lain dalam PSAK. Akibatnya, pedoman dan persyaratan yang berkaitan dengan pengukuran nilai wajar yang sebelumnya terletak di PSAK lain kini telah dipindahkan ke PSAK No. 68. PSAK No. 68 tidak berpengaruh material pada pengukuran nilai wajar aset atau liabilitas Kelompok Usaha, dimana perubahannya terbatas pada penyajian dan pengungkapan, dan oleh karena itu tidak berdampak dalam posisi keuangan atau kinerja Kelompok Usaha.

**6. Fair Value Measurement**

*PSAK No. 68 aims to improve consistency and reduce complexity by providing a precise definition of fair value and a single source of fair value measurement and disclosure requirements for use across PSAK's. The requirements do not extend the use of fair value accounting but provide guidance on how it should be applied where its use is already required or permitted by other statements within PSAKs. As a result, the guidance and requirements relating to fair value measurement that were previously located in other PSAKs have now been relocated to PSAK No. 68. PSAK No. 68 did not materially affect any fair value measurements of the Group's assets or liabilities, with changes being limited to presentation and disclosure, and therefore has no effect on the Group's financial position or performance.*

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain pada tanggal pengukuran.

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants in the principal (or most advantageous market) at the measurement date under current market conditions (i.e. an exit price) regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique at the measurement date.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- (a) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- (b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

Kelompok Usaha mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Hirarki nilai wajar dikategorikan dalam tiga (3) level input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, sebagai berikut:

- (a) Input Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- (b) Input Level 2 – input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (c) Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*A fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:*

- (a) in the principal market for the asset or liability; or*
- (b) in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

*The Group measures the fair value of an asset or a liability using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

*A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.*

*The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

*Fair value hierarchy are categorized into three (3) levels the inputs to valuation techniques used to measure fair value, as follows:*

- (a) Level 1 inputs - quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.*
- (b) Level 2 inputs – inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.*
- (c) Level 3 inputs - unobservable inputs for the asset or liability.*

*For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

Kelompok Usaha menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

**v. Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak**

PSAK 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak, dimana entitas dapat memilih menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK lain yang relevan dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak atau menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 70.

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masuk harus dibayarkan oleh Kelompok Usaha sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Kelompok Usaha untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

*The Group determines appropriate classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability, and the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized.*

**v. Accounting for tax amnesty assets and liabilities**

*PSAK 70 "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities" sets the accounting treatment for assets and liabilities arising from tax amnesty, in which entity is allowed to choose between accounting policy as prescribed by other relevant SAK's in recognition, measurement, presentation, and disclosure of tax amnesty assets and liabilities, and accounting policy prescribed in PSAK 70.*

*The Group had adopting this PSAK and had completed the requirement regarding accounting for Tax Amnesty and Liabilities information.*

*Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Minister of Finance of Republic Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.*

*Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.*

*Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.*

*The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives SKPP.*

*After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classifications of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Sehubungan dengan asset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui, Kelompok Usaha mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- (a) Tanggal SKPP;
- (b) Jumlah yang diakui sebagai asset pengampunan pajak sesuai SKPP;
- (c) Jumlah yang diakui sebagai liabilitas pengampunan pajak, (jika ada).

**3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa,
- dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas,
- yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa,

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*With respect to tax amnesty assets and liabilities recognized, the Group disclose the following in its financial statements:*

- (a) The date of SKPP;*
- (b) Amount recognized as tax amnesty assets in accordance with SKPP;*
- (c) Amount recognized as tax amnesty liabilities, (if any).*

**3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS**

*The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.*

*The Group based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.*

*The following judgments, estimates and assumptions made by management in the process of applying the Group's accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:*

Determining functional currency

*The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiary include, among others, the currency:*

- that mainly influences sales prices for goods and services;*
- of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services;*
- that mainly influences labor, material and other costs of providing goods or services;*

**3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Kelompok Usaha, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah (Rp), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Kelompok Usaha dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi dan harga jual barang dalam mata uang Rupiah.

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada (Catatan 2).

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Kelompok Usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 28).

**3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (continued)**

- *in which funds from financing activities are generated; and*
- *in which receipts from operating activities are usually retained.*

*Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah (Rp), as this reflected the fact that majority of the Group's businesses are influenced by primary economic environment in which the Group operates and sales prices for goods in Rupiah currency.*

*Determining classification of financial assets and financial liabilities*

*The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in (Note 2).*

*Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments*

*The Group records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which require the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization were determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilized different valuation methodology or assumption. Such changes would directly affect the Group's profit or loss. Further details are disclosed in (Note 28).*

**3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Kelompok Usaha mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 6).

Menilai jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan (Catatan 8).

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur  
manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara empat (4) sampai dengan dua puluh (20) tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 2h dan 8).

**3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (continued)**

Assessing recoverable amounts of financial assets

*The Group evaluates specific accounts receivable where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce their receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the provision for impairment. Further details are disclosed in (Note 6).*

Assessing recoverable amounts of non-financial assets

*Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.*

*The recoverable amounts of fixed assets is based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the provision of impairment already booked (Note 8).*

Determining depreciation method and estimated useful  
lives of fixed assets

*The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within four (4) to twenty (20) years. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in (Notes 2h and 8).*

**3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 25).

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 27).

Mengevaluasi perjanjian sewa

Kelompok Usaha menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Kelompok Usaha. Sewa guna usaha dimana Kelompok Usaha memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Kelompok Usaha terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasihat hukum Kelompok Usaha yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Kelompok Usaha mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada.

**3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (continued)**

*As of December 31, 2014, the Group estimated that the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years.*

*Determining income taxes*

*Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in (Note 25).*

*Estimate of pension cost and employee benefits*

*The determination of the Group's liabilities and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on their selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. While the Group believes that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect their employee benefits liability and expense. Further details are discussed in (Note 27).*

*Evaluating lease agreements*

*The Group has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Group. Lease wherein the Group acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as finance lease; otherwise it is accounted for as operating lease.*

*Evaluating provisions and contingencies*

*The Group involved in various legal and tax proceedings. The management exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies mainly through consultation with the Group's legal counsel handling those proceedings. The Group sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any.*

**3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Kelompok Usaha tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 25 dan 35).

**3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (continued)**

*In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset."*

*The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.*

*As of December 31, 2019, the Group did not believe that those proceedings will have a significant adverse effect on the consolidated financial statements. Further details are discussed in (Notes 25 and 35).*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
*Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated*

**4 . KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2019</u>
Kas	
Rupiah	21
Dolar AS	<u>10</u>
Total Kas	<u><u>31</u></u>
Kas di bank	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Central Asia Tbk	491
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	185
PT Bank Permata Tbk	110
PT Bank Bukopin Tbk	1
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 20 juta)	<u>9</u>
Sub - total	<u>796</u>
<u>Dolar AS</u>	
PT Bank Permata Tbk	14
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 20 juta)	<u>25</u>
Sub - total	<u>39</u>
Total Kas di Bank	<u>835</u>
<b>Total</b>	<b><u><u>866</u></u></b>

Kas dan setara kas seluruhnya ditempatkan pada pihak ketiga.

**5 . KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 30 Agustus 2012 dan adendumnya tanggal 12 November 2012, dengan Credit Suisse (Singapore) Limited (CS), facility agent, Perusahaan melakukan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya di CS yang akan digunakan oleh Perusahaan untuk membayar angsuran pokok termasuk bunga pinjaman (Catatan 33). Pada tahun 2014, facility agent berubah dari CS menjadi Madison Pacific Trust Limited.

Berdasarkan perjanjian perwalian dengan The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) sehubungan dengan penunjukan BNY Mellon sebagai wali amanat, agen pembayaran dan pelaku pendaftaran "11,50% Guaranteed Senior Notes due 2015" (selanjutnya disebut "Wesel Senior") (Catatan 13), penempatan kas yang dibatasi penggunaannya di BNY Mellon akan digunakan untuk membayar bunga pinjaman Wesel Senior.

Total kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp40,0 juta dan Rp40,0 juta.

**4 . CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<u>2018</u>	
		Cash on hand
	19	Rupiah
	<u>10</u>	US Dollar
	<u>29</u>	Total Cash on Hand
		Cash in banks
		<u>Rupiah</u>
	1	PT Bank Central Asia Tbk
	142	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	91	PT Bank Permata Tbk
	1	PT Bank Bukopin Tbk
	<u>11</u>	Others (each below Rp 20 million)
	<u>246</u>	Sub - total
		<u>US Dollar</u>
	9	PT Bank Permata Tbk
	<u>26</u>	Others (each below Rp 20 million)
	<u>35</u>	Sub - total
	<u>281</u>	Total Cash in Banks
	<b><u><u>310</u></u></b>	<b>Total</b>

All cash and cash equivalents were placed with third parties.

**5 . RESTRICTED CASH**

In accordance with the credit agreement dated August 30, 2012 and amendment dated November 12, 2012, with Credit Suisse (Singapore) Limited (CS), facility agent, the Company made placement of restricted cash in CS that will be used for installment payment of principle including interest on the loan facility (Note 33). In 2014, the facility agent changed from CS to Madison Pacific Trust Limited.

Based on a trustee agreement with The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) appointing BNY Mellon as the trustee, paying agent and registrar of "11.50% Guaranteed Senior Notes due 2015" (thereafter referred to as the "Senior Notes") (Note 13), placement of restricted cash was made in BNY Mellon that will be used for the payment of interest on the Senior Notes.

The total outstanding balances of restricted cash as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp40.0 million and Rp40.0 million, respectively.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated)

**6 . PIUTANG USAHA**

	<u>2019</u>
Jasa interkoneksi	17.456
Jasa telekomunikasi	<u>57.645</u>
<b>Total</b>	<b>75.101</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(72.741)</u>
<b>Neto</b>	<b><u>2.360</u></b>

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Rupiah	59.679
Dolar AS	<u>15.422</u>
<b>Total</b>	<b>75.101</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(72.741)</u>
<b>Neto</b>	<b><u>2.360</u></b>

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Sampai dengan 30 hari	-
Lebih dari 30 hari - 60 hari	-
Lebih dari 60 hari - 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	<u>2.360</u>
<b>Total</b>	<b><u>2.360</u></b>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang seluruhnya berdasarkan penilaian secara individual adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Saldo awal tahun	72.204
Penyisihan selama tahun berjalan	<u>537</u>
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b><u>72.741</u></b>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

**7 . UANG MUKA**

Uang muka operasional departemen merupakan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo atas akun ini masing-masing sebesar Rp714 juta dan Rp313 juta.

**6 . TRADE RECEIVABLES**

	<u>2018</u>	
Jasa interkoneksi	16.932	<i>Interconnection services</i>
Jasa telekomunikasi	<u>56.225</u>	<i>Telecommunication services</i>
<b>Total</b>	<b>73.157</b>	<b>Total</b>
Dikurangi penyisihan kerugian impairment loss	<u>(72.204)</u>	<i>Less allowance for impairment loss</i>
<b>Net</b>	<b><u>953</u></b>	<b>Net</b>

Trade receivables based on currencies are as follows:

	<u>2018</u>	
Rupiah	58.134	<i>Rupiah</i>
US Dollar	<u>15.023</u>	<i>US Dollar</i>
<b>Total</b>	<b>73.157</b>	<b>Total</b>
Dikurangi penyisihan kerugian impairment loss	<u>(72.204)</u>	<i>Less allowance for impairment loss</i>
<b>Net</b>	<b><u>953</u></b>	<b>Net</b>

The aging schedule of trade receivables was as follows:

	<u>2018</u>	
Sampai dengan 30 hari	-	<i>Up to 30 days</i>
Lebih dari 30 hari - 60 hari	-	<i>Over 30 days - 60 days</i>
Lebih dari 60 hari - 90 hari	-	<i>Over 60 days - 90 days</i>
Lebih dari 90 hari	<u>953</u>	<i>Over 90 days</i>
<b>Total</b>	<b><u>953</u></b>	<b>Total</b>

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables which were wholly based on individual assessments were as follows:

	<u>2018</u>	
Saldo awal tahun	70.811	<i>Beginning balance for the year</i>
Penyisihan selama tahun berjalan	<u>1.393</u>	<i>Provision during the year</i>
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b><u>72.204</u></b>	<b>Ending Balance for the Year</b>

The management believed that allowance for impairment loss of receivables was adequate to cover impairment losses on uncollectible trade receivables.

**7 . ADVANCES**

Operational department represents advances that have not yet been settled by the related departments. In December 31, 2019 and 2018 the amount of this account is Rp714 million and Rp313 million, respectively.

8 . ASET TETAP

8 . FIXED ASSETS

	2019					
	Saldo 1 Januari /	Penambahan /	Pengurangan /	Reklasifikasi /	Saldo 31 Desember /	
	Balance as of January 1, 2019				Additions	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Cost is</b>
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	12.674	-	-	-	12.674	Building
Peralatan						Telecommunication
telekomunikasi	11.636.422	-	-	-	11.636.422	equipment
Fasilitas						Telecommunication
telekomunikasi	1.408.240	-	-	-	1.408.240	facilities
Peralatan pengangkutan	13.725	-	-	-	13.725	Transportation equipment
Peralatan dan perabot						Office equipment and
kantor	137.528	54	-	-	137.582	fixtures
<b>Total Biaya Perolehan</b>	<b>13.208.865</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.208.919</b>	<b>Total Acquisition Costs</b>
<b>Akumulasi</b>						<b>Accumulated</b>
<b>Penyusutan</b>						<b>Depreciation</b>
Pemilikan langsung						Direct Ownership
Bangunan	12.457	125	-	-	12.582	Building
Peralatan						Telecommunication
telekomunikasi	8.609.065	-	-	-	8.609.065	equipment
Fasilitas						Telecommunication
telekomunikasi	598.267	-	-	-	598.267	facilities
Peralatan pengangkutan	13.712	-	-	-	13.712	Transportation equipment
Peralatan dan perabot						Office equipment and
kantor	137.235	228	-	-	137.463	fixtures
<b>Total Akumulasi</b>						<b>Total Accumulated</b>
Penyusutan	9.370.736	353	-	-	9.371.089	Depreciation
<b>Penurunan Nilai</b>						<b>Impairment of</b>
<b>Aset Tetap</b>						<b>Fixed Assets</b>
Peralatan						Telecommunication
telekomunikasi	3.027.432	-	-	-	3.027.432	equipment
Fasilitas						Telecommunication
telekomunikasi	809.973	-	-	-	809.973	facilities
<b>Total Penurunan</b>						<b>Total Impairment of</b>
<b>Nilai Aset Tetap</b>	<b>3.837.405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.837.405</b>	<b>Fixed Assets</b>
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>724</b>				<b>425</b>	<b>Carrying Amounts</b>

	2018					
	Saldo 1 Januari /	Penambahan /	Pengurangan /	Reklasifikasi /	Saldo 31 Desember /	
	Balance as of January 1, 2018				Additions	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Cost is</b>
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	12.674	-	-	-	12.674	Building
Peralatan						Telecommunication
telekomunikasi	11.636.422	-	-	-	11.636.422	equipment
Fasilitas						Telecommunication
telekomunikasi	1.408.240	-	-	-	1.408.240	facilities
Peralatan pengangkutan	13.725	-	-	-	13.725	Transportation equipment

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
*Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated*

**8 . ASET TETAP (lanjutan)**

**8 . FIXED ASSET (continued)**

	2018				Saldo 31 Desember / Balance as of December 31, 2018	
	Saldo 1 Januari / Balance as of January 1, 2018	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassifications		
Peralatan dan perabot kantor	137.455	73	-	-	137.528	Office equipment and fixtures
Total Biaya Perolehan	13.208.792	73	-	-	13.208.865	Total Acquisition Costs
<b>Akumulasi</b>						<b>Accumulated</b>
<b>Penyusutan</b>						<b>Depreciation</b>
Pemilikan langsung						Direct Ownership
Bangunan	11.959	498	-	-	12.457	Building
Peralatan						Telecommunication equipment
telekomunikasi	8.609.065	-	-	-	8.609.065	Telecommunication equipment
Fasilitas						Telecommunication facilities
telekomunikasi	598.267	-	-	-	598.267	Telecommunication facilities
Peralatan pengangkutan	13.081	631	-	-	13.712	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	136.544	691	-	-	137.235	Office equipment and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	9.368.916	1.820	-	-	9.370.736	Total Accumulated Depreciation
<b>Penurunan Nilai Aset Tetap</b>						<b>Impairment of Fixed Assets</b>
Peralatan						Telecommunication equipment
telekomunikasi	3.027.432	-	-	-	3.027.432	Telecommunication equipment
Fasilitas						Telecommunication facilities
telekomunikasi	809.973	-	-	-	809.973	Telecommunication facilities
Total Penurunan Nilai Aset Tetap	3.837.405	-	-	-	3.837.405	Total Impairment of Fixed Assets
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>2.471</b>				<b>724</b>	<b>Carrying Amounts</b>

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp353 dan Rp1.820.

*Depreciation expense for years ended as of December 31, 2019 and 2018 was charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp353 and Rp1,820, respectively.*

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait (Catatan 34).

*Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables (Note 34).*

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa. Oleh karena itu pada tahun 2015, seluruh aset sewaan telah dihapusbukukan.

*In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Therefore, in 2015, all leased assets were written off.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated)

**9 . ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

	<u>2019</u>
Jaminan pelunasan kewajiban pembayaran biaya frekuensi terutang (Catatan 33b)	-
Lisensi (Catatan 15)	200.917
Goodwill	4.763
Jaminan pelunasan	529
Lain - lain	7.636
<b>Total</b>	<b>213.845</b>
Penurunan nilai	(202.752)
<b>Total</b>	<b>11.093</b>

Pada tanggal 14 Oktober 2010, Perusahaan dan Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Postel menandatangani Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio No. 2149/BA/DITFREK/10/2010 dilakukan untuk menghitung kembali biaya perijinan (BHP Frekuensi Radio) dengan melakukan klarifikasi antara data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dari tahun 2006 sampai dengan pisah batas tanggal 30 September 2010, dan untuk menentukan apakah pembayaran tersebut sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dengan penerapan formula yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk layanan CDMA berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2005 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BHP Frekuensi Radio".

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 30 September 2010, Perusahaan memiliki kelebihan bayar sebesar Rp200,9 miliar. Kelebihan bayar tersebut dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya dan akan digunakan untuk pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika pada periode berikutnya (Catatan 14).

Berdasarkan Surat Nomor 616/ASM-UWBONDIN/XI/2019 tertanggal 1 November 2019 dari Sinar Mas kepada Kelompok Usaha, Sinar Mas telah menerima permintaan klaim atas jaminan pembayaran tersebut dari KOMINFO sebesar Rp539.322.641.568.

Pada tanggal 31 Desember 2019, goodwill seluruhnya merupakan selisih yang timbul dari kombinasi bisnis AAI.

**9 . OTHER NON-CURRENT ASSETS**

	<u>2018</u>	
	500.000	Guarantee payment on obligation of frequency fee payables (Note 33b)
	200.917	License (Note 15)
	-	Goodwill
	-	Security deposits
	8.956	Others
<b>Total</b>	<b>709.873</b>	<b>Total</b>
	-	Impairment
<b>Total</b>	<b>709.873</b>	<b>Total</b>

On October 14, 2010, the Company and the Directorate of Radio Frequency Spectrum Management signed Minutes of Claims Optimizing Radio BHP Frequency and Data Matching Radio Frequency No. 2149/BA/DITFREK/10/2010, to recalculate the Company's license fees (Radio BHP Frequency) to clarify the payments made to the Directorate General of Post and Telecommunication from year 2006 until September 30, 2010 cut-off, and to determine whether these payments were in accordance with the requirements for CDMA services based on issued regulation No. 19 Year 2005 concerning "Implementation Guidelines of State Tariff for Non-Income Tax from Radio BHP Frequency" by the Ministry of Communication and Information.

Based on the conclusion of the Directorate of Radio Frequency Spectrum Management, the Company made overpayment amounting to Rp200.9 billion from 2006 until September 30, 2010. This overpayment has been treated as other non-current assets and will be used for payment of obligation of the Company to the Department of Communication and Information in the future (Note 14).

Based on Letter Number 616/ASM-UWBONDIN/XI/2019 dated November 1, 2019 from Sinar Mas to the Group, Sinar Mas as received a claim request for te guarantee of payment from KOMINFO in the amount of Rp539,322,641,568.

As at December 31, 2019, goodwill entirely represent difference arise from business combination AAI.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated)

**10 . UTANG USAHA**

	<u>2019</u>
<b>Pihak ketiga</b>	
<u>Mata uang asing</u>	
Blackberry Singapore Pte. Ltd	7.491
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	<u>69.571</u>
Sub - total	<u>77.062</u>
<u>Rupiah</u>	
PT Smartfren Telecom Tbk	172.138
Kementerian Komunikasi dan Informasi	55.857
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	<u>51.544</u>
Sub - total	<u>279.539</u>
Beban Interkoneksi	<u>50.476</u>
Total pihak ketiga	<u>407.077</u>
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Bakrie Swasakti Utama	9.349
PT Multi Kontrol Nusantara	2.851
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	<u>4.661</u>
Total pihak berelasi	<u>16.861</u>
<b>Total Utang Usaha</b>	<u><b>423.938</b></u>
Persentase utang usaha pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	<u>0.1105%</u>

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Sampai dengan 30 hari	2.436
Lebih dari 30 hari - 60 hari	1.213
Lebih dari 60 hari - 90 hari	488
Lebih dari 90 hari	<u>419.801</u>
<b>Total</b>	<u><b>423.938</b></u>

**11 . UTANG LAIN - LAIN**

	<u>2019</u>
Dalam mata uang Rupiah	144.624
Dalam mata uang asing	<u>4.331</u>
<b>Total</b>	<u><b>148.955</b></u>

**10 . ACCOUNT PAYABLE**

	<u>2018</u>
<b>Third parties</b>	
<u>Foreign currencies</u>	
Blackberry Singapore Pte. Ltd	7.300
Others (each below Rp4 billion)	<u>45.753</u>
Sub - total	<u>53.053</u>
<u>Rupiah</u>	
PT Smartfren Telecom Tbk	172.138
Ministry of Communication and Information	55.857
Others (each below Rp4 billion)	<u>75.143</u>
Sub - total	<u>303.138</u>
Interconnection expense	<u>50.476</u>
Total third parties	<u>406.667</u>
<b>Related parties</b>	
PT Bakrie Swasakti Utama	9.349
PT Multi Kontrol Nusantara	2.851
Others (each below Rp4 billion)	<u>4.836</u>
Total related parties	<u>17.036</u>
<b>Total Trade Payable</b>	<u><b>423.703</b></u>
Persentase of related parties trade payables to total consolidated liabilities	<u>0.1056%</u>

The aging schedule of trade payables was as follows:

	<u>2018</u>
Up to 30 days	1.929
Over 30 days - 60 days	2.709
Over 60 days - 90 days	2.012
Over 90 days	<u>417.053</u>
<b>Total</b>	<u><b>423.703</b></u>

**11 . OTHER PAYABLES**

	<u>2018</u>
In Rupiah currency	138.638
In foreign currencies	<u>4.512</u>
<b>Total</b>	<u><b>143.150</b></u>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated)

**12 . BEBAN AKRUAL**

	<u>2019</u>
Bunga	3.659.085
Kewajiban kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	77.902
Gaji dan pensiun	43.733
Jasa profesional	36.508
Sewa	13.549
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp20 miliar)	73.442
<b>Total</b>	<b><u>3.904.219</u></b>

Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi merupakan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dengan tarif sebesar 0,5% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu, ditambah dengan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) atau Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu. Selain itu, ada juga kewajiban BHP Pita dan Terrestrial.

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-43/PUPNC.10.05/2017 tertanggal 23 Mei 2017, telah ditetapkan jumlah piutang yang harus di lunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian dan Komunikasi Informatika adalah sebesar Rp 36.187.973.680 dengan rincian :

- a) Hutang pokok : Rp 22.229.354.356 dengan bunga nol rupiah.
- b) Denda : Rp 10.668.803.535
- c) Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% atau senilai Rp 3.289.815.789

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-79/PUPNC.10.05/2017 tertanggal 6 Juli 2017, telah ditetapkan jumlah piutang yang harus di lunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian dan Komunikasi Informatika adalah sebesar Rp 7.672.486.890 dengan rincian :

- a) Hutang pokok : Rp 5.394.500.612 dengan bunga nol rupiah.
- b) Denda : Rp 1.580.487.470
- c) Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% atau senilai Rp 697.498.808

**12 . ACCRUED EXPENSES**

	<u>2018</u>	
	3.717.587	<i>Interest</i>
		<i>Obligation to the</i>
		<i>Ministry of Communication</i>
		<i>and Information -</i>
		<i>the Directorate General of</i>
		<i>Post and Telecommunication</i>
		<i>Salaries and pension</i>
		<i>Professional fees</i>
		<i>Rent</i>
		<i>Others (each below</i>
		<i>Rp20 billion)</i>
<b>Total</b>	<b><u>3.959.154</u></b>	<b>Total</b>

*Obligation to the Department of Communication and Information - the Directorate General of Post and Telecommunication represents the Cost of Frequency Utilization Providing Right telecommunications at a rate of 0.5% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off, plus an additional Universal Service Obligation (USO) of 1.25% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off. Also, included obligations related to Frequency License and Microwave.*

*Based on the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: PJPNC-43/PUPNC.10.05/2017 dated May 23, 2017, the amount of receivables that must be repaid by the Company to the Ministry and Communication Informatics is Rp 36,187,973,680 with details :*

- a) Principal debt: Rp 22,229,354,356 with zero rupiah interest.*
- b) Fines: Rp 10,668,803,535*
- c) The administration fee for managing state accounts is 10% or valued at Rp 3,289,815,789*

*Based on the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: PJPNC-79/PUPNC.10.05/2017 dated July 6, 2017, the amount of receivables that must be repaid by the Company to the Ministry and Communication Informatics is Rp 7,672,486,890 with details :*

- a) Principal debt: Rp 5,394,500,612 with zero rupiah interest.*
- b) Fines: Rp 1,580,487,470*
- c) The administration fee for managing state accounts is 10% or valued at Rp 697,498,808*

**12 . BEBAN AKRUAL** (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-97/PUPNC.10.05/2017 tertanggal 14 Juli 2017, telah ditetapkan jumlah piutang yang harus di lunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian dan Komunikasi Informatika adalah sebesar Rp 3.761.917.306 dengan rincian :

- a) Hutang pokok : Rp 2.637.241.131 dengan bunga nol rupiah.
- b) Denda : Rp 782.683.693
- c) Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% atau senilai Rp 341.992.482

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-165/PUPNC.10.05/2017 tertanggal 6 Desember 2017, telah ditetapkan jumlah piutang yang harus di lunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian dan Komunikasi Informatika adalah dengan rincian sebagai berikut :

- a) Hak penyerah piutang : Rp 6.785.040.881
- b) Biaya administrasi 1% dari hak penyerah piutang yaitu senilai Rp 67.850.408 apabila maksimal pembayaran tanggal 17 April 2018. Dan sebesar 10% dari hak penyerah piutang atau senilai Rp 678.504.088 apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal 17 April 2018.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-2994/WKN.07/KNL.05/2017 tertanggal 8 Nopember 2017, perihal Permintaan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun 2014 a.n. Perusahaan. Perusahaan diminta untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp 7.672.486.890 sesuai Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : SP3N-60/PUPNC.10.05/2016 tertanggal 20 April 2016.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-3000/WKN.07/KNL.05/2017 tertanggal 8 Nopember 2017, perihal Permintaan Pembayaran Kewajiban KPU/USO Tahun 2014 dan 2015 a.n. Perusahaan, Perusahaan diminta untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp 36.187.973.680 sesuai Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : SP3N-111/PUPNC.10.05/2016 tertanggal 27 Maret 2017.

Pembayaran harus dilakukan oleh Perusahaan guna menghindari tindakan hukum lebih lanjut, antara lain:

- a) Pencegahan ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap pengurus/penanggungjawab Perusahaan.
- b) Paksa badan terhadap pengurus/penanggungjawab Perusahaan, dan
- c) Penyitaan atas harta kekayaan penanggung utang dan/atau penjamin utang.

**12 . ACCRUED EXPENSES** (continued)

*Based on the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: PJPNC-97 / PUPNC.10.05 / 2017 dated July 14, 2017, the amount of receivables that must be repaid by the Company to the Ministry and Communication Informatics is Rp 3,761,917,306 with details :*

- a) Principal debt: Rp 2,637,241,131 with zero rupiah interest.*
- b) Fines: Rp 782,683,693*
- c) The administration fee for managing state accounts is 10% or valued at Rp 341,992,482*

*Based on the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: PJPNC-165/PUPNC.10.05/2017 dated December 6, 2017, the amount of receivables that must be repaid by the Company to the Ministry and Communication Informatics with details as follows :*

- a) Receivable right: Rp 6,785,040,881*
- b) 1% administration fee from the receivable surrender rights is Rp 67,850,408 if the maximum payment is April 17, 2018 and 10% of the receivable surrender rights or Rp 678,504,088 if payment is made after April 17 2018*

*Based on the Letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number: S-2994 / WKN.07 / KNL.05 / 2017 dated November 8, 2017, regarding Requests for Payment of BHP Telecommunications Obligations for 2014 a.n. the Company. The Company was asked to settle the obligations amounting to Rp 7,672,486,890 according to the Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: SP3N-60 / PUPNC.10.05 / 2016 dated April 20, 2016.*

*Based on the Letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number: S-3000 / WKN.07 / KNL.05 / 2017 dated November 8, 2017, regarding Requests for Payment of Obligations of KPU / USO in 2014 and 2015 a.n. The Company, the Company was asked to settle the obligation amounting to Rp 36,187,973,680 according to the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: SP3N-111 / PUPNC.10.05 / 2016 dated March 27, 2017.*

*Payments must be made by the Company to avoid further legal action , among others :*

- a) Prevention outside the territory of the Republic of Indonesia towards the management / responsible of the Company.*
- b) Forced the body of the Company's management / responsibility, and*
- c) Confiscation of the assets of the debt guarantor and / or debt guarantor.*

### 13 . WESEL SENIOR

#### **11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015**

Pada tanggal 7 Mei 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd, Entitas Anak, menerbitkan "11.500% *Guaranteed Senior Notes due 2015*" (selanjutnya disebut "Wesel Senior") sebesar USD250,0 juta dengan jangka waktu lima (5) tahun yang berakhir pada tanggal 7 Mei 2015, yang terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading. Wesel Senior tersebut dibebani tingkat suku bunga sebesar 11,5% per tahun yang akan dibayarkan per semester pada setiap tanggal 7 Mei dan 7 November dimulai pada tanggal 7 November 2010.

Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perusahaan sebagai entitas induk perusahaan penjamin, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) sebagai Entitas Anak penjamin. Credit Suisse (Singapura) Limited (CS), Singapura, Merrill Lynch (Singapura) Pte., Ltd dan Morgan Stanley Asia (Singapura) Pte., bertindak sebagai pembeli awal (initial purchasers), dengan CS sebagai koordinator global tunggal (sole global coordinator). The Bank of New York Mellon ditunjuk sebagai wali amanat, agen pembayaran dan pelaku pendaftaran, sedangkan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, ditunjuk sebagai agen penjamin Indonesia sehubungan dengan saham yang dijamin.

Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Wesel Senior tersebut adalah sebesar Rp82,8 miliar. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perusahaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan Intercompany Loan Agreement antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perusahaan tanggal 7 Mei 2010. Utang Intercompany tersebut digunakan untuk melunasi utang dan modal belanja Perusahaan.

Sebelum tanggal 7 Mei 2013, Bakrie Telecom Pte., Ltd, Entitas Anak, memiliki opsi untuk melunasi Wesel Senior dengan cara sebagai berikut:

- (a) Melunasi seluruh atau sebagian Wesel Senior dengan harga pelunasan sebesar 100% dari jumlah pokok Wesel Senior ditambah dengan premium yang berlaku, beserta bunga yang masih harus dibayar, jika ada.
- (b) Melunasi sampai dengan 35% dari jumlah pokok Wesel Senior, dengan hasil penerimaan neto dari penawaran saham tersebut, dengan harga pelunasan 111,5% dari jumlah pokok Wesel Senior, beserta bunga yang masih harus dibayar, jika ada.

### 13 . SENIOR NOTES

#### **11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015**

On May 7, 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd, a Subsidiary, issued "11.500% *Guaranteed Senior Notes due 2015*" (hereafter referred to as the "Senior Notes") amounting to USD250.0 million with a maturity of five (5) years ended May 7, 2015, which are listed on Singapore Exchange Securities Trading. These Senior Notes are subject to interest of 11.5% per annum that is payable semi-annually on May 7 and November 7 of each year commencing on November 7, 2010.

These Senior Notes are guaranteed by the Company as Parent Guarantor, PT Bakrie Connectivity and PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network) as Subsidiary Guarantors. Credit Suisse (Singapore) Limited (CS), Singapore, Merrill Lynch (Singapore) Pte., Ltd, and Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., acted as initial purchasers with CS as the sole global coordinator. The Bank of New York Mellon has been appointed as the trustee, paying agent and registrar, while Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, has been appointed as Indonesian collateral agent with respect to the pledged shares.

The issuance costs related to the Senior Notes amounted to Rp82.8 billion. The proceeds of the Senior Notes were passed through by Bakrie Telecom Pte., Ltd to the Company in the form of loan based on Intercompany Loan Agreement between Bakrie Telecom Pte., Ltd and the Company dated May 7, 2010 and used to pay outstanding debt and for capital expenditures of the Company.

At any time prior to May 7, 2013, Bakrie Telecom Pte., Ltd, the Subsidiary, could at its option redeem the Senior Notes, as follows:

- (a) Redeem the Senior Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the Senior Notes plus the applicable premium, and accrued and unpaid interest, if any.
- (b) Redeem up to 35% of the aggregate principal amount of the Senior Notes, with the net proceeds of sales of its common stock in an equity offering, at a redemption price of 111.5% of the principal amount of the Senior Notes, plus accrued and unpaid interest, if any.

**13 . WESEL SENIOR (lanjutan)**

Pada tanggal 27 Januari 2011, Bakrie Telecom Pte., Ltd, menerbitkan Wesel Senior sebesar USD130,0 juta pada harga 107%. Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perusahaan, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) dan Bakrie Telecom Pte., Ltd. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perusahaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan Supplemental Intercompany Loan Agreement antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perusahaan tanggal 27 Januari 2011. Utang Intercompany tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada CS dan belanja modal Perusahaan. Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan USD130,0 juta Wesel Senior tersebut adalah sebesar Rp71,5 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 , saldo Wesel Senior adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Wesel Senior (USD380,0 juta)	5.282.382

Wesel Senior ini dalam kondisi wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran pokok dan bunga pada tanggal 31 Desember 2015 (wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2014).

Perusahaan dan Bakrie Telecom Pte., Ltd, sedang dalam proses implementasi restrukturisasi utang Wesel Senior (Catatan 34).

**14 . UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU**

	<u>2019</u>
Utang penyedia menara	3.035.290
Utang usaha	1.274.752
Utang biaya hak penggunaan dan <i>universal service obligation</i>	326.734
Utang dengan jaminan	716.236
Utang akibat derivatif	197.065
Utang afiliasi	<u>74.264</u>
Total	5.624.341
Diskonto utang	<u>(192.769)</u>
<b>Total</b>	<b><u>5.431.572</u></b>

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya (Catatan 34).

**13 . SENIOR NOTES (continued)**

*Bakrie Telecom Pte., Ltd, issued Senior Notes amounting to USD130.0 million on January 27, 2011 at 107%. These Senior Notes are guaranteed by the Company, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network) and Bakrie Telecom Pte., Ltd. The proceeds of Senior Notes were passed through by Bakrie Telecom Pte., Ltd to the Company in the form of loan based on Supplemental Intercompany Loan Agreement between Bakrie Telecom Pte., Ltd and the Company dated January 27, 2011. The Intercompany Loan was used to pay outstanding debts to CS and for capital expenditure of the Company. The issuance costs related to the USD130.0 million Senior Notes amounted to Rp71.5 billion.*

*As of December 31, 2019 and 2018 , the outstanding balance of Senior Notes was as follows:*

	<u>2018</u>	
	5.502.780	Senior Notes (USD380.0 million)

*As of December 31, 2015, the Senior Notes were in default condition due to late payment of principal and its interest (default condition due to late payment of interest as of December 31, 2014).*

*The Company and Bakrie Telecom Pte., Ltd, is in the process of implementing restructuring the debt of Senior Notes (Note 34).*

**14 . SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU**

	<u>2018</u>	
	3.035.290	Tower provider payables
	1.306.963	Trade payables
	866.057	Payables on fee of rights to use and the universal service obligation
	746.120	Payables with collateral
	199.980	Derivatives payables
	<u>74.436</u>	Affiliate payables
Total	6.228.846	
Diskonto utang	<u>(192.769)</u>	Payables discount
<b>Total</b>	<b><u>6.036.077</u></b>	<b>Total</b>

*On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Note 34).*

**14 . UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU**  
(lanjutan)

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait.

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa. Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU maka 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A). Pada tahun 2015, Perusahaan mencatat utang nilai sisa masa sewa sebesar Rp1.818,7 miliar dan beban terkait disajikan dalam laba rugi sebesar Rp1.667,8 miliar.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang menyetujui penambahan modal Perusahaan atau penerbitan saham baru Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi terlebih dahulu. Saham baru Perusahaan tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

**15 . MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Ficomindo Buana Registrar adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>2019 dan / and 2018</b>		<b>Shareholders</b>
	<b>Jumlah Saham / Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam satuan penuh)/ Number of Shares Issued and Fully paid (in full amount)</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	
Total saham biasa seri A dan B			Total common shares series A and B
PT Huawei Tech Investment	6.189.313.980	16,83%	PT Huawei Tech Investment
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	13,60%	PT Mahindo Agung Sentosa
PT Era Bhakti Persada	2.012.019.117	5,47%	PT Era Bhakti Persada
Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited	2.213.279.000	6,02%	Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited
PT Bakrie Brothers Tbk	43.043.142	0,12%	PT Bakrie Brothers Tbk
Masyarakat	21.315.810.396	57,96%	Public
<b>Total</b>	<b>36.773.904.635</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

**14 . SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU**  
(continued)

Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Based on the Amicable Settlement Agreement, 100% of the residual value of the lease will be exchanged with the Mandatory Convertible Bond (MCB-A). In 2015, the Company booked residual value payable of the lease amounting to Rp1,818.7 billion and the related expense was presented in profit or loss amounting Rp1,667.8 billion.

On June 26, 2016, Company obtained approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which approved the issuance of new shares by way of non-preemptive rights by issuing Mandatory Convertible Bonds before hand. The new shares to be issued as the implementation of conversion of Mandatory Convertible Bonds as governed under the Amicable Settlement Agreement.

**15 . CAPITAL STOCK**

The composition of shareholders as of December 31, 2019 and 2018 based on registration by PT Ficomindo Buana Registrar, was as follows:

**15 . MODAL SAHAM (lanjutan)**

Sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut, sebelumnya Perusahaan telah melakukan perubahan atas nilai nominal saham sebagai berikut:

- (a) Setiap satu (1) saham seri A dengan nilai nominal semula seribu rupiah (Rp1.000) per saham menjadi lima (5) saham dengan nilai nominal dua ratus rupiah (Rp200) per saham.
- (b) Setiap satu (1) saham seri B dengan nilai nominal semula lima ratus rupiah (Rp500) per saham menjadi lima (5) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham.

Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Huawei Tech Investment telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp 1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham.

Modal saham Perusahaan, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network), Entitas Anak, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, digunakan sebagai jaminan atas Wesel Senior yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd. Entitas Anak (Catatan 13).

Jumlah saham modal dasar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan anggaran dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

<b>Jenis saham</b>	<b>Jumlah Saham Modal Dasar (dalam satuan penuh)/ Number of Authorized Shares (in full amount)</b>	<b>Nominal/ Nominal (Rp)</b>	<b>Total Dalam Jutaan Rupiah/ Total In Million Rupiah</b>	<b>Shares</b>
Saham biasa seri A	10.000.000.000	200	2.000.000	Common shares series A
Saham biasa seri B	87.111.652.195	100	8.711.165	Common shares series B
<b>Total</b>	<b>97.111.652.195</b>		<b>10.711.165</b>	<b>Total</b>

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam akta notaris No. 28 tanggal 10 Juli 2015 oleh Lenny Janis Ishak, SH; modal dasar Perusahaan ditingkatkan menjadi Rp10.711.165.219.500 (dalam satuan penuh) dengan komposisi saham seri A sejumlah sepuluh miliar (10.000.000.000) saham dengan nilai nominal dua ratus rupiah (Rp200) setiap saham dan saham seri B sejumlah delapan puluh tujuh miliar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima (87.111.652.195) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) setiap saham.

**15 . CAPITAL STOCK (continued)**

*In connection with the IPO, the Company previously changed the nominal value of its shares as follows:*

- (a) Each common share series A with nominal value amounting to one thousand rupiah (Rp1,000) per share was converted into five (5) shares with nominal value of two hundred rupiah (Rp200) per share.*
- (b) Each common share series B with nominal value amounting to five hundred rupiah (Rp500) per share was converted into five (5) shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.*

*On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by PT Huawei Tech Investment amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares.*

*As of December 31, 2019 and 2018, the capital stock of the Company, PT Bakrie Connectivity and PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network), Subsidiaries, were used as collateral for the Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd. A Subsidiary (Note 13).*

*The number of authorized shares as of December 31, 2019 and 2018 based on the Company's articles of association, was as follows:*

*Based on the result of the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on June 22, 2015 as stated in the notarial deed No. 28 dated July 10, 2015 of Lenny Janis Ishak, SH; the authorized capital of the Company has increased to be of Rp10,711,165,219,500 (in full amount) consist of common stock series A of ten billion (10,000,000,000) share with nominal value of two hundred rupiah (Rp200) per share and common stock series B of eighty seven billion, one hundred eleven million, six hundred fifty two thousand, one hundred ninety five (87,111,652,195) share with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.*

**16 . TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Melalui Penawaran Umum Perdana pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan telah menerima sebesar Rp605,0 miliar untuk penawaran lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham seri B atas nama dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) dengan harga penawaran seratus sepuluh rupiah (Rp110).

Melalui Penawaran Umum Terbatas I pada tanggal 29 Februari 2008, Perusahaan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350) setiap saham dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,0 triliun dan dengan selisih harga yang ditawarkan dengan harga nominal sebesar Rp2,2 triliun.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, Perusahaan telah melakukan penyesuaian harga pelaksanaan sebesar seratus dua puluh tujuh rupiah (Rp127) setiap sahamnya dan menerbitkan sebanyak tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu (38.549.131) lembar Waran Seri I yang berlaku efektif mulai tanggal 27 Maret 2008. Waran Seri I merupakan lanjutan dari Penawaran Umum Saham Perdana.

Selisih neto antara harga penawaran dengan harga nominal diakui sebagai tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**16 . ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

Through the Initial Public Offering on February 3, 2006, the Company received the amount of Rp605.0 billion for the offering of five billion five hundred million (5,500,000,000) share series B with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) at an offering price of one hundred and ten rupiah (Rp110).

Through the Rights Issue I on February 29, 2008, the Company issued a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share, which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share in the total maximum amount of Rp3.0 trillion and with an excess offering price over nominal price amounting to Rp2.2 trillion.

In accordance with Rights Issue I, the Company adjusted the exercise price to one hundred twenty-seven rupiah (Rp127) per share and issued thirty-eight million, five hundred forty-nine thousand, one hundred thirty-one (38,549,131) Series I Warrants effective March 27, 2008. Series I Warrants were an extension of the Initial Public Offering.

Net excess of price over par value of shares between nominal price and offering price was recognized as additional paid-in capital as of December 31, 2019 and 2018 as follows:

	31 Desember 2019 dan 2018/ December 31, 2019 and 2018			(Full amount)
	Selisih Lebih Harga Atas Nilai Nominal Saham/ Excess of Price Over Par Value of Shares	Biaya Penerbitan Saham/ Issuance Cost of Shares	Selisih Lebih Harga Atas Nilai Nominal Saham - Neto/ Net Excess of Price Over Par Value of Shares	
(Satuan penuh)				
Penerbitan 5.500.000.000 saham melalui penawaran umum (Catatan 1b)	55.000	27.229	27.771	Issuance of 5,500,000,000 through initial public offering (Note 1b)
Penerbitan 566.037.736 saham seri B melalui PMTMETD (Catatan 1e)	93.396	-	93.396	Issuance of 566,037,736 shares series B through PMTMETD (Note 1e)
Penerbitan 1.536.135.340 saham seri B melalui PMTMETD (Catatan 1e)	253.462	11	253.451	Issuance of 1,536,135,340 shares series B through PMTMETD (Note 1e)
Penerbitan 8.626.486.836 saham melalui PUT (Catatan 1c)	2.156.622	80.881	2.075.741	Issuance of 8,626,486,836 shares through right issue (Note 1c)
Penerbitan 1.076.515.248 saham melalui waran	37.655	-	37.655	Issuance of 1,076,515,248 shares through exercise of warrants
Pengampunan pajak	857		857	Tax amnesty
<b>Total</b>	<b>2.596.992</b>	<b>108.121</b>	<b>2.488.871</b>	<b>Total</b>

17 . SAHAM BEREDAR YANG DIPEROLEH KEMBALI

Transaksi saham beredar yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode/ Period	31 Desember 2019 dan 2018/ December 31, 2019 and 2018		Realisasi/ Realization (%)	Harga Nominal/ Par Value Shares	Description
		Jumlah saham (Dalam satuan penuh)/ Number of Shares (in full amount)				
Disetujui dalam Direksi (Catatan 1d)	2008	11.000.000.000				Approved in Board of Directors Meeting (Note 1d)
Pembelian kembali	2008	689.000.000		6,27%	68.900	Buy back
Penerbitan kembali	2009	(579.000.000)			(57.900)	Buy back
<b>Total</b>		<b>110.000.000</b>			<b>11.000</b>	<b>Total</b>

Selisih neto antara harga perolehan dengan harga nominal per lembar saham diakui sebagai "Agi Saham Beredar yang Diperoleh Kembali" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

17 . TREASURY STOCK

Transactions regarding treasury stock were as follows:

Keterangan	Periode/ Period	31 Desember 2019 dan 2018/ December 31, 2019 and 2018		Realisasi/ Realization (%)	Harga Nominal/ Par Value Shares	Description
		Jumlah saham (Dalam satuan penuh)/ Number of Shares (in full amount)				
Disetujui dalam Direksi (Catatan 1d)	2008	11.000.000.000				Approved in Board of Directors Meeting (Note 1d)
Pembelian kembali	2008	689.000.000		6,27%	68.900	Buy back
Penerbitan kembali	2009	(579.000.000)			(57.900)	Buy back
<b>Total</b>		<b>110.000.000</b>			<b>11.000</b>	<b>Total</b>

Net excess of price over par value of shares between nominal price and acquisition price was recognized as "Premium on Treasury Stock" in the consolidated statements of financial position.

18 . KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Akun ini terdiri dari:

a. Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak

	2019	2018
PT Bakrie Digital Net	1	1
PT Bakrie Connectivity	(434)	(16)
PT Anugerah Andalan Investama	-	3
<b>Total</b>	<b>(433)</b>	<b>(12)</b>

b. Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali

	2019	2018
PT Anugerah Andalan Investama	-	(160)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(160)</b>

19 . PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha meliputi pendapatan yang berasal dari jasa telekomunikasi dan teknologi informasi, dengan rincian sebagai berikut:

18 . NON-CONTROLLING INTEREST

This account consist of:

a. Non-controlling interest in net assets of Subsidiaries

	2019	2018
PT Bakrie Digital Net	1	1
PT Bakrie Connectivity	(434)	(16)
PT Anugerah Andalan Investama	-	3
<b>Total</b>	<b>(433)</b>	<b>(12)</b>

b. Income (loss) attributable to non-controlling interest

	2019	2018
PT Anugerah Andalan Investama	-	(160)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(160)</b>

19 . REVENUE

Operating revenues represent revenues from telecommunication services and information technology, with details as follows:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated)

**19 . PENDAPATAN USAHA** (lanjutan)

	<u>2019</u>
Pendapatan jasa telekomunikasi dan teknologi informasi	10.275
Beban pokok pendapatan	<u>(6.251)</u>
<b>Neto</b>	<b><u>4.024</u></b>

Transaksi pendapatan yang berasal dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil (Catatan 26).

Selain itu, terdapat biaya bagi hasil untuk pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil yang dicatat sebagai bagian dari potongan harga dan biaya bagi hasil.

**20 . BEBAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

	<u>2019</u>
Listrik	3.400
Sewa	-
Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	<u>23</u>
<b>Total</b>	<b><u>3.423</u></b>

**21 . BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<u>2019</u>
Jasa profesional	8.007
Perizinan, lisensi dan bea masuk	5.352
Iuran keanggotaan	326
Perlengkapan kantor	135
Pemeliharaan kantor	109
Sewa	97
Telepon, listrik dan air	86
Transportasi	85
Rugi penurunan nilai piutang usaha (Catatan 6)	5
Beban pos	2
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	<u>359</u>
<b>Total</b>	<b><u>14.563</u></b>

**19 . REVENUE** (continued)

	<u>2018</u>	
	8.526	<i>Telecommunication services and information technology revenues</i>
	<u>(4.720)</u>	<i>Cost of goods revenues</i>
<b>Net</b>	<b><u>3.806</u></b>	

Revenue transactions from related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018, amounted to nil respectively (Note 26).

In addition, revenue sharing cost to related party for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounting to nil, was recorded as part of discount and sharing cost.

**20 . OPERATING AND MAINTENANCE EXPENSES**

	<u>2018</u>	
	455	<i>Electricity</i>
	734	<i>Rent</i>
	<u>43</u>	<i>Obligation to Department of Communication and Information to Directorate General of Post and Telecommunication</i>
<b>Total</b>	<b><u>1.232</u></b>	<b>Total</b>

**21 . GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	<u>2018</u>	
	18.629	<i>Professional fees</i>
	4.267	<i>Permits, licenses and customs clearance</i>
	450	<i>Memberships</i>
	174	<i>Office supplies</i>
	48	<i>Office maintenance</i>
	2.890	<i>Rent</i>
	138	<i>Telephone, electricity and water</i>
	120	<i>Transportation</i>
	1.393	<i>Impairment loss of trade receivables (Note 6)</i>
	6	<i>Postage</i>
	<u>1.106</u>	<i>Others (each below Rp500 million)</i>
<b>Total</b>	<b><u>29.221</u></b>	<b>Total</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated)

**21 . BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)**

Beban jasa profesional terutama timbul dari konsultasi hukum terkait dengan kasus litigasi wesel senior. Perusahaan mengajukan permohonan pengakuan atas hasil proses PKPU berdasarkan peraturan Bab 15 Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat dan masih dalam proses peradilan di New York.

**22 . BEBAN KARYAWAN**

	<u>2019</u>
Gaji dan upah	8.342
Tunjangan kesehatan	119
Transportasi	109
Tunjangan uang makan	49
<b>Total</b>	<b><u>8.619</u></b>

**23 . BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN**

	<u>2019</u>
Sewa	329
Iklan, promosi dan pameran	16
<b>Total</b>	<b><u>345</u></b>

**24 . PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

a. Selisih kurs

	<u>2019</u>
Laba selisih kurs	373.396
Rugi selisih kurs	(177.567)
<b>Total</b>	<b><u>195.829</u></b>

b. Beban keuangan

	<u>2019</u>
Beban bunga, amortisasi beban keuangan neto dan beban keuangan lainnya	-
Administrasi bank	(15)
<b>Total</b>	<b><u>(15)</u></b>

c. Lain-lain

	<u>2019</u>
Penghasilan bunga	45
Penurunan nilai aset lain-lain	(202.752)
Lain-lain	37.515
<b>Total</b>	<b><u>(165.192)</u></b>

**21 . GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (continued)**

Professional service expenses mainly arise from legal consultations related to senior notes order litigation cases. The company submitted a request for recognition of the results of the PKPU process based on the rules of Chapter 15 of the United States Bankruptcy Law and is still in the proceedings in New York.

**22 . EMPLOYEES EXPENSES**

	<u>2018</u>	
	7.618	Salaries and wages
	150	Medical allowance
	383	Transportation
	42	Meal allowance
<b>Total</b>	<b><u>8.194</u></b>	<b>Total</b>

**23 . SALES AND MARKETING EXPENSES**

	<u>2018</u>	
	389	Rent
	-	Advertising, promotion and exhibition
<b>Total</b>	<b><u>389</u></b>	<b>Total</b>

**24 . OTHER INCOME (CHARGES)**

a. Foreign exchange

	<u>2018</u>	
	261.360	Gain on foreign exchange
	(345.366)	Loss on foreign exchange
<b>Total</b>	<b><u>(84.006)</u></b>	<b>Total</b>

b. Financing charges

	<u>2018</u>	
	(605.731)	Interest charges, amortization of net financial charges and other financial charges
	(13)	Bank charges
<b>Total</b>	<b><u>(605.744)</u></b>	<b>Total</b>

c. Others

	<u>2018</u>	
	3	Interest income
	-	Impairment of others assets
	(1.182)	Others
<b>Total</b>	<b><u>(1.179)</u></b>	<b>Total</b>

25 . PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	<u>2019</u>
Pajak Pertambahan Nilai	<u>179</u>

b. Utang pajak

	<u>2019</u>
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	13.406
Pasal 26	3.864
Pajak Pertambahan Nilai	2.444
Pasal 23	<u>1.616</u>
<b>Total</b>	<b><u>21.330</u></b>

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Rugi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	7.343
Laba (rugi) Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	-
Transaksi eliminasi	<u>-</u>
Rugi sebelum beban pajak yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan	<u>7.343</u>
<b>Beda temporer</b>	
Depresiasi	283
Penyisihan penurunan nilai aset	-
Penyisihan imbalan kerja	<u>232</u>
Total	<u>515</u>
<b>Beda tetap</b>	
Beban bunga	<u>-</u>
Total	<u>-</u>
Taksiran Rugi Fiskal	<u>7.857</u>

25 . TAXATION

a. Prepaid taxes

	<u>2018</u>
	<u>1.292</u>

Value-Added Tax

b. Taxes payable

	<u>2018</u>
	13.346
	3.325
	2.339
	<u>1.570</u>
<b>Total</b>	<b><u>20.580</u></b>

Income taxes  
 Article 21  
 Article 26  
 Value-Added Tax  
 Article 23

**Total**

c. Current Tax

Reconciliation between loss before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated fiscal loss for the years ended December 31, 2019 and 2018 was as follows:

	<u>2018</u>
	(727.979)
	204
	<u>(249)</u>
	<u>(728.024)</u>
	-
	2.767
	<u>111</u>
	<u>2.878</u>
	<u>605.732</u>
	<u>605.732</u>
	<u>(119.415)</u>

Loss before income tax expenses per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income  
 Income (loss) of Subsidiaries before income tax expenses  
 Elimination transactions

Loss before income tax expense attributable to the Company

Temporary differences  
 Depreciation  
 Provision for impairment loss assets  
 Provision for employee benefits

**Total**

Permanent differences  
 Interest expenses

**Total**

Estimated fiscal Loss

**25 . PERPAJAKAN** (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

	<u>2019</u>
Rugi Fiskal:	
2014	(1.592.976)
2015	(2.684.946)
2016	(1.103.798)
2017	(899.102)
2018	(119.415)
2019	<u>7.857</u>
Total rugi fiskal	<u>(6.392.380)</u>
<b>Total Akumulasi Rugi Fiskal</b>	<b><u>(6.392.380)</u></b>

Perusahaan tidak melakukan penyisihan beban pajak penghasilan kini karena Perusahaan masih mengalami rugi fiskal.

d. Pajak tangguhan

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan karena besar kemungkinan aset pajak tangguhan tidak dapat terealisasi di masa yang akan datang.

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 4 Mei 2016, Perusahaan menerima SKPLB No. 00071/407/092/16 atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2014 sejumlah Rp9.742,5 juta yang berbeda dengan jumlah yang diklaim oleh Perusahaan sejumlah Rp9.999,9 juta. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut.

f. Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, Perusahaan telah melaksanakan pengampunan pajak ini dengan memperoleh SKPP tanggal 7 April 2017.

**25 . TAXATION** (continued)

c. Current Tax (continued)

	<u>2018</u>	
		<i>Fiscal loss:</i>
	(1.592.976)	2014
	(2.684.946)	2015
	(1.103.798)	2016
	(899.102)	2017
	(119.415)	2018
	<u>-</u>	2019
Total rugi fiskal	<u>(6.400.237)</u>	<i>Total fiscal loss</i>
<b>Total Akumulasi Rugi Fiskal</b>	<b><u>(6.400.237)</u></b>	<b><i>Estimated Cumulative Fiscal Loss</i></b>

*No provision for current income tax expense was made due to the Company still being in a fiscal loss position.*

d. Deferred Tax

*The management believed that the Company did not recognize deferred tax assets because it is probable that deferred tax assets can not be realized in the future.*

e. Tax Assessment Letter

*Subsequently, on May 4, 2016, the Company received SKPLB No. 00071/407/092/16 relating to overpayment of Value-Added Tax for the fiscal year 2014 amounted to Rp9,742.5 million instead of Rp9,999.9 million as claimed by the Company. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not received the overpayment of VAT.*

f. Tax Amnesty

*In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the implementation of Law No. 11 of 2016 on tax amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty, the Company have participated in this tax amnesty with obtain SKPP on April 7, 2017.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**  
Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless  
otherwise stated)

**26 . TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha yang normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

	<u>2019</u>
Sewa ke (Catatan 33):	
PT Bakrie Swasakti Utama	4.623

Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</u>	<u>Related Parties</u>
PT Bakrie Swasakti Utama	Afiliasi / Affiliate	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Provinces Indonesia	Afiliasi / Affiliate	PT Provinces Indonesia
PT Multi Kontrol Nusantara	Afiliasi / Affiliate	PT Multi Kontrol Nusantara
PT Viva Media Baru	Afiliasi / Affiliate	PT Viva Media Baru
PT Asia Global Media	Afiliasi / Affiliate	PT Asia Global Media

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</u>	<u>Related Parties</u>
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	Afiliasi / Affiliate	Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika
PT Bakrie Global Ventura	Afiliasi / Affiliate	PT Bakrie Global Ventura

**Utang Pihak Berelasi**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			<b>Current liabilities</b>
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	35.186	35.186	Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika
PT Bakrie Global Ventura	11.912	11.912	PT Bakrie Global Ventura
<b>Total</b>	<b><u>47.098</u></b>	<b><u>47.098</u></b>	<b>Total</b>
<b>Persentase terhadap Total Liabilitas Konsolidasian</b>	<b><u>0,3086%</u></b>	<b><u>0,2919%</u></b>	<b>Percentage to Total Consolidated Liabilities</b>

Utang pihak berelasi yang diperoleh PT Bakrie Connectivity (BCON), Entitas Anak, dari Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) merupakan utang usaha yang pembayarannya ditunda selama 18 bulan sejak tanggal 23 Desember 2014.

Utang pihak berelasi yang diperoleh Perusahaan dari PT Bakrie Global Ventura merupakan utang yang pembayarannya ditunda selama 18 bulan sejak tanggal 24 Maret 2015.

**26 . TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group entered into transactions with related parties.

	<u>2018</u>	
Rental to (Note 33):		
PT Bakrie Swasakti Utama	4.623	PT Bakrie Swasakti Utama

Nature of relationships and transactions with related parties were as follows:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</u>	<u>Related Parties</u>
PT Bakrie Swasakti Utama	Afiliasi / Affiliate	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Provinces Indonesia	Afiliasi / Affiliate	PT Provinces Indonesia
PT Multi Kontrol Nusantara	Afiliasi / Affiliate	PT Multi Kontrol Nusantara
PT Viva Media Baru	Afiliasi / Affiliate	PT Viva Media Baru
PT Asia Global Media	Afiliasi / Affiliate	PT Asia Global Media

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</u>	<u>Related Parties</u>
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	Afiliasi / Affiliate	Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika
PT Bakrie Global Ventura	Afiliasi / Affiliate	PT Bakrie Global Ventura

**Due to Related Parties**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			<b>Current liabilities</b>
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	35.186	35.186	Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika
PT Bakrie Global Ventura	11.912	11.912	PT Bakrie Global Ventura
<b>Total</b>	<b><u>47.098</u></b>	<b><u>47.098</u></b>	<b>Total</b>
<b>Persentase terhadap Total Liabilitas Konsolidasian</b>	<b><u>0,3086%</u></b>	<b><u>0,2919%</u></b>	<b>Percentage to Total Consolidated Liabilities</b>

Due to a related party obtained by PT Bakrie Connectivity (BCON), a Subsidiary, from Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) represents trade payable, which payment was deferred for 18 months starting from December 23, 2014.

Due to a related party obtained by the Company from PT Bakrie Global Ventura represents payable, which payment was deferred for 18 months starting from March 24, 2015.

**27 . LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2019 (tidak dihitung oleh aktuaris) dan 31 Desember 2018 (dihitung oleh aktuaris) dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto	nil% pada 31 Desember 2019 dan 8,5% pada 31 Desember 2018 <i>nil% in December 31, 2019 and 8.5% in December 31, 2018</i>	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	6,5% per tahun / <i>per annum</i>	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat mortalitas	TMI-III tahun 2011 / <i>TMI-III year 2011</i>	<i>Mortality rate</i>
Tingkat kemungkinan	5% dari tingkat mortalitas / <i>5% of mortality rate</i>	<i>Disability rate</i>
Usia pensiun normal	55 tahun / <i>55 years</i>	<i>Normal retirement age</i>
Tingkat Pengunduran diri	1% - 5%	<i>Resignation rate</i>

Analisa sensitivitas kuantitatif liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>Peningkatan (Penurunan) / Increase (Decrease)</b>	<b>Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Kerja / Impact on Employee Benefit</b>	
Tingkat diskonto	1,00% -1,00%	(99) 112	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1,00% -1,00%	112 (100)	<i>Salary increment rate</i>

Kelompok Usaha menghadapi sejumlah risiko signifikan terkait program imbalan kerja, sebagai berikut:

- (a) Perubahan tingkat diskonto  
 Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- (b) Tingkat kenaikan gaji  
 Liabilitas imbalan kerja berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dimana semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

**27 . EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

The employee benefits liability of the Group as of December 31, 2019 (was not calculated by an actuary) and December 31, 2018 (was calculated by an actuary), respectively, used the "Projected Unit Credit" method with considerations of the following assumptions:

The quantitative sensitivity analysis of the employee benefits liability to the changes in the weighted principal assumptions as of December 31, 2018 was as follows:

The Group was exposed to a number of significant risks related to its employee benefit plans, as follows:

- (a) Changes in discount rate  
 A decrease in discount rate will increase plan liabilities.
- (b) Salary increment rate  
 Employee benefit liability are linked to salary increment rate, whereby the higher salary increment rate will lead to higher liabilities.

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Employee benefits liability was as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	599	206	<i>Present value of benefits liability</i>
Nilai wajar atas aset program	-	-	<i>Fair value of plant assets</i>
<b>Liabilitas imbalan kerja</b>	<b><u>599</u></b>	<b><u>206</u></b>	<b><i>Employee benefits liability</i></b>

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Movements of employee benefits liability were as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Saldo awal	206	1.095	<i>Beginning balance</i>
Beban imbalan kerja karyawan	393	111	<i>Employee benefits expense</i>
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	-	(806)	<i>Other comprehensive loss (income)</i>
Realisasi pembayaran manfaat	-	(194)	<i>Actual benefits payments</i>
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>599</u></b>	<b><u>206</u></b>	<b><i>Ending Balance</i></b>

**27 . LIABILITAS IMBALAN KERJA** (lanjutan)

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Beban (penghasilan) yang diakui dalam laba rugi :	
Biaya jasa kini	393
Biaya bunga	-
<b>Total</b>	<b><u>393</u></b>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	
pada awal tahun	206
Biaya jasa kini	393
Biaya bunga	-
Pengukuran kembali dari :	
Keuntungan (kerugian) aktuarial	
yang timbul dari :	
Perubahan dalam asumsi	
aktuaris	
Penyesuaian pengalaman	-
Imbalan yang dibayar	-
<b>Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja Pada Akhir Tahun</b>	<b><u>599</u></b>

**27 . EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY** (continued)

*Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect to this employee benefits liability were as follows:*

	<u>2018</u>	
Expense (income) recognized in profit or loss:		
Current-service cost	37	
Interest cost	74	
<b>Total</b>	<b><u>111</u></b>	<b>Total</b>

*Movements of the present value of the employee benefits liability were as follows:*

	<u>2018</u>	
Present value of employee benefits liability at beginning of the year	1.095	
Current-service cost	37	
Interest cost	74	
Remeasurements from :		
Actuarial gain (losses) arising from:		
changes in actuary assumption		
Experience adjustments	(806)	
Benefit paid	(194)	
<b>Present Value of Employee Benefits Liability at End of Year</b>	<b><u>206</u></b>	

	<u>Perusahaan / The Company</u>	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahunan berikutnya)	-	<i>Within the next 12 months (the next period yearly report)</i>
Antara 1 dan 3 tahun	40	<i>Between 1 and 3 years</i>
Antara 3 dan 5 tahun	44	<i>Between 3 and 5 years</i>
Antara 5 dan 10 tahun	94	<i>Between 5 and 10 years</i>
Di atas 10 tahun	421	<i>Beyond 10 years</i>
<b>Total</b>	<b><u>599</u></b>	<b>Total</b>

Perbandingan nilai kini liabilitas imbalan kerja, dan penyesuaian yang timbul akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan selama lima (5) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

*Comparison of the present value of employee benefits liability, and the experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred) over the last five (5) years were as follows:*

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	(599)	(206)	(1.095)	(767)	(23.131)	<i>Present value of employee benefit liability</i>
Penyesuaian dalam liabilitas	952	952	450	(4.106)	(20.918)	<i>Adjustment on liability</i>

28 . INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 :

28 . FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table presents the carrying amounts and the estimated fair values of the financial instruments carried in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2019 and 2018 :

Akun	31 Desember 2019/ December 31, 2019		Accounts Financial Assets
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Aset Keuangan</b>			
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Kas	31	31	Cash on hand
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas di bank	835	835	Cash in bank
Kas yang dibatasi penggunaannya	40	40	Restricted cash
Piutang usaha	2.360	2.360	Trade receivables
Jaminan	529	529	Security deposits
<b>Total Aset Keuangan</b>	<b>3.795</b>	<b>3.795</b>	<b>Total Financial Assets</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>			<b>Financial Liabilities</b>
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Utang usaha	423.938	423.938	Trade payables
Utang lain-lain	148.955	148.955	Other payables
Beban akrual	3.904.219	3.904.219	Accrued expenses
Wesel senior	5.282.382	5.282.382	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	5.431.572	5.431.572	Settlement of payables through PKPU
<b>Total Liabilitas Keuangan</b>	<b>15.238.164</b>	<b>15.238.164</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

Akun	31 Desember 2018/ December 31, 2018		Accounts Financial Assets
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Aset Keuangan</b>			
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Kas	29	29	Cash on hand
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas di bank	281	281	Cash in bank
Investasi jangka pendek	-	-	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	40	40	Restricted cash
Piutang usaha	953	953	Trade receivables
Jaminan	-	-	Security deposits
<b>Total Aset Keuangan</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>Total Financial Assets</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>			<b>Financial Liabilities</b>
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Utang usaha	423.703	423.703	Trade payables
Utang lain-lain	143.150	143.150	Other payables

28 . INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

28 . FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

31 Desember 2018/ December 31, 2018			
Akun	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Accounts
Beban akrual	3.959.154	3.959.154	Accrued expenses
Wesel senior	5.502.780	5.502.780	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	6.036.077	6.036.077	Settlement of payables through PKPU
<b>Total Liabilitas Keuangan</b>	<b>16.111.962</b>	<b>16.111.962</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek :

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu (1) tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek (Level 2).

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang :

- a) Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel yang tidak dikuotasi (pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan).

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama (Level 2).

- b) Liabilitas keuangan yang dikuotasi dalam pasar aktif (aset keuangan tersedia untuk dijual dan wesel senior).

Nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual ditentukan dengan mengacu pada harga pasar terakhir.

Nilai wajar dari Wesel Senior yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Level 1).

- c) Aset keuangan jangka panjang

Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Short-term financial assets and liabilities :

Short-term financial instruments with remaining maturities of one (1) year or less (cash and cash equivalents, trade receivables, restricted cash, short-term investments, trade payables, other payables and accrued expenses).

These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities (Level 2).

Long-term financial assets and liabilities :

- a) Unquoted long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (long-term loan and finance lease payables).

The fair values of these financial liabilities are determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities (Level 2).

- b) Financial instruments quoted on an active market (available-for-sale financial asset and senior notes).

The fair value of available-for-sale financial asset is determined based on the latest published quoted price.

The fair value of the Senior Notes issued by the Group that are traded on an active market is determined with reference to their quoted market prices (Level 1).

- c) Long-term financial assets

Other non-current financial assets that are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs are carried at their nominal amounts less any impairment losses.

**28 . INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Tabel di atas ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- a) harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung (Level 2); dan
- c) input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

**29 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Kelompok Usaha dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Kelompok Usaha secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi dan terutama oleh *Chief Financial Officer* (CFO). CFO memiliki pusat departemen keuangan berikut kebijakan yang telah disetujui oleh Divisi Manajemen Risiko dan Direksi. Departemen ini mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko dan Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan non-derivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

**a. Risiko kredit**

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar nilai tercatat aset keuangan Kelompok Usaha, sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kas dan setara kas (kecuali kas)	835	281
Kas yang dibatasi penggunaannya	40	40
Piutang usaha	2.360	953
Jaminan	529	-
<b>Total</b>	<b>3.764</b>	<b>1.274</b>

**28 . FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

The table above analyzes the financial instruments measured at fair value by level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- b) inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and
- c) inputs are unobservable inputs for the asset or liability (Level 3).

**29 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES**

The Group is affected by various financial risks, including credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Group's overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on its previous years of financial performance.

Financial risk management is under the direct supervision of the Board of Directors and especially the *Chief Financial Officer* (CFO). The CFO has a central treasury department that follows policies approved by the Risk Management Division and Board of Directors. The department identifies and evaluates financial risks in close cooperation with the Company's operating units. The Risk Management Division and Board of Directors determine the principles for overall financial risk management, as well as policies covering specific areas, such as foreign currency risk, interest rate risk, credit risk, use of derivative and non-derivative financial instruments, and investment in excess of liquidity.

**a. Credit risk**

The Group's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal the carrying amount of its financial assets, as follows:

	<b>Total</b>
Cash and cash equivalents (except cash on hand)	
Restricted cash	
Trade receivables	
Security deposits	
<b>Total</b>	<b>Total</b>

**29 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Kelompok Usaha mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif. Kelompok Usaha mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan aset derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**29 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring. The Group manages credit risk exposed from their deposits with banks and derivative assets by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. There are no significant concentration of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

The analysis of the age of financial assets that were not yet due or not impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired was as follows:

31 Desember 2019 / December 31, 2019							
Belum Jatuh Tempo ataupun Mengalami Penurunan Nilai/Neither Past Due nor Impaired	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due but Not Impaired					Total / Total	
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 bulan- 6 bulan/ 3 months- 6 months	6 bulan - 1 tahun/6 months - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ over 1 year			
Kas dan setara kas (kecuali kas)	835	-	835	-	-	835	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Kas yang dibatasi penggunaannya	40	-	-	-	40	40	Restricted cash
Piutang usaha	-	-	-	-	2.360	2.360	Trade receivables
Jaminan	529	-	-	-	529	529	Security deposits
<b>Total</b>	<b>1.404</b>		<b>835</b>		<b>2.929</b>	<b>3.764</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2018 / December 31, 2018							
Belum Jatuh Tempo ataupun Mengalami Penurunan Nilai/Neither Past Due nor Impaired	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due but Not Impaired					Total / Total	
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 bulan- 6 bulan/ 3 months- 6 months	6 bulan - 1 tahun/6 months - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ over 1 year			
Kas dan setara kas (kecuali kas)	281	255	-	-	-	255	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Kas yang dibatasi penggunaannya	40	-	-	-	40	40	Restricted cash
Piutang usaha	-	-	953	-	-	953	Trade receivables
Jaminan	-	-	-	367	201	568	Security deposits
<b>Total</b>	<b>321</b>	<b>255</b>	<b>953</b>	<b>367</b>	<b>241</b>	<b>1.816</b>	<b>Total</b>

Manajemen melakukan penilaian atas kualitas kredit counterparties karena tidak ada peringkat kredit eksternal yang tersedia dan terpenuhi, dimana tidak terdapat risiko signifikan yang terkait dengan mereka.

The management assessed the credit quality of the counterparties for which no external credit rating is available and is satisfied, that there is no significant risk associated with them.

**29 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN** (lanjutan)

**b. Risiko mata uang asing**

Kelompok Usaha terekspos risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari transaksi, aset dan liabilitas tertentu dalam Dolar AS yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari.

Kelompok Usaha memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Aset</b>		
Kas		
Dolar AS	39	35
Piutang usaha		
Dolar AS	15.422	15.023
Kas yang dibatasi penggunaannya		
Dolar AS	40	40
Total Aset	<u>15.501</u>	<u>15.098</u>
<b>Liabilitas</b>		
Utang usaha		
Dolar AS dan mata uang lain	57.179	57.179
Utang lain-lain		
Dolar AS	4.331	4.512
Beban akrual		
Dolar AS	3.647.422	3.647.422
Utang pihak berelasi		
Dolar As	11.912	11.912
Wesel senior		
Dollar As	5.282.382	5.502.780
Utang yang diselesaikan melalui PKPU		
Dolar AS dan mata uang lain	3.294.239	3.294.239
Total Liabilitas	<u>12.297.465</u>	<u>12.518.044</u>
Liabilitas Neto	<u>(12.281.964)</u>	<u>(12.502.946)</u>

Berdasarkan estimasi manajemen, sampai dengan tanggal pelaporan Kelompok Usaha berikutnya, kurs Rupiah terhadap Dolar AS dapat melemah/menguat 5% dibandingkan kurs pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Jika nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 dengan seluruh variable lain tetap, maka rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2019 masing-masing akan berupa peningkatan/penurunan sekitar Rp486,1 miliar.

**29 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)

**b. Foreign currency risk**

*The Group is exposed to changes in foreign currency exchange rates primarily from certain transactions, assets and liabilities in US Dollar which arise from financing activities and daily operations.*

*The Group monitors and manages the risk by matching the foreign currency financial liabilities with relevant foreign currency assets and buying or selling foreign currencies at spot rate when necessary.*

*As of December 31, 2019 and 2018, the Group had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:*

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Assets</b>		
Cash		
US Dollar	35	35
Trade receivables		
US Dollar	15.023	15.023
Restricted fund		
US Dollar	40	40
Total Assets	<u>15.501</u>	<u>15.098</u>
<b>Liabilities</b>		
Trade payables		
US Dollar and other currencies	57.179	57.179
Other payables		
US Dollar	4.331	4.512
Accrued expenses		
US Dollar	3.647.422	3.647.422
Due to related party		
US Dollar	11.912	11.912
Senior notes		
US Dollar	5.282.382	5.502.780
Settlement payables through PKPU		
US Dollar and other currencies	3.294.239	3.294.239
Total Liabilities	<u>12.297.465</u>	<u>12.518.044</u>
Liabilities-Net	<u>(12.281.964)</u>	<u>(12.502.946)</u>

*Based on management's estimate, until the Group's next reporting date, the exchange rate of Rupiah against US Dollar may weaken/strengthen by 5%, compared to the exchange rate as of December 31, 2019 and 2018.*

*If the extent the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar at December 31, 2019 with all other variables held constant, the 2019 loss before income tax would have been an increase/a decrease of approximately Rp486.1 billion, respectively.*

**29 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Jika nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 dengan seluruh variable lain tetap, maka rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2019 masing-masing akan berupa peningkatan/penurunan sekitar Rp498,5 miliar.

**c. Risiko tingkat suku bunga**

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman serta aset dan liabilitas berbunga. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha tidak memiliki saldo aset dan liabilitas dengan tingkat suku bunga mengambang yang material.

**d. Risiko likuiditas**

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Kelompok Usaha mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas dan fleksibilitas piutang melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif yang diperlukan dalam pemahaman jatuh tempo kebutuhan arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (yang terdiri dari saldo pokok terutang). Utang yang diselesaikan melalui PKPU sebagian akan diselesaikan melalui penerbitan *Mandatory Convertible Bond*.

**29 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

If the extent the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar at December 31, 2019 with all other variables held constant, the 2019 loss before income tax would have been an increase/a decrease of approximately Rp498.5 billion, respectively.

**c. Interest rate risk**

The Group's exposure to interest rate risk relates primarily to its borrowing obligations and interest-bearing assets and liabilities. The Group's policies are to obtain the most favorable interest rates available.

As of December 31, 2019 and 2018, the Group did not have material balances of assets and liabilities with floating interest rates.

**d. Liquidity risk**

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Group maintains a balance between continuity of accounts receivable collectability and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

The following table analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities which are essential in understanding the timing of cash flows requirements. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (consisting of outstanding principal balance). Settlement of payables through PKPU will be settled partially by issuing *Mandatory Convertible Bonds*.

31 Desember 2019 / December 31, 2019						
Nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto/ Contractual undiscounted cash flow amounts						
	Nilai tercatat/ Carrying amounts	Total/ Total	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang usaha dan utang lain-lain	572.892	572.892	572.892	-	-	Trade and other payables
Beban akrual	3.904.219	3.904.219	-	-	3.904.219	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Current maturities of Long term Liabilities
Wesel senior	5.282.382	5.148.240	-	-	5.148.240	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	-	47.098	-	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	5.431.572	5.931.222	-	-	5.931.222	Settlements of payables through PKPU
<b>Total</b>	<b>15.238.163</b>	<b>15.603.670</b>	<b>572.892</b>	<b>47.098</b>	<b>14.983.681</b>	<b>Total</b>

29 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
 KEUANGAN (lanjutan)

29 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
 POLICIES (continued)

31 Desember 2018 / December 31, 2018					
Nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto/ Contractual undiscounted cash flow amounts					
Nilai tercatat/ Carrying amounts	Total/ Total	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang usaha dan					Trade and other
utang lain-lain	566.853	566.853	566.853	-	payables
Beban akrual	3.959.154	3.959.154	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang					Current maturities of
jatuh tempo dalam					Long term
waktu satu tahun					Liabilities
Wesel senior	5.502.780	5.502.780	-	5.502.780	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	-	47.098	Due to related parties
Utang yang diselesaikan					Settlements of payables
melalui PKPU	6.036.077	6.036.077	-	-	through PKPU
<b>Total</b>	<b>16.111.962</b>	<b>16.111.962</b>	<b>566.853</b>	<b>47.098</b>	<b>Total</b>

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Kelompok Usaha adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Kelompok Usaha mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Kelompok Usaha akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Kelompok Usaha memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal dimana total utang dibagi dengan total modal. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga dan total modal adalah total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payments to shareholders, return capital structure or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

The Group monitors its use of capital structure using a debt-to-equity ratio which is total debt divided by total equity. Total debt represents interest bearing borrowings, while equity represents total equity attributable to owners of the parent.

30 . RUGI NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN  
 KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

30 . LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS  
 OF PARENTS

	2019	2018	
Rugi neto diatribusikan kepada			Net loss attributable to the owners
Pemilik entitas induk	7.280	(720.575)	of parents
Jumlah rata-rata tertimbang saham			Weighted average number of
per saham dasar (angka penuh)	36.773.904.635	36.773.904.635	ordinary shares (full amount)
<b>Rugi Per Saham Dasar</b>			<b>Basic Loss Per Share</b>
<b>(dalam satuan penuh)</b>	<b>0.20</b>	<b>(19.59)</b>	<b>(in full amount)</b>

**31 . INFORMASI SEGMENT**

Kelompok Usaha hanya mempunyai satu segmen usaha yaitu jasa telekomunikasi yang dipertimbangkan sebagai segmen primer.

Rincian pendapatan jasa telekomunikasi berdasarkan jenis jasa layanan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Pendapatan pemakaian pulsa	9.775
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar)	<u>500</u>
<b>Total</b>	<b><u>10.275</u></b>

**32 . LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI**

**a. Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler**

Pada tanggal 17 April 2015, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 186 tahun 2015 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler PT Bakrie Telecom Tbk".

Lisensi ini diberikan untuk menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak seluler dengan Wilayah Penyelenggaraan Nasional. Izin ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap lima (5) tahun.

**b. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP)**

Pada tanggal 2 Maret 2007, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 053/DIRJEN/2007 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet PT Bakrie Telecom Tbk". Izin penyelenggaraan jasa ISP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2012.

**33 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN**

Perusahaan memiliki perjanjian dan ikatan yang signifikan, sebagai berikut:

**a. PT Bakrie Swasakti Utama (Pihak Berelasi)**

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama untuk sewa kantor dan lahan parkir untuk satu (1) tahun.

**31 . SEGMENT INFORMATION**

*The Group has only one business segment, i.e. telecommunication services, which are considered as a primary segment.*

*The details of revenues based on the service type were as follows:*

	<u>2018</u>	
	8.026	<i>Usage charge</i>
	<u>500</u>	<i>Others (each below Rp 1 billion)</i>
<b>Total</b>	<b><u>8.526</u></b>	<b>Total</b>

**32 . TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE**

**a. License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network**

*On April 17, 2015, the Company obtained Operational License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network based on the Decree of Director General of Post and Information No. 186 year 2015 regarding "License for the Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network PT Bakrie Telecom Tbk".*

*This license was granted for Basic Telephony Services through cellular mobile network with national service area coverage. The license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.*

**b. License for Operation of Internet Service Provider (ISP)**

*On March 2, 2007, the Company obtained a License for Operational Internet Service Provider with nationwide coverage, based on Decision Letter of the Director General Post and Telecommunication No. 053/DIRJEN/2007 regarding "License for Operation of Internet Service Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The ISP license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2012.*

**33 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS**

*The Company had outstanding significant agreements and commitments as follows:*

**a. PT Bakrie Swasakti Utama (Related Party)**

*The Company entered into a rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama for the lease of certain office and parking spaces with one (1) year term.*

**33 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN**  
(lanjutan)

Perjanjian tersebut dapat diperbaharui kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Jumlah beban sewa setiap tahun disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang diungkapkan dalam (Catatan 26).

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 6.559,99m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp471,9 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian pengalihan pengelolaan ruang usaha sektor utara Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30,25 ribu per meter dengan luas area 1.665m<sup>2</sup> atau sebesar Rp50,4 juta per bulan (Catatan 26).

Perusahaan juga menandatangani pengalihan perjanjian pengelolaan ruang usaha sektor selatan Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30,0 ribu per meter dengan luas area 937m<sup>2</sup> atau sebesar Rp28,3 juta per bulan (Catatan 26).

Pada tanggal 25 September 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 459,74m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp32,9 juta per bulan. Sampai dengan tanggal laporan ini, proses perpanjangan perjanjian sewa masih dalam proses penandatanganan.

**b. Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Perjanjian") dengan pihak ketiga, PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), pada tanggal 30 Oktober 2014.

**33 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS**  
(continued)

*The agreement subject to renewal after the expiry date. The amount of the rental expense for every year presented in the consolidated financial statements is disclosed in (Note 26).*

*On October 1, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until August 31, 2015 subject to renewal after the expiry date. The new rental per month amounted to Rp471,9 million for a total area of 6,559.99m<sup>2</sup>.*

*On December 31, 2013, the Company entered into an agreement to transfer building management of the northern sector of Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from June 3, 2014 until January 2, 2015. Service charges per square meter amounted to Rp30.25 thousand for a total area of 1,665m<sup>2</sup> or amounting to Rp50.4 million per month (Note 26).*

*The Company also entered into an agreement to transfer the building management of the southern sector Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from March 1, 2014 until December 31, 2014. Service charges per meter amounted to Rp30.0 thousand for a total area of 937m<sup>2</sup> amounting to Rp28.3 million per month (Note 26).*

*On September 25, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until February 28, 2015, subject to renewal after expiry date. The new rental change amounted to Rp32.9 million per month for a total area of 459.74m<sup>2</sup>. As of the date of this report, the extension of the rental agreement is still in the process of signing.*

**b. Joint Agreement Implementation of Telecommunication Network Business Activities**

*On October 30, 2014, the Company entered into a joint agreement implementation of Telecommunication Network Business Activities with PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), a third party.*

**33 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

Berdasarkan Perjanjian, hak pita frekuensi radio yang sebelumnya dipegang oleh Perusahaan akan digabungkan kepada hak pita frekuensi radio yang dipegang oleh SF berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menkominfo No. 932 tanggal 26 September 2014. Selanjutnya, Perusahaan dapat mempergunakan pita frekuensi radio tersebut dengan skema sewa menyewa jaringan telekomunikasi dengan SF.

Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan akan memperoleh kompensasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan akan memperoleh saham SF sejumlah 1.000.000.000 saham.
- b. Perusahaan akan memperoleh dana sebesar Rp500,0 miliar dari SF untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Frekuensi Terutang, yang akan dibayarkan SF kepada Perusahaan pada tahun ke lima setelah tanggal efektif dari Perjanjian.

Dana tersebut akan diterima dan dimiliki penuh oleh Perusahaan, dan akan digunakan senilai klaim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("KOMINFO") atas jumlah sisa Biaya Frekuensi Terutang oleh Perusahaan yang masih belum dibayar pada saat ulang tahun kelima setelah tanggal efektif, apabila ada. Pembayaran tersebut sepenuhnya untuk kepentingan dan atas nama Perusahaan sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Frekuensi Terutang.

Perusahaan akan menyewa jaringan telekomunikasi milik SF guna melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, setelah tanggal efektif dari Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai tercatat izin pita frekuensi radio adalah nihil, sehingga Perusahaan mencatat imbalan yang diterima dari SF sebesar Rp591,0 miliar sebagai hasil kerjasama penggabungan kegiatan usaha penyelenggara jaringan telekomunikasi.

**c. Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi ("Perjanjian Sewa") dengan pihak ketiga, PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") pada tanggal 30 Oktober 2014. Berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut, Perusahaan akan menyewa jaringan telekomunikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh SF, guna melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

**33 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

*In accordance with the Agreement, the radio frequency previously held by the Company will be merged with that held by SF based on the Menkominfo Decision Letter No. 932 dated September 26, 2014. Furthermore, the Company is allowed to use the radio frequency by using telecommunication network rental scheme with SF.*

*Based on the Agreement, the Company will receive the following compensation:*

- a. *The Company will receive 1,000,000,000 shares of SF.*
- b. *The Company will receive funds of Rp500.0 billion from SF to be used as Payment of Frequency Fees Payable, which will be paid by SF to the Company on the fifth anniversary of the effective date of the Agreement.*

*The funds will be received and fully owned by the Company, and will be used for claim from the Ministry of Communications and Information of the Republic of Indonesia ("KOMINFO") for the remaining Frequency Fee Payable by the Company that remain unpaid at the time of the fifth anniversary of the effective date, if any. The payment made is solely for the benefit and on behalf of the Company as the fulfillment of payment obligations of Frequency Fee Payable.*

*The Company will rent telecommunication networks of SF in order to carry out its business activities in the telecommunication services after the effective date of the Agreement.*

*As of December 31, 2014, the carrying amount of the radio frequency was nil. Therefore, the Company recognized compensation received from SF amounting to Rp591.0 billion as proceeds from merger activity for telecommunication network service.*

**c. Lease Agreement Telecommunication Networks**

*On October 30, 2014, the Company entered into Lease Agreement telecommunication Networks ("Lease Agreement") with PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), a third party. In accordance with the Lease Agreement, SF is willing to lease the telecommunications network that is used and operated by SF for the Company's operation as a telecommunications provider.*

**33 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

Jangka waktu atas Perjanjian Sewa ini berlaku selama tiga tahun sejak Perjanjian Sewa ini ditandatangani. Jangka waktu sewa ini dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama antara Perusahaan dan SF.

Jumlah sewa yang harus dibayar oleh Perusahaan kepada SF setiap bulannya selama jangka waktu sewa adalah sebesar Rp30,0 miliar. Denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1% per hari akan dikenakan kepada Perusahaan, apabila terdapat keterlambatan pembayaran sewa.

Perjanjian sewa tersebut telah diperbaharui dengan amandemen yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2015, No.088A/Commercial/Smartfren /Amd I -BTEL/XII/15 dengan jumlah sewa yang harus dibayar oleh Perusahaan kepada SF setiap bulannya sebesar Rp27,0 miliar. Perjanjian sewa ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal 1 Januari 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dan SF.

**d. Perjanjian Jual Beli Bersyarat**

Perusahaan mengadakan suatu perjanjian jual beli bersyarat (*call and put option agreement*) dengan McBeal Development Ltd tertanggal 2 April 2015 dimana Perusahaan dan calon pembeli dapat melakukan jual beli saham PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") yang dimiliki oleh Perusahaan dengan harga dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dapat di-exercise sewaktu-waktu. Opsi tersebut telah di-exercise pada tanggal 25 September 2015 sebanyak 1.000.000.000 lembar saham atau sekitar 0,97% dari seluruh saham disetor PT Smartfren Tbk ("SF") dengan nilai USD10 juta atau setara dengan Rp146.650,0 juta.

**e. Madison Pacific Trust Limited (sebelumnya dengan Credit Suisse)**

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan *Credit Suisse (Singapore) Limited*, sebagai *facility agent*, dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar USD50 juta untuk jangka waktu delapan belas (18) bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun.

**33 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

*The Lease Agreement is effective for three years from signing of the Lease Agreement. The duration of the lease can be extended based on the terms and conditions mutually agreed between the Company and SF.*

*The amount of rental to be paid every month by the Company to SF during the term of the lease is equal to Rp30.0 billion. The Company will be charged 1% of rental fee per day for any delay in rental payments.*

*The Lease Agreement was renewed with the amendment that was signed on December 22, 2015 No. 088A/Comercial/Smartfren/Amd I -BTEL/XII/15, with the amount of rental to be paid every month by the Company to SF is equal to Rp27.0 billion. The Lease Agreement is effective for three-month period from January 1, 2016, and can be renewed based on mutually agreed between the Company and SF.*

**d. Call and Put Option Agreement**

*The Company have entered into a conditional sales and purchase agreement (call and put option agreement) with McBeal Development Ltd dated April 2, 2015 whereby the Parties may proceed with the sales and purchase of PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") shares under the call and put option agreement and can be exercised at any time. The option to sell has been exercised on September 25, 2015 the whole 1,000,000,000 shares or approximately 0.97% of issued shares of PT Smarfren Telecom Tbk ("SF") with total value amounting to USD10 million or equal to Rp146,650.0 million.*

**e. Madison Pacific Trust Limited (previously with Credit Suisse)**

*On August 30, 2012, the Company entered into a credit agreement with Credit Suisse (Singapore) Limited, as the facility agent, with loan facility amounting to USD50 million that will be payable in eighteen (18) months. This loan bears interest of 11.5% per annum.*

**33 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

Pemberi pinjaman atas pinjaman ini adalah *Orchard Centar Master Limited*, *Orchard Dejima Limited* dan *Milton Global Resources Limited* dengan nilai pinjaman masing-masing sebesar USD26 juta, USD4 juta dan USD20 juta. Pada tanggal 4 Juli 2014, *facility agent* atas pinjaman ini berubah dari dengan *Credit Suisse (Singapura) Limited* menjadi *Madison Pacific Trust Limited* ("MPTL"). Perubahan ini telah diketahui dan disetujui bersama antara Perusahaan sebagai peminjam dengan para pemberi pinjaman.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya (Catatan 14 dan 34).

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG**

Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan dengan register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang jatuh tempo Perusahaan terhadap Netwave Rp4,7 miliar. Pada rapat kreditor tanggal 8 Desember 2014 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara (*voting*) kreditor atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perusahaan dan sebagian besar kreditor konkuren Perusahaan atau sejumlah 94,56% kreditor konkuren telah memberikan suara setuju atas Rencana Perdamaian tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Perjanjian Perdamaian ini Perusahaan dan para kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur didalam Rencana Perdamaian, antara lain sebagai berikut:

**33 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

*The original lenders of this loan are Orchard Centar Master Limited, Orchard Dejima Limited and Milton Global Resources Limited in the amount of USD26 million, USD4 million and USD20 million, respectively. On July 4, 2014, the facility agent of this loan changed from Credit Suisse (Singapore) Limited to Madison Pacific Trust Limited ("MPTL"). This change was acknowledged and agreed together with the Company as borrower and lenders*

*On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Notes 14 and 34).*

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT**

*On October 23, 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) filed a Suspension of Payment (PKPU) petition against the Company under case register No.59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst as a result of non-payment of overdue payables to Netwave by the Company amounting to Rp4.7 billion. At the creditors meeting on December 8, 2014 held in the Commercial Court of the Central Jakarta District Court, discussions were held and creditors voted on the Amicable Settlement Plan proposed by the Company, with the majority, or 94.56% of the unsecured creditors of the Company voting in favor of the Amicable Settlement Plan.*

*On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors.*

*Furthermore, based on the aforementioned, in Amicable Settlement Agreement, the Company and the creditors mutually agree with the terms that have been set out in the Amicable Settlement Agreement, among others, as follows:*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

1. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perusahaan saat ini, Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, dan keadaan pasar, serta kedudukan para kreditor Perusahaan sehubungan dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-jaminan yang diberikan tersebut.
2. *Cash Waterfall.*  
Perusahaan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (di luar Utang Baru dan penerbitan Saham Baru) dari kegiatan usaha utama Perusahaan ke dalam suatu rekening Perusahaan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian PKPU.
3. Pengesampingan terhadap Kewajiban Lain.  
Perjanjian Perdamaian ini tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perusahaan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turutannya (apabila ada).
4. Seluruh bunga, penalti dan/atau denda yang telah timbul sampai dengan Tanggal Homologasi akibat Utang Perusahaan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perusahaan dalam Perjanjian Perdamaian ini.
5. Terhadap tagihan-tagihan lain yang:
  - 1) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau
  - 2) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

1. *Amicable Settlement Agreement was made in consideration of and based on the current condition of the Company's operations, the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, Agreement of Telecommunication Network Lease between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, and the market condition, as well as the position of the creditors in connection with the guarantees held by secured creditors, and the terms and conditions relevant to the guarantees given.*
2. *Cash Waterfall.*  
*The Company will attempt to allocate the Remaining Amount of Cash Operations from the Company's main business activities (outside New Debt and the issuance of New Shares) in the accounts of the Company and which will be used in accordance with the order of priorities as required by the PKPU settlement agreement.*
3. *Waiver of Other Obligations.*  
*The Amicable Settlement Agreement is not binding and does not apply to payments or implementation of the obligations of the Company to any parties related to the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 and Agreement of Telecommunication Network Lease Agreement between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 following the entire agreement and its other related agreements (if any).*
4. *All interest, penalties and/or fines related to the Company's Debts that have been incurred up to the Official Approval of Settlement Agreement Date will be entirely eliminated, except as otherwise expressly and specifically stated by the Company in the Amicable Settlement Agreement.*
5. *With regard to other outstanding bills that:*
  - 1) *have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or*
  - 2) *have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

- 3) yang baru teridentifikasi setelah Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi yang terdapat putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkekuatan okum tetap yang diakui oleh hukum Indonesia;

maka tagihan-tagihan lain sebagaimana disebut di atas (disebut "Utang Diluar Verifikasi") akan tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

- a) tagihan tersebut dapat diterima oleh Perusahaan namun harus sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b) hanya ketika ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tagihan diterima dan diakui kemudian oleh Perusahaan, maka tagihan tersebut akan dibayar Perusahaan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

**Utang Usaha**

A. Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar (utang kategori *Tranche A*), Perusahaan akan melakukan pembayaran tunai atas utang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar, pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.
- b) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar (utang kategori *Tranche A*), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

- 3) those newly identified after the Amicable Settlement Agreement but that came from or arose out of conditions, legal acts, the beginning or a series of events, or laws that occurred before this Amicable Settlement Agreement obtained the binding of the court and arbitration body's decision as recognized by the laws of Indonesia;

the other outstanding bills as referred to above (referred as "Verification of Outside Debt") will be subject to the following conditions:

- a) the outstanding bills may be accepted by the Company but must be in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia (Indonesian Financial Accounting Standards/PSAK) and the prevailing laws; and
- b) only when the above conditions have been met and the outstanding bill is accepted and recognized later by the Company, then the bill will be paid by the Company starting in the 31st year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

**Trade Payables**

A. For Trade Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion (debt category *Tranche A*), the Company will make a cash payment on the payables under the following conditions:

- a) For Trade Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion, the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
- b) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Trade Payables of Rp1.0 to Rp3.0 billion (debt category *Tranche A*), then the payment of residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payable payments on the next due date, and this will continue until the final maturity date.

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

- c) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir b) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.
- B. Utang Usaha diatas Rp3,0 miliar dalam mata uang selain Rupiah (utang kategori *Tranche C*) dan Utang Usaha di atas Rp3,0 miliar dalam mata uang Rupiah (utang kategori *Tranche D*)
1. Nilai Utang Usaha sampai dengan Rp3,0 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.
  2. 30% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
  3. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai utang kategori *Tranche C* sebesar 4% per tahun dan untuk Porsi Tunai utang kategori *Tranche D* sebesar 6% per tahun, yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai di atas.
  4. 70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan Rp2,0 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya ("UUPT").

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

- c) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule in point b) as at the final maturity date, then the remaining amounts of payables will be paid no later than the end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
- B. *Trade Payables above Rp3.0 billion in currencies other than Rupiah (debt category Tranche C) and Trade Payables above Rp3.0 billion in Indonesian Rupiah (debt category Tranche D)*
1. *Trade Payables up to Rp3.0 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.*
  2. *Of the remaining amounts of Trade Payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) will be paid in cash with installments ("Cash Portion") and will be paid not later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
  3. *The Company will provide interest on Cash Portion of Tranche C category at 4% per year and for the Cash Portion of Tranche D category at 6% per year, which will be paid by following the above Cash Portion payment schedule.*
  4. *Of the remaining amounts of Trade Payables, 70% after deduction of the amounts, as mentioned in point 1) will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp2.0 hundred/share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and its changes and/or enhancements ("UUPT").*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya, dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan pada jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
8. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest set out in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion and its interest that remain unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and unpaid interest in accordance with the schedule referred to in point 5) above as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 6) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
8. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 7) above, then the unpaid Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

9. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

**Utang Tower Provider (Penyedia Menara)**

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas sewa tower yang telah jatuh tempo, belum dibayarkan, dan timbul sampai dengan tanggal 10 November 2014:

**A. Utang Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar (utang kategori *Tranche A*)**

- 1) Utang Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.
- 2) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Perdamaian (utang kategori *Tranche A*), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
- 3) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir 2) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.

**B. Utang diatas Rp3,0 miliar**

- 1) Nilai utang sampai dengan Rp3,0 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

9. The Company does not provide interest on the principal amount of the 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.

**Tower Provider Payables (Tower Provider)**

The debt restructuring provisions on Tower Provider Payables for tower rentals that have matured, but are unpaid up to November 10, 2014:

**A. Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion (debt category of *Tranche A*)**

- 1) Payables Rp1.0 up to Rp3.0 billion the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
- 2) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement there are insufficient funds to pay payables as set forth in the Amicable Settlement Agreement, (debt category *Tranche A*), then payment of the residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the payable payments on the next due date, and this will continue until final maturity date.
- 3) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule as referred to in point 2) as at the final maturity date, then the remaining unpaid amounts of the payables will be paid no later than end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

**B. Payables above Rp3.0 billion**

- 1) Payables up to Rp3.0 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

- 2) 30% dari sisa utang setelah dikurang nilai sesuai butir 1) di atas (utang kategori *Tranche D*), berikut dengan bunga sebesar 6% per tahun dari nilai tersebut akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
- 3) 70% dari sisa utang setelah dikurangi nilai sesuai butir 1) di atas akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2,0 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
- 4) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir.
- 5) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
- 6) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

- 2) *Of the remaining amounts of payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) (debt category Tranche D), including its interest at 6% per year will be paid in cash in installments ("Cash Portion") and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
- 3) *Of the remaining amounts of payables, 70% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) above will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp2.0 hundred/ share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of UUPT.*
- 4) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion as set forth in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*
- 5) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
- 6) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

Dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

- 7) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
- 8) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

**C. Sisa Masa Sewa**

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas nilai sewa untuk sisa masa sewa tower berdasarkan perjanjian sewa tower yang telah ada antara Perusahaan dengan masing-masing kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masing-masing perjanjian sewa tersebut:

- 1) 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2,0 ratus/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
- 2) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai yang akan ditukar menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

And combined with Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).

- 7) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
- 8) *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

**C. The Remaining Lease Period**

The debt restructuring provisions of Tower Provider Payables for the remaining term of the tower lease based on the existing tower lease agreements between the Company and each of the creditors on Tower Provider Payables calculated from November 10, 2014 through the end of the lease term in accordance with respective tower lease agreement are as follows:

- 1) *The total amount (100%) of the remaining term of the lease will be exchanged for Mandatory Convertible Bond (MCB-A) for a period of ten (10) years issued by the Company on the Effective Date at the conversion price of Rp2.0 hundred/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
- 2) *The Company does not provide interest on the amount to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

**D. Penghentian Fasilitas Penyediaan Tower**

Kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait.

**Utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) dan  
Universal Service Obligation (USO)**

1. Utang Pokok BHP dan USO adalah utang yang diakui Perusahaan secara tertulis sampai dengan tanggal 10 November 2014 ("Utang Pokok BHP"), terdiri atas:
  - a. Utang BHP Frekuensi Pita.
  - b. Utang BHP Frekuensi ISR.
  - c. Utang BHP Telekomunikasi.
  - d. Utang USO.
2. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Utang Pokok BHP, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan Utang Pokok BHP berikutnya.
3. Pembayaran Utang Pokok BHP Frekuensi Pita, Utang BHP Frekuensi ISR, Utang BHP Frekuensi Telekomunikasi dan Utang USO akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-10 setelah Tanggal Homologasi.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang yang diatur dalam butir 3) di atas, maka sisa utang yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila masih terdapat sisa utang yang belum dibayarkan setelah tahun ke-10 setelah Tanggal Homologasi maka sisa utang tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun berikutnya secara prorata setiap tahunnya.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

**D. Termination of Tower Provider Facilities**

Creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

**Payables on Fee of Right to Use (BHP) and  
the Universal Service Obligation (USO)**

1. BHP and USO Principal Payables represent payables that are recognized by the Company in writing up to November 10, 2014 ("BHP Principal Payables"), consisting of:
  - a. BHP Frequency Band Payables.
  - b. BHP Frequency ISR Payables.
  - c. BHP Telecommunication Payables.
  - d. USO Payables.
2. In the event of excess payment of BHP Principal Payables, the excess will be included in the next repayment installments of BHP Principal Payables.
3. Principals of BHP Frequency Band Payables, BHP Frequency ISR Payables, BHP Frequency Telecommunications Payables and USO Payables will be paid in installments and will be paid no later than the 10th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
4. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the payables as referred to in point 3) above, then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until final maturity date. If there are remaining payables after the 10th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date then these remaining payables will be paid within a period of five (5) years on a pro rata basis each year.

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas maka sisa utang yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran sisa utang pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
6. Dalam hal terdapat penjaminan atas pembayaran Utang Pokok BHP dan penjaminan tersebut kemudian jatuh tempo dan diefektifkan/dicairkan sebelum jadwal pembayaran Utang Pokok BHP tersebut di atas berakhir, maka jadwal pembayaran tersebut tidak berlaku lagi kecuali masih terdapat sisa Utang Pokok BHP terkait yang jadwal pembayarannya tetap akan merujuk pada jadwal pembayaran Utang Pokok BHP sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

**Utang Dana Hasil Wesel Senior**

- A. Pembayaran Utang Dana Hasil Wesel Senior akan dilakukan oleh Perusahaan dengan cara sebagai berikut:
1. 30% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior (utang kategori *Tranche C*) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
  2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utang kategori *Tranche C* sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
  3. 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu sepuluh (10) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang oleh Perusahaan dengan harga pelaksanaan konversi Rp200,0/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the payables based on schedule as referred in point 4), then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
6. *In the event of a guarantee given for payment of BHP Principal Payables and the guarantee then matures and is effected before the aforementioned BHP Principal Payables repayment schedule expires, the payment schedule is no longer valid unless related BHP Principal Payables remain that still refer to the BHP Principal Payables repayment schedule as stipulated in the Amicable Settlement Agreement.*

**Payables on Proceeds from Senior Notes**

- A. *Payables on Proceeds from the Senior Notes will be made by the Company in the following manner:*
1. *Of Payables on Proceeds from Senior Notes (debt category Tranche C), 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
  2. *The Company will provide interest at 4% on Cash Portion of debt category Tranche C, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.*
  3. *Of the Affiliate Payables, 70% will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date and may be extended by the Company at the conversion price of Rp200.0/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunganya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/ *Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in point 1) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.*
5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.
9. Jika diperlukan, Perusahaan akan berusaha meminta atau melakukan upaya/tindakan yang diperlukan agar dilaksanakan penyelesaian/pembayaran atas Utang Dana Hasil Wesel Senior sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan dan ketentuan, antara lain sebagai berikut:
  - a) Secara khusus meminta perhatian pengadilan bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan *Securities Acts* Amerika Serikat, diperkenankan untuk berpedoman pada pengecualian terhadap pendaftaran berdasarkan Pasal 3(a)(10) dari *Securities Acts* 1933 Amerika Serikat, dimana, Pasal 3(a)(10) mengizinkan suatu proses pengadilan di luar Amerika Serikat (dalam hal ini, proses PKPU Perusahaan) untuk melakukan suatu pertukaran Wesel Senior dengan pemegang Wesel Senior yang berada di Amerika Serikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
  - b) Atas Porsi Tunai dapat diterbitkan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan ditawarkan kepada para pemegang Wesel Senior sebagai pertukaran (*exchange offer*) berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk pengecualian pendaftaran yang sesuai berdasarkan *Securities Acts* Amerika Serikat. Surat berharga yang baru dapat memiliki ketentuan dan persyaratan tambahan sebagaimana akan disetujui oleh pemegang Wesel Senior, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian ini.
  - c) Apabila ada pemegang Wesel Senior yang tidak bersedia untuk melepaskan tagihan berdasarkan hukum manapun, maka mereka tidak berhak untuk menerima surat berharga baru.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

8. *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*
9. *If necessary, the Company will attempt to solicit or make efforts/actions needed to be implemented for settlement/payment of Payables on Proceeds from Senior Notes in accordance with the provisions of the Amicable Settlement Agreement, including but not limited to the following acts and provisions, among others:*
  - a) *In particular call to the attention of the court that, in order to comply with the United States Securities Acts, it be allowed to be guided by the exceptions to the registration pursuant to Article 3(a)(10) of the 1933 United States Securities Act, whereby Article 3(a)(10) permits a court outside the United States (in this case, the PKPU process of the Company) to conduct an exchange of Senior Notes by the holders of such Notes who are in the United States providing they meet certain conditions.*
  - b) *The Cash Portion may be exchanged for new securities issued by the Company and offered to holders of Senior Notes based on the prevailing capital market regulations, including the appropriate registration exemption under the United States Securities Acts, The new securities may have additional terms and conditions as shall be approved by the holders of the Senior Notes, and the provisions do not conflict with this Amicable Settlement Agreement.*
  - c) *If there are any holders of Senior Notes who are not willing to relinquish any claim under the law, then they are not entitled to receive new securities.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

Ketentuan ini secara khusus tidak mengurangi hak Perusahaan untuk meminta pengakuan atas proses PKPU ini berdasarkan Pasal 15 *Bankruptcy Code* Amerika Serikat atau setiap ketentuan lain dari hukum nasional manapun yang mengizinkan pengakuan atas proses pengadilan asing.

- d) Melakukan upaya yang wajar agar Pemegang Wesel Senior asing dapat dihubungi melalui sistem kliring. Namun demikian, jika ada Pemegang Wesel Senior asing yang tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk menerima surat berharga baru dalam waktu enam (6) bulan sejak pemberitahuan, maka seluruh hak mereka akan gugur.

10. Untuk menghindari keragu-raguan:

- a) Utang Dana Hasil Wesel Senior adalah utang Perusahaan kepada BTPL sebesar USD380,0 juta berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* dan *Supplemental Intercompany Loan Agreement* masing-masing tertanggal 7 Mei 2010 dan 27 Januari 2011 ("*Intercompany Loan Agreement*") dimana Perusahaan sebagai peminjam dan BTPL sebagai pemberi pinjaman.
- b) Dana Hasil Wesel Senior yang diperoleh Perusahaan berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* merupakan dana hasil penerbitan Wesel Senior yang harus diberikan oleh BTPL dalam bentuk pinjaman kepada Perusahaan melalui *Intercompany Loan*, sesuai dengan ketentuan dalam *Offering Memorandum USD250 Million 11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015* dan *USD130 Million Senior Notes at 107%* yang diterbitkan oleh BTPL.
- c) Dengan di-homologasi-nya Perjanjian Perdamaian ini yang juga mencakup skema atau pola penyelesaian Utang Dana Hasil Wesel Senior oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

*This provision specifically does not reduce the Company's right to request recognition of this PKPU process under Article 15 United States Bankruptcy Code or any other provision of any national law that allow the recognition of the foreign court.*

- d) *Make a reasonable effort so that foreign holders of Senior Notes may be contacted through the clearing system. However, if there is a foreign holder of Senior Notes that cannot be contacted or does not provide the necessary documentation to receive new securities within six (6) months from the notification, then all their rights will be void.*

10. *For the avoidance of doubt:*

- a) *Payables on Proceeds from Senior Notes are Payables of the Company to BTPL amounting to USD380.0 million based on the Intercompany Loan Agreement and Supplemental Intercompany Loan Agreement, dated May 7, 2010 and January 27, 2011, respectively, ("Intercompany Loan Agreement"), wherein the Company is the borrower and BTPL the lender.*
- b) *Proceeds from the Senior Notes were acquired by the Company based on the Intercompany Loan Agreement as the proceeds from the Senior Notes to be provided by BTPL in the form of loans to the Company through Intercompany Loan in accordance with the provisions of the Offering Memorandum, being USD250 million 11.5% Senior Guaranteed Notes Due 2015 and USD130 million Senior Notes at 107%, issued by BTPL.*
- c) *With the Amicable Settlement Agreement, which also includes a scheme or pattern of settlement of Payables on Proceeds from Senior Notes by the Company.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

Maka terhitung sejak Tanggal Homologasi tersebut, Perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh perjanjian atau dokumen yang terkait dengan penerbitan Wesel Senior yang menjadi berakhir, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh jaminan yang ada dalam rangka penerbitan Wesel Senior, yaitu jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang diberikan oleh Perusahaan, jaminan yang diberikan oleh Para Penjamin, serta jaminan lainnya apabila ada. Dalam hal terdapat putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh hukum Indonesia yang menyatakan Perusahaan dan Para Penjamin wajib melaksanakan pembayaran akibat pencairan setiap jaminan yang diberikan dalam penerbitan Wesel Senior maka pembayaran kewajiban tersebut akan dilakukan Perusahaan dengan mengikuti ketentuan Perjanjian Perdamaian ini dan porsi pembayaran kewajiban tersebut akan mengurangi porsi pembayaran terhadap Utang Dana Hasil Wesel Senior secara sama besar.

**Utang Afiliasi**

Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

1. 100% dari Utang Afiliasi akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
2. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas yang akan dikonversi menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

**Utang dengan Jaminan (Utang Kategori  
Tranche B)**

1. Terhadap Utang dengan Jaminan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang pokoknya saja.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

*Then starting from the Official Approval of Settlement Agreement Date, the Company no longer has an obligation to fulfill the entire agreements or documents associated with the issuance of the Senior Notes, which were automatically terminated, including but not limited to compliance with all existing collateral for issuance of the Senior Notes, which are Corporate Guarantee provided by the Company, the guarantee given by the Guarantor, as well as other guarantees, if any. In the event of a court decision that is legally binding and recognized by Indonesian law, which rules that the Company and the Guarantor shall make payment due to execution of any guarantees given in the issuance of Senior Notes, the payment obligations of the Company will be carried out by following the provisions of the Amicable Settlement Agreement and the portion of payment obligations will reduce the portion of payment to Payables on Proceeds from Senior Notes in the same amount. payment to Payables on Proceeds from Senior Notes in the same amount.*

**Affiliate Payables**

*Affiliate Payables will be paid under the following scheme:*

1. *All the Affiliate Payables (100%) will be exchanged for the Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date of conversion at an exercise price of Rp2 hundred/share having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
2. *The Company does not provide interest on the amount of payables as referred to in point 1) to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.*

**Payables with Collateral (Debt Category Tranche B)**

1. *Payables with Collateral in the Amicable Settlement Agreement are included and recognized only for their principal amounts.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

2. Seluruh jumlah Utang dengan Jaminan akan dibayarkan secara tunai dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
3. Perusahaan akan memberikan bunga atas Utang dengan Jaminan sebesar 4% yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang dengan Jaminan beserta bunganya yang diatur dalam butir 2) dan 3), maka sisa nilai Utang dengan Jaminan dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran berikutnya pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Utang dengan Jaminan dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Utang dengan Jaminan") maka Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar, Sisa Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Utang dengan Jaminan yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

2. *The entire amounts of Payables with Collateral will be paid in cash by installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
3. *The Company will provide interest at 4% on Payables with Collateral, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 2) above.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Payables with Collateral and associated interest as referred in points 2) and 3), then payment of the residual value of Payables with Collateral and associated interest remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payment on the next due date, and this will continue.*
5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Payables with Collateral and associated interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Payables With Collaterals") then the Remaining Payables with Collateral shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Payables with Collateral will be deferred and combined with Remaining Payables with Collateral on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Utang dengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas masih terdapat Sisa Utang dengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**Utang Akibat Derivatif (utang kategori  
Tranche C)**

1. 30% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4% per tahun yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
3. 70% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) berjangka waktu sepuluh (10) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200,0/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) dan 2) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Payables with Collateral will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

**Derivatives Payables (debt category Tranche C)**

1. *Of remaining amount of Derivative Payables, 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
2. *The Company will provide interest at 4% on Cash Portion, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.*
3. *Of the Derivative Payables, 70% will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) issued by the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date at the conversion price of Rp200.0/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in points 1) and 2) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai, setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB B) berjangka waktu 2 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

**Utang Pembiayaan Kendaraan**

1. Utang Pembiayaan Kendaraan termasuk bunganya akan dibayar sesuai ketentuan kontrak antara Perusahaan dengan kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
8. *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

**Vehicles Finance Payables**

1. *Vehicles Finance Payables and associated interest will be paid in accordance with the terms in the contract between the Company and creditors based on existing Vehicles Finance Payables that were entered into before this Amicable Settlement Agreement.*

**34 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

2. Kelalaian atau kegagalan pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan berdasarkan kontrak yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini yang menimbulkan akibat atau konsekuensi yang diatur dalam kontrak tersebut, tidak menyebabkan atau tidak dianggap telah terjadi kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.

**Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi,  
antara lain sebagai berikut:**

1. Tidak ada pemberian jaminan kebendaan dan/atau jaminan perusahaan yang baru yang akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.
2. Setiap Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini yang tidak dimintakan konversi menjadi saham Perusahaan oleh kreditor terkait sampai dengan tanggal jatuh tempo MCB tersebut, maka MCB tersebut menjadi berakhir dan jika terdapat klaim atas nilai MCB tersebut oleh kreditor maka pembayarannya akan dilakukan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU masih memerlukan proses lebih lanjut yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini masih berlangsung.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk melakukan penambahan modal baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Huawei Tech Investment telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp 1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham.

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan menerbitkan sertifikat OWK bagi masing-masing kreditor yang berhak memperoleh OWK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

**34 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

2. *Negligence or failure in the implementation of the Company's obligations to creditors on Vehicles Finance Payables under existing contracts prior to the Amicable Settlement Agreement, arising from or due to consequences as stipulated in the contract, shall not cause or be deemed to have resulted in the failure of the implementation of the Amicable Settlement Agreement.*

**Other Restructuring Provisions, among others, are  
as follows:**

1. *No new asset guarantees and/or corporate guarantees shall be given in connection with the Amicable Settlement Agreement, unless otherwise determined by the Company.*
2. *Each Mandatory Convertible Bonds (MCB) issued pursuant to this Amicable Settlement Agreement whose conversion into shares of the Company is not requested by creditors on its maturity date, shall then be automatically terminated and should a claim on the MCB be subsequently be made by creditors, the payment will be made after the 31st year following the Official Approval of Settlement Agreement Date.*

*The execution of this Amicable Settlement Agreement in PKPU is still subject to further process, which as of the completion date of the consolidated financial statements is still ongoing.*

*On June 26, 2016, the Company had approval from the General Meeting of Shareholders the Company to perform additional capital without right to order by OWK mechanism as stipulated on Amicable Settlement Agreement.*

*On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by PT Huawei Tech Investment amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares.*

*In August 2016, the Company issued OWK certificates for each creditors which are entitled to obtain OWK as stipulated on Amicable Settlement Agreement.*

**35 . KONTINJENSI**

- a. Pada tanggal 18 Juni 2008, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan keputusan No. 26/KPPU-L/2007 agar Perusahaan membayar denda sebesar Rp4,0 miliar kepada Kas Negara atas pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perusahaan mengajukan keberatan atas keputusan KPPU pada tanggal 23 Juli 2008 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 April 2015, Perusahaan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan informasi bahwa Mahkamah Agung telah mengkonsolidasikan permohonan keberatan atas keputusan No.26/KPPU-L/2007 (termasuk keberatan dari Perusahaan) dan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili keberatan dari semua pemohon. Pada tanggal 27 Mei 2015, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan menerima keberatan atas keputusan KPPU dan memutuskan pada pokoknya bahwa Perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 tersebut diatas.

Pada tanggal 22 Juni 2015, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 5 Desember 2016, telah diberitahukan kepada Perusahaan bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi atas putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan amar putusan dalam pemberitahuan resmi tersebut Perusahaan diharuskan membayar denda sebesar Rp 4.000.000.000 kepada kas Negara.

Pembayaran denda tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Perusahaan dengan mengikuti ketentuan klausul 1.5 butir V dalam Perjanjian Perdamaian.

- b. Pengajuan gugatan oleh Pemegang Wesel Senior terhadap Kelompok Usaha pada Pengadilan New York**

Pada tanggal 22 September 2014, terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemegang 25% Wesel Senior-USD yaitu Universal Investment Advisory SA, Vaquero Master EM Credit Fund Ltd, dan Trucharm Ltd yang tergabung dalam Komite Ad Hoc, mengajukan gugatan terhadap Kelompok Usaha terkait dengan pembayaran bunga Wesel Senior-USD yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd. (Entitas Anak) Gugatan tersebut terdaftar pada Pengadilan New York dengan nomor 652890/2014 (Gugatan 1).

**35 . CONTINGENCIES**

- a *On June 18, 2008, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) issued Decision No. 26/KPPU-L/2007 ordering the Company to settle fines amounting to Rp4.0 billion to the State Treasury (Kas Negara) for violating Article 5 of Law No. 5 year 1999 on Anti-Monopoly and Unfair Competition.*

*The Company filed a petition to object against KPPU's decision on July 23, 2008 to the South Jakarta District Court. On April 8, 2015, the Company received letter from the Central Jakarta District Court to provide information that the Supreme Court has consolidated the petition of objection against the Decision No. 26/KPPU-L/2007 (including the objection from the Company), and appointed the District Court of Central Jakarta to adjudicate the objection from all petitioners. On May 27, 2015, the Presiding Judges issued Judgment to accept the objection againsts the KPPU Decision and also declared in principle that the Company does not violate Article 5 of Law No. 5 year 1999 as stated above.*

*On June 22, 2015, KPPU had submitted a cassation regarding the District Court of Central Jakarta decision to the Supreme Court. Based on official notice form the District Court of South Jakarta dated December 5, 2016, had notified the Company that on May 28, 2016 the Supreme Court has issued an appeal verdict on the decision of the Central Jakarta District Court. Based on the decision, the Company is required to pay a penalty a sum of Rp4,000,000,000 to the state treasury.*

*The payment of penalty will be executed by the Company based on Amicable Settlement Plan clause 1.5 point V.*

- b Lawsuit filed by Senior Notes Holders against the Group in the Supreme Court of New York**

*On September 22, 2014, parties acting on behalf of themselves as the holders of 25% of USD Senior Notes, namely Universal Investment Advisory SA, Vaquero EM Credit Master Fund Ltd, and Trucharm Ltd incorporated in the Ad Hoc Committee, and filed a lawsuit against the Group in connection with the payment of interest on the USD Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd (a Subsidiary). The lawsuit was registered with the New York Supreme Court under a number 652890/2014 (Claim 1).*

**35 . KONTINJENSI (lanjutan)**

Pengajuan Gugatan 1 tersebut dilakukan pada saat Kelompok Usaha sedang melakukan upaya negosiasi untuk melakukan restrukturisasi pembayaran Wesel Senior-USD dengan *Steering Committee*.

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Komite Ad Hoc melakukan perubahan pada Gugatan 1, dimana selain tuntutan pembayaran bunga Wesel Senior-USD, Komite Ad Hoc juga menuntut percepatan pembayaran utang pokok dari Wesel Senior-USD (Gugatan 2). Pengajuan tuntutan pembayaran bunga dan percepatan pembayaran pokok Wesel Senior-USD juga disampaikan oleh Bank of New York Mellon selaku pihak trustee yang mengatasmakan pemegang 25% Wesel Senior-USD di atas.

Tuntutan dari Komite Ad Hoc pada dasarnya adalah untuk pokok dan bunga Wesel Senior-USD yang telah jatuh tempo (dengan asumsi bahwa Wesel Senior-USD telah secara sah dipercepat). Tuntutan ini telah terakomodasi di dalam Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor Perusahaan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian). Perusahaan bermaksud untuk mengajukan permohonan pengakuan atas hasil proses PKPU di New York berdasarkan peraturan Bab 15 Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat dan diharapkan bahwa proses pengakuan tersebut akan menjadi penyelesaian bagi proses peradilan di New York.

Dengan diajukannya permohonan PKPU oleh Netwave maka proses negosiasi tersebut terhenti dan skema restrukturisasi yang pernah diusulkan kemudian dituangkan di dalam Rencana Perdamaian dalam PKPU.

Pada tanggal 9 November 2014, Kelompok Usaha telah menerima notifikasi dari Wali Amanat yang juga mewakili para Pemegang Wesel Senior-USD perihal permintaan percepatan pembayaran atas pokok dan bunga yang sudah jatuh tempo dan belum terbayar atas seluruh utang Wesel Senior-USD.

Sampai dengan tanggal laporan ini, gugatan tersebut masih berlangsung dan hasil akhirnya belum dapat ditentukan saat ini.

- c. Pada tanggal 5 Juni 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kemenkominfo") sebagai salah satu kreditor yang tagihannya diselesaikan melalui PKPU, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2014 yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

**35 . CONTINGENCIES (continued)**

*Submission of Claims 1 was made at the time when the Group making efforts to negotiate restructuring of the payment of the USD Senior Notes with the Steering Committee.*

*On October 1, 2014, the Ad Hoc Committee made an amendment to Claim 1, in which in addition to the demands of USD Senior Notes interest payments, the Ad Hoc Committee also demanded accelerated repayment of the principal debt of the USD Senior Notes (Claim 2). Claims for payment of interest and accelerated principal of USD Senior Notes were also submitted by the Bank of New York Mellon as trustee on behalf of the above holders of 25% of the USD Senior Notes.*

*The Ad Hoc Committee's claim was essentially for principal and interest due on the USD Senior Notes (on the assumption that the USD Senior Notes have been validly accelerated). These claims have been compromised under the Amicable Settlement Plan approved by creditors of the Company in the context of the Suspension of Payment Process (PKPU) of the Company's obligations proceedings (as described in the Settlement Agreement). The Company intends to apply for recognition of the PKPU proceedings in New York under Chapter 15 of the US Bankruptcy Code and is advised that such recognition would be dispositive of the New York litigation.*

*With the filing of the petition PKPU by Netwave, the negotiation process was stopped and the proposed restructuring scheme was then incorporated into the Amicable Settlement Plan in the PKPU.*

*On November 9, 2014, the Group received a notice from the Trustee which is also acting on behalf of the USD Senior Notes Holders, regarding the accelerated payment of the principal and any accrued and unpaid interest of the total debt of USD Senior Notes.*

*As of the date of this report, the lawsuit is still ongoing and the outcome is not presently determinable.*

- c. *On June 5, 2015, The Ministry of Communication and Information of Republic of Indonesia ("Kemenkominfo") as one of the Company's creditors whose receivables have been settled through PKPU, has requested a Judicial Review on the Commercial Court District Court of Central Jakarta Decision No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 9, 2015, which is considered final and legally binding.*

**35 . KONTINJENSI (lanjutan)**

Dalam memori peninjauan kembali, Kemenkominfo mendalilkan bahwa Kemenkominfo merupakan kreditur preferen dari Perusahaan, oleh karenanya meminta agar Kemenkominfo dan tagihannya dikeluarkan dari PKPU Perusahaan.

Permohonan peninjauan kembali tersebut tidak menghalangi pelaksanaan penyelesaian perdamaian utang yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Pada tanggal 23 Oktober 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan menolak permohonan peninjauan kembali Kemenkominfo dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kemenkominfo.

Manajemen Perusahaan yakin dapat mempertahankan pendapatnya. Karena itu, tidak ada liabilitas yang dicatat untuk merefleksikan kontinjensi tersebut.

**36 . KELANGSUNGAN USAHA**

Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh rugi penurunan nilai aset, rugi selisih kurs, beban keuangan dan kerugian usaha dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, total liabilitas jangka pendek Kelompok Usaha telah melampaui total asetnya. Lebih lanjut, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 utang Wesel Senior dalam kondisi wanprestasi (Catatan 13).

Sehubungan dengan upaya mempertahankan kelangsungan dan pengembangan usaha, inisiatif dan rencana yang akan dilakukan Perusahaan diantaranya:

- a. Mengikuti semua ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian penyelesaian utang Perusahaan yang sudah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Catatan 34).
- b. Mengembangkan bisnis yang ada saat ini yaitu di bidang layanan telekomunikasi untuk pelanggan korporat, layanan call center, jasa terkait teknologi informasi dan jasa engineering.

**35 . CONTINGENCIES (continued)**

*In its Judicial Review memorandum, Kemenkominfo has claimed itself to be Preferred Creditor of the Company and therefore it has requested that Kemenkominfo and its receivables be excluded from the Company's PKPU.*

*Said Judicial review shall not in any way obstruct the execution of the payable under the Amicable Settlement Agreement.*

*On October 23, 2015, the Supreme Court decided to decline a judicial review as submitted by Kemenkominfo and as of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not received a decision letter on the judicial review that was requested by Kemenkominfo.*

*Management of the Company expected to be successful in defending its position. Therefore, no accrual has been made to reflect the contingency.*

**36 . GOING CONCERN**

*The Group is in a capital deficiency position as of December 31, 2019 and 2018. This condition is mainly caused by impairment loss on assets, loss on foreign exchange, significant finance costs and accumulation of losses from previous years. As of December 31, 2019 and 2018, total current liabilities of the Group have exceeded its total assets. In addition, as of December 31, 2019 and 2018, Senior Notes was in default condition (Note 13).*

*With regards of going concern and business development efforts, initiatives and plans that will be implemented by the Company including:*

- a. *Maintain compliance to the terms and conditions of the Amicable Settlement Agreement that has been approved by the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court (Note 34).*
- b. *Develop existing business to provide telecommunication services to corporate customers, call center services, information technology and engineering services.*

**36 . KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)**

- c. Bisnis penyedia infrastruktur media akan dilakukan di masa depan dalam waktu dekat, saat ini sedang dilakukan persiapan-persiapan yang diperlukan sekaligus dengan memperhatikan peraturan terkait.
- d. Pada Tahun 2017, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK-A) sebagai pembayaran atas utang-utang Perusahaan kepada para kreditur, sebagai salah satu upaya pelaksanaan penyelesaian utang melalui PKPU.
- e. Menerapkan kebijakan pengendalian biaya.
- f. Implementasi restrukturisasi utang Wesel Senior yang diterbitkan Entitas Anak di Singapura.

**37 . PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

Pada tanggal 20 April 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan saham bersyarat atas kepemilikan saham Perusahaan pada Bakrie Telecom Pte., Ltd (BTPL) kepada PT Bakrie Digital Net ("BNET") yang merupakan Entitas Anak dengan 99,9% kepemilikan.

Pada tanggal yang disepakati, Perusahaan akan menjual dan mengalihkan kepemilikan atas saham Perusahaan pada BTPL kepada BNET sebagaimana BNET akan membeli dan menerima pengalihan saham Perusahaan tersebut.

**38 . PERNYATAAN DAN INTERPRETASI AKUNTASI YANG BELUM DITERAPKAN**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi atas standar akuntansi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi atas standar akuntansi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

- PSAK No. 4 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi"
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), "Properti Investasi"
- PSAK No. 15 (Revisi 2015), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 19 (Revisi 2015), "Aset Tak Berwujud"
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015), "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja"

**36 . GOING CONCERN (continued)**

- c. *Business media infrastructure providers will be in the future in the near future, and preparations are being made at the same time concerning with the relevant regulations.*
- d. *In 2017, the Company has issued Mandatory Convertible Bonds (OWK-A) as payment for the Company's debts to the creditors as one of the efforts to implement debt settlement through PKPU.*
- e. *Implementation of cost-reduction policies.*
- f. *Implementation of restructuring Senior Notes by subsidiary in Singapore.*

**37 . EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**

*On April 20, 2020, the Company entered into a conditional share purchase agreement to sell the Company's share subscribed in Bakrie Telecom Pte, Ltd ("BTPL") to PT Bakrie Digital Net ("BNET"), a subsidiary of the Company with 99,9% of ownership.*

*On the completion date, the Company agrees to sell and transfer the ownership of the Company share subscribed in BTPL to BNET as BNET agrees to purchase and acquire such Company's shares.*

**38 . ACCOUNTING STATEMENTS AND INTERPRETATIONS NOT YET ADOPTED**

*The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued new, adjustment and revised statements and interpretations of accounting standards which are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2015.*

*The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued new, adjustment and revised statements and interpretations of accounting standards which are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2015.*

- *PSAK No. 4 (Revised 2015), "Separate Financial Statements"*
- *PSAK No. 5 (Adjustment 2015), "Operating Segment"*
- *PSAK No. 13 (Adjustment 2015), "Investment Property"*
- *PSAK No. 15 (Revised 2015), "Investments in Associates and Joint Ventures"*
- *PSAK No. 19 (Revised 2015), "Intangible Assets"*
- *PSAK No. 22 (Adjustment 2015), "Business Combinations"*
- *PSAK No. 24 (Revised 2015), "Employee Benefits"*

**38 . PERNYATAAN DAN INTERPRETASI AKUNTASI  
YANG BELUM DITERAPKAN (lanjutan)**

- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 65 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66 (Revisi 2015), "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67 (Revisi 2015), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 30 (Revisi 2015), "Pungutan"

Pernyataan akuntansi dan interpretasi revisi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK No. 31 (Revisi 2015), "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi"

Pernyataan akuntansi baru dan revisi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap"
- PSAK No. 69, "Agrrikultur"

Kelompok Usaha sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi tersebut tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**38 . ACCOUNTING STATEMENTS AND  
INTERPRETATIONS NOT YET ADOPTED (continued)**

- *PSAK No. 25 (Adjustment 2015), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors"*
- *PSAK No. 53 (Adjustment 2015), "Share-based Payment"*
- *PSAK No. 65 (Revised 2015), "Consolidated Financial Statements"*
- *PSAK No. 66 (Revised 2015), "Joint Arrangements"*
- *PSAK No. 67 (Revised 2015), "Disclosure of Interests in Other Entities"*
- *PSAK No. 68 (Adjustment 2015), "Fair Value Measurement"*
- *ISAK No. 30 (Revised 2015), "Collection"*

*The revised accounting statement and interpretation issued and effective for the year commencing on or after January 1, 2017 are as follows:*

- *PSAK No. 1 (Revised 2015), "Presentation of Financial Statements"*
- *ISAK No. 31 (Revised 2015), "Interpretation of PSAK No. 13: Investment Property"*

*The new and revised accounting statements issued and effective for the year commencing on or after January 1, 2018 are as follows:*

- *PSAK No. 16 (Revised 2015), "Fixed Assets"*
- *PSAK No. 69, "Agriculture"*

*The Group is evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of such new, adjustment and revised statements and interpretations.*



**PT Bakrie Telecom Tbk**  
Wisma Bakrie Lt 2  
JL. HR Rasuna Said Kav B-1  
Jakarta 12920

+6221 - 5292 0264

[www.bakrietelecom.com](http://www.bakrietelecom.com)

[corsec@bakrietelecom.com](mailto:corsec@bakrietelecom.com)

RUPS BTEL 2020

